



Katalog: 9199017

Edisi 86
Juli 2017

Laporan Bulanan **Data Sosial Ekonomi**

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Edisi 86
Juli 2017

Laporan Bulanan
Data Sosial Ekonomi

<http://www.bps.go.id>



Laporan Bulanan

Data Sosial Ekonomi

Juli 2017

ISSN: 2087-930X

Katalog : 9199017

No. Publikasi: 03220.1710

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xx + 148 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Direktorat Statistik Distribusi
Direktorat Neraca Produksi
Direktorat Statistik Harga
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata
Direktorat Neraca Pengeluaran
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Direktorat Statistik Industri
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Dicetak dan Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

HEADLINES

1. Inflasi

Pada Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 0,69 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2017 terhadap Juni 2016) sebesar 4,37 persen.

2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 (*y-on-y*) tumbuh 5,01 persen meningkat dibandingkan capaian triwulan I-2016 sebesar 4,92 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan I-2017 dibanding triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,34 persen (*q-to-q*).

3. Ekspor

- Nilai ekspor Mei 2017 sebesar US\$14,29 miliar, naik 7,62 persen jika dibanding ekspor April 2017 dan naik 24,08 persen dibanding ekspor Mei 2016.
- Nilai ekspor nonmigas Mei 2017 mencapai US\$13,02 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,31 miliar, hasil industri pengolahan US\$10,75 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$1,95 miliar.

4. Impor

- Nilai impor Mei 2017 sebesar US\$13,82 miliar, naik 15,67 persen dibanding impor April 2017 dan naik 24,03 persen jika dibanding impor Mei 2016.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Mei 2017 mencakup barang konsumsi sebesar US\$1,28 miliar, bahan baku/penolong US\$10,54 miliar, dan barang modal US\$2,00 miliar.

5. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Mei 2017 naik masing-masing sebesar 0,29 persen dan 0,26 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya.
- Upah riil harian buruh tani Mei 2017 turun sebesar 0,45 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Mei 2017 turun 0,13 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya.

6. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Perdesaan dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP Juni 2017 naik 0,38 persen dibanding Mei 2017.
- Pada Juni 2017, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,22 persen.
- NTUP Juni 2017 naik 0,41 persen dibanding Mei 2017.

7. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras Juni 2017 sebesar Rp13.125,00 per kg, naik 0,22 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga daging ayam ras naik 2,53 persen; ikan kembung naik 1,58 persen; daging sapi naik 1,01 persen; sedangkan harga cabai rawit turun 14,71 persen; cabai merah turun 9,27 persen.

8. a. Indeks Harga Produsen

Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada triwulan I-2017 naik 1,13 persen terhadap triwulan IV-2016 (*q-to-q*). Demikian pula terhadap triwulan I-2016 (*y-on-y*) naik 4,05 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas Juni 2017 turun sebesar 0,07 persen dibanding bulan sebelumnya.
- Pada Mei 2017 IHPB Umum turun sebesar 0,28 persen dibanding bulan sebelumnya.

9. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan I-2017 sebesar 103,42. Hal ini menunjukkan kondisi bisnis meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun tingkat optimisme pelaku bisnis lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan IV-2016 (nilai ITB sebesar 106,70).
- Nilai ITB pada triwulan II-2017 diprediksi sebesar 104,22. Dengan demikian, kondisi bisnis diperkirakan akan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme pelaku bisnis juga diperkirakan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I-2017.
- Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada triwulan I-2017 sebesar 102,27. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi konsumen meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan I-2017 relatif sama dibandingkan triwulan IV-2016. Kondisi ini tercermin dari nilai ITK triwulan I-2017 yang hampir sama dengan triwulan IV-2016 sebesar 102,46.

- Nilai ITK nasional pada triwulan II-2017 diperkirakan sebesar 112,73. Dengan demikian, kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat. Tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2017.

10. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan I-2017 naik 4,33 persen dibanding triwulan I-2016 (*y-on-y*) dan mengalami kenaikan 0,86 persen dari triwulan IV-2016 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan I-2017 naik 6,63 persen dibanding triwulan I-2016 (*y-on-y*) dan mengalami kenaikan 2,44 persen dari triwulan IV-2016 (*q-to-q*).

11. Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman selama Januari–Mei 2017 mencapai 5,29 juta kunjungan atau naik 19,32 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2016.
- TPK Hotel Berbintang pada bulan Mei 2017 mencapai 56,07 persen atau naik 0,61 poin dibanding TPK Mei 2016, dan juga mengalami kenaikan 0,93 poin dibandingkan TPK April 2017.

12. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Mei 2017 naik 2,47 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Mei 2017 turun 3,83 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Mei 2017 naik 5,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Mei 2017 naik 7,12 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

13. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Mei 2017

- Rupiah terdepresiasi 0,26 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terapresiasi 0,86 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terapresiasi 0,08 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terdepresiasi 2,71 persen terhadap euro.

14. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, menunjukkan 1 dari 3 atau 33,4 persen perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 atau 9,4 persen perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

15. Ketenagakerjaan

Pada Februari 2017, jumlah penganggur sebanyak 7,01 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,33 persen.

16. a. Kemiskinan September 2016

Jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen), menurun 0,25 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen).

b. Ketimpangan Pengeluaran September 2016

Pada September 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,394. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,397 dan *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,402.

17. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18, memasuki IPM kategori “Tinggi”. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2015 yang sebesar 69,55.

18. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2017 sebesar 3,71 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 3,59.
- Indeks Persepsi meningkat dari tahun 2015 ke 2017, dari 3,73 menjadi 3,81 Sementara indeks pengalaman juga meningkat dari 3,39 pada tahun 2015 menjadi 3,60 pada tahun 2017.
- IPAK 2017 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (3,86) lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan (3,53).

- Pendidikan kemungkinan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK, atau semakin tinggi pendidikan semakin anti korupsi. IPAK 2017 untuk masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,58, SLTA sebesar 3,99, dan di atas SLTA sebesar 4,09.
- IPAK masyarakat dengan usia 40 sampai 59 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun atau lebih dari 60 tahun. IPAK masyarakat usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,74, IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,71, sedangkan IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,62.

19. Sensus Ekonomi 2016

- Hasil pendaftaran (*Listing*) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan, meningkat 17,51 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 22,73 juta usaha/perusahaan.
- Bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta usaha/perusahaan (98,33 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0,45 juta usaha/perusahaan (1,67 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB).
- Jumlah tenaga kerja hasil SE2016 tercatat sebanyak 70,32 juta, yang didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,37 juta tenaga kerja atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Juli 2017 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. Juni 2017), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan I-2017), ekspor-impor (s.d. Mei 2017), upah buruh (s.d. Mei 2017), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. Juni 2017), harga produsen (s.d. triwulan I-2017) dan harga perdagangan besar (s.d. Juni 2017), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan I-2017), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan I-2017), pariwisata (s.d. Mei 2017), transportasi (s.d. Mei 2017), nilai tukar eceran rupiah Mei 2017, prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (hasil SPHPN 2016), ketenagakerjaan (s.d. Februari 2017), data kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia September 2016, indeks pembangunan manusia 2016, indeks perilaku anti korupsi Indonesia (IPAK) 2017, serta Sensus Ekonomi 2016.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui *website* BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 5 Juli 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

HEADLINES	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xvii
GLOSARIUM	1
FOKUS PERHATIAN	15
I. INFLASI JUNI 2017	24
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I-2017	29
III. EKSPOR MEI 2017.....	43
IV. IMPOR MEI 2017.....	48
V. UPAH BURUH MEI 2017.....	55
VI. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN JUNI 2017.....	57
VII. HARGA PANGAN JUNI 2017.....	64
VIII. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN I-2017 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR MEI 2017	72
IX. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULAN I-2017	83
X. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN I- 2017	91
XI. PARIWISATA MEI 2017	96
XII. TRANSPORTASI NASIONAL MEI 2017	100
XIII. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH MEI 2017.....	103
XIV. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA	108
XV. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2017.....	114
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN SEPTEMBER 2016 ..	120
XVII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016.....	130
XVIII. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2017	134
XIX. SENSUS EKONOMI 2016	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota Juni 2017 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).....	26
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi Juni 2017 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100)	26
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen).....	27
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)	27
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, April 2017–Mei 2017 (persen)	28
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen).....	30
Tabel 2.2	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)	31
Tabel 2.3	Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2016, Triwulan IV-2016 dan Triwulan I-2017 (persen).....	33
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen).....	34
Tabel 2.5	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (triliun rupiah)	35
Tabel 2.6	Struktur PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2016, Triwulan IV-2016 dan Triwulan I-2017 (persen).....	35
Tabel 2.7	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen).....	36
Tabel 2.8	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan I-2017 (persen)	37
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (persen)	39
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (triliun rupiah) Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2010	40
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (persen).....	41
Tabel 2.12	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (triliun rupiah).....	41
Tabel 2.13	PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2011–2016	42

Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$).....	44
Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan 2016–2017	45
Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)	45
Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ).....	46
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2015–2017 (FOB:juta US\$).....	46
Tabel 3.6	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang dan Pelabuhan Muat, Januari–Mei 2017	47
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya Januari–Mei 2016 dan 2017	50
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia Mei 2016–Mei 2017	50
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya Januari–Mei 2016 dan 2017.....	51
Tabel 4.4	Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang Januari–Mei 2017.....	51
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang Januari–Mei 2016 dan 2017	52
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2016–Mei 2017 (Nilai CIF: Juta US\$).....	52
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Mei 2017 (juta US\$)	53
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Mei 2016–Mei 2017 (miliar US\$).....	53
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Mei 2017	54
Tabel 5.1	Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah) Mei 2015–Mei 2017	56
Tabel 6.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100).....	59
Tabel 6.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran Juni 2015–Juni 2017.....	62

Tabel 6.3	Tingkat Inflasi Perdesaan Juni 2017, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2017 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	63
Tabel 6.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, (2012=100)	63
Tabel 7.1	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, Juni 2016–Juni 2017.....	65
Tabel 7.2	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, Juni 2016–Juni 2017.....	67
Tabel 7.3	Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>), Juni 2016–Juni 2017	68
Tabel 7.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok Juni 2016–Juni 2017 (rupiah).....	70
Tabel 8.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor Triwulan I-2017	73
Tabel 8.2	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor Triwulan I-2017	77
Tabel 8.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia April–Juni 2017, (2010=100).....	79
Tabel 8.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar Juni 2017 (2010=100)	79
Tabel 8.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia Juni 2017 Menurut Jenis Bangunan (2010=100).....	81
Tabel 9.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2017 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha	84
Tabel 9.2	Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2017 Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk.....	85
Tabel 9.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2016 dan Triwulan I-2017 Menurut Variabel Pembentuk	87
Tabel 9.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2017 Menurut Variabel Pembentuk.....	89
Tabel 9.5	Indeks Tendensi Konsumen ¹⁾ Triwulan I-2016–Triwulan II-2017 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	90
Tabel 10.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2015–2017 (persen) (2010=100)	92

Tabel 10.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2015–2017 (persen) (2010=100)	92
Tabel 10.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan I-2017 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	93
Tabel 10.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan I-2015–Triwulan I-2017 (persen)	95
Tabel 10.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan I-2017 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	95
Tabel 11.1	Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia	96
Tabel 11.2	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Januari 2016–Mei 2017	99
Tabel 12.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi Mei 2016–Mei 2017	102
Tabel 15.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2015–2017 (juta orang)	114
Tabel 15.2	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2015–2017 (juta orang).....	116
Tabel 15.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2015–2017 (juta orang).....	117
Tabel 15.4	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015–2017 (juta orang).....	117
Tabel 15.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015–2017 (persen)	118
Tabel 15.6	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi 2016–2017	119
Tabel 16.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2016 –September 2016	121
Tabel 16.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) Menurut Daerah, September 2016.....	122

Tabel 16.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2016–September 2016	124
Tabel 16.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2016	125
Tabel 16.5	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2015–September 2016.....	129
Tabel 17.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2015–2016...	133
Tabel 18.1	Nilai IPAK Tahun 2012–2017	134
Tabel 18.2	Indeks Menurut Dimensi, 2012–2017.....	135
Tabel 18.3	IPAK Menurut Wilayah, 2012–2017.....	136
Tabel 18.4	IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012–2017.....	136
Tabel 18.5	IPAK Menurut Umur, 2012–2017.....	137
Tabel 18.6	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Keluarga merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017	138
Tabel 18.7	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Komunitas merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017	139
Tabel 18.8	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Tingkat Publik merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017	140
Tabel 18.9	Cara Mengetahui harus Membayar Melebihi Ketentuan, 2012–2017	142
Tabel 18.10	Alasan Masyarakat Membayar Melebihi Ketentuan, 2012–2017.....	143
Tabel 19.1	Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2016	146
Tabel 19.2	Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha dan Pulau 2016.....	147
Tabel 19.3	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha 2016.....	147
Tabel 19.4	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Pulau 2016.....	148

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2015–2017	24
Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2016–2017	28
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2016 s.d Triwulan I-2017 (persen)	29
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2017 (persen)	30
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2017 (persen)	34
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan IV-2016 (persen)	36
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2014–2016 (persen)	38
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB) Mei 2015–Mei 2017	43
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF) Mei 2016–Mei 2017	48
Grafik 4.2	Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF) Januari–Mei 2016 dan 2017	49
Grafik 5.1	Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Mei 2015–Mei 2017	55
Grafik 6.1	Nilai Tukar Petani (NTP), Juni 2016–Juni 2017 (2012=100)	57
Grafik 6.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Juni 2016–Juni 2017 (2012=100)	58
Grafik 6.3	Inflasi Perdesaan, Juni 2015–Juni 2017	61
Grafik 7.1	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas Juni 2016–Juni 2017	64
Grafik 7.2	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas Juni 2016–Juni 2017	66
Grafik 7.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok Juni 2016–Juni 2017 (rupiah)	71
Grafik 8.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor Triwulan I-2014 s.d. Triwulan I-2017	73

Grafik 8.2	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia Juni 2014–Juni 2017.....	80
Grafik 8.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Juni 2016–Juni 2017.....	82
Grafik 9.1	Indeks Tendensi Bisnis ¹⁾ Triwulan IV-2011–Triwulan IV-2016 dan Perkiraan Triwulan I-2017 ²⁾	86
Grafik 9.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2017 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	88
Grafik 9.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2017 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	89
Grafik 10.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>y-on-y</i>) Triwulan II-2015–Triwulan I-2017	91
Grafik 10.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (<i>y-on-y</i>) Triwulan I-2015–Triwulan I-2017	94
Grafik 11.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman menurut Pintu Masuk Januari 2015–Mei 2017.....	97
Grafik 11.2	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia, Januari 2015–Mei 2017.....	98
Grafik 12.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Mei 2016–Mei 2017.....	100
Grafik 13.1	Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Mei 2017 dibanding April 2017 M.IV).....	107
Grafik 13.2	Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir).....	107
Grafik 14.1	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Usia 15–64 tahun oleh Pasangan dan Selain Pasangan.....	108
Grafik 14.2	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Daerah Tempat Tinggal	109
Grafik 14.3	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Pasangan	109
Grafik 14.4	Prevalensi Kekerasan Fisik oleh Pasangan Menurut Jenis Tindakan	109
Grafik 14.5	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Selain Pasangan	110
Grafik 14.6	Prevalensi Kekerasan Seksual oleh Selain Pasangan Menurut Jenis Tindakan.....	110
Grafik 14.7	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Pendidikan.....	111

Grafik 14.8	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Status Pekerjaan.....	112
Grafik 14.9	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Pernah/Sedang Menikah yang Dilakukan oleh Pasangan	113
Grafik 14.10	Prevalensi Pembatasan Aktivitas oleh Pasangan	113
Grafik 15.1	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2015–2017 (juta orang).....	115
Grafik 16.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2016–September 2016.....	120
Grafik 16.2	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> , 2010–September 2016	126
Grafik 16.3	Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah September 2015–September 2016	127
Grafik 17.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010–2016.....	130
Grafik 17.2	Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2011–2016.....	131
Grafik 17.3	Indeks Komponen IPM Indonesia, 2015–2016.....	132
Grafik 19.1	Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016.....	144
Grafik 19.2	Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha 2016.....	148

GLOSARIUM

1. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*. Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Inflasi umum (*headline inflation*)

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

a. Inflasi inti (*core inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya.

2. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun

PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi

PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDB adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap kategori/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB. Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama.

Pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*) adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi (*q-to-q*) adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi (*c-to-c*) adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Sumber pertumbuhan (*source of growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Sumber pertumbuhan diperoleh dengan cara mengalikan laju pertumbuhan ekonomi sektor atau komponen pengeluaran dengan *share* perubahan sektor atau komponen pengeluaran terhadap perubahan PDB.

PDB Perkapita adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

3. Ekspor-Import

Total nilai ekspor adalah jumlah nilai *Free on Board* (FOB) seluruh barang-barang ekspor yang keluar dari daerah pabean Indonesia.

Free on Board (FOB) adalah nilai barang sampai di pelabuhan muat setelah barang dimuat ke kapal.

Total nilai impor adalah jumlah nilai *Cost Insurance Freight* (CIF) seluruh barang-barang ekspor yang masuk ke daerah pabean Indonesia.

Cost Insurance Freight (CIF) adalah nilai barang ketika sampai di pelabuhan bongkar (Indonesia), termasuk harga barang, ongkos angkut (*freight*) dan asuransi (*insurance*). $CIF = FOB + Insurance + Freight$.

4. Upah Buruh

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa, Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani, Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan, Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 33 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 82 kota.

5. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani, Indeks harga yang diterima petani (I_t) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani, Indeks harga yang dibayar petani (I_b) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan I_t dan I_b adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*), Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan

dan Survei Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan, Responden Survei Harga Perdesaan adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari BPPBM, Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

6. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

Harga Produsen Gabah di Tingkat Petani adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

Harga Produsen Gabah di Tingkat Penggilingan adalah harga produsen gabah di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga gabah dalam negeri minimal yang harus dibayarkan pemerintah melalui Bulog kepada petani dan penggilingan sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Inpres. Tujuan kebijakan penerapan HPP, selain untuk pengamanan cadangan pemerintah, adalah sebagai insentif yang diberikan pemerintah kepada petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

Gabah Kering Giling (GKG) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

Gabah Kualitas Rendah adalah gabah yang mengandung kadar air minimum 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

Kadar Air (KA) adalah jumlah kandungan air dalam butir gabah yang dinyatakan dalam persentase dari berat basah.

Kadar Hampa (KH) adalah jumlah kandungan selain air, yang umumnya terdiri atas butiran hampa dan kotoran, seperti butir gabah yang tidak berkembang, pasir, kerikil, biji dan lainnya. Kadar Hampa dinyatakan dalam persentase dari berat sampel gabah.

Survei Monitoring Harga Produsen Gabah dilaksanakan di 27 propinsi di Indonesia. Responden adalah petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (biasanya pada bulan Maret s.d. Mei dan Agustus) pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

Beras Kualitas Premium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

Beras Kualitas Medium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

Beras Kualitas Rendah adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

Butir Beras Patah/Pecah (*Broken*) adalah butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0,25 bagian sampai dengan lebih kecil 0,75 bagian dari butir beras utuh.

Pengumpulan data harga produsen beras di penggilingan dilakukan secara bulanan di 28 provinsi di Indonesia. Responden adalah penggilingan besar di wilayahnya.

7. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya. Sesuai dengan *Manual Producer Price Index* (PPI), harga yang dikumpulkan adalah *basic price* (harga dasar), yaitu harga yang diterima produsen tidak termasuk pajak. IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100.

Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan di 34 Provinsi. Responden yang dipilih adalah produsen dengan penerimaan perusahaan yang cukup besar, sedangkan

komoditas yang dipilih adalah komoditas yang memberikan *share* besar terhadap PDB nasional. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor.

IHPB Konstruksi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No. 8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005. Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi.

8. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) dihitung berdasarkan data dari Survei Tendensi Bisnis (STB). Tujuan dari ITB adalah untuk menghasilkan suatu indikator dini yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang dari sisi pelaku usaha.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi konsumen terkini yang dihasilkan melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). ITK menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang.

9. Industri

Industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro. Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai

tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang.

10. Pariwisata

Data pariwisata mancanegara (wisman) diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia. Wisman yang masuk dirinci menurut WNI (berdasarkan jenis paspor) dan WNA (berdasarkan jenis visa), termasuk di dalamnya *Crew WNA*, baik laut maupun udara. Untuk data karakteristik wisman yang lebih detil diperoleh dari hasil pengolahan kartu kedatangan dan keberangkatan (*arrival/departure card*). Namun pada tahun 2015 penghitungan Jumlah kunjungan wisman dilengkapi dengan data lalu lintas WNA yang terdiri dari:

- a. Wisman reguler
- b. Kunjungan minimal WNA melalui pos lintas batas (PLB) darat
- c. Kunjungan WNA lainnya dan WNA berada di Indonesia kurang dari satu tahun
 - Tidak bekerja (wisata lanjut usia mancanegara, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dakwah/rohaniawan, berobat, mengadakan penelitian, dan lain-lain)
 - Bekerja paruh waktu (bidang konstruksi, konsultan, instruktur, dan lain-lain)

Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel diperoleh dari hasil Survei Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel bintang serta sebagian (sampel) hotel non bintang (hotel melati) di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) maupun jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya.

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *crui se passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Data administrasi wisatawan mancanegara (wisman) Indonesia masih *underestimate*, karena terkendala kondisi geografis dan prasarana yang belum memadai untuk memantau seluruh pergerakan manusia di perbatasan darat dan laut Indonesia. Teknologi informasi, khususnya komunikasi seluler, mempunyai peluang besar untuk mengatasi hambatan tersebut. Seluruh pergerakan manusia yang mempunyai telepon seluler di perbatasan dapat diidentifikasi aktivitasnya dan asal negaranya. Sebuah nomor seluler asing yang masuk (*roaming*), bergerak di wilayah Indonesia dan di hari-hari berikutnya keluar dari wilayah Indonesia menunjukkan kunjungan wisman. Jumlah seluruh wisman yang melintas dikurangi pelintas batas yang tercatat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan aktivitas wisman yang *underestimate*. Mulai Oktober 2016, permasalahan ini dapat diatasi melalui pemanfaatan *roaming* komunikasi seluler tersebut. Cara ini belum mencakup orang asing: (1) *roaming* non telkomsel (2) yang masuk Indonesia tanpa menggunakan telepon seluler dan tidak tercatat di TPI

TPK Hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.

Rata-rata lamanya tamu menginap adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya.

11. Transportasi Nasional

Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s.d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut. Data yang disajikan mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri. Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

12. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, *swap*, *derivative*, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui *money changer* (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat retail *spot rate* suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi *real-time* yang beredar di internet, dan sebagainya.

Mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

Nilai Tukar (Kurs) adalah harga mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain.

Nilai Tukar Eceran Rupiah adalah nilai mata uang rupiah yang diukur dalam mata uang negara lain yang ditransaksikan melalui *money changer*.

Kurs Tengah adalah kurs rata-rata antara kurs beli dan kurs jual.

Money Changer adalah tempat pertukaran atau tempat jual beli mata uang asing.

Spot rate adalah harga yang diberikan untuk suatu mata uang yang akan dibayar dan diserahkan segera, dalam 1-2 hari kerja.

Swap adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.

13. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

- a. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah perbandingan perempuan usia 15–64 tahun yang mengalami kekerasan baik itu kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun ekonomi yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan terhadap total perempuan usia 15–64 tahun.
- b. Sumber data yang digunakan dalam menghitung prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah hasil dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016. SPHPN merupakan survei khusus pertama di Indonesia yang ditujukan khusus untuk mendapatkan data kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia.
- c. Kuesioner SPHPN mengadopsi Kuesioner WHO “*Women’s health and life experiences*”, yang didisain khusus untuk mengali informasi kekerasan terhadap perempuan.

- d. Jenis kekerasan yang dicakup pada SPHPN 2016 dibedakan menurut pelaku kekerasan yaitu pasangan dan selain pasangan. Kekerasan yang dilakukan pasangan meliputi: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Sedangkan kekerasan yang dilakukan selain pasangan meliputi: kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pasangan yang dimaksud adalah suami, pasangan hidup bersama, dan pasangan seksual yang tinggal terpisah. Sedangkan yang dimaksud selain pasangan adalah orang tua/mertua, kakek, paman, sepupu, teman, tetangga, guru/pendidik, orang tak dikenal, dan lain-lain.
- e. Responden adalah perempuan usia 15–64 tahun yang dipilih satu orang dari setiap rumah tangga sampel dengan menggunakan Tabel Kish. Responden terpilih diwawancarai secara *private*/tidak boleh didampingi siapapun agar responden dapat terbuka dan nyaman memberikan informasi yang sifatnya sensitif.
- f. Petugas/pewawancara SPHPN adalah perempuan yang dilatih secara khusus mengenai materi dan metode wawancara, etika, dan *safety* wawancara, dan juga diberikan wawasan terkait gender dan kekerasan.

14. Ketenagakerjaan

Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel, dengan pendekatan rumah tangga. Estimasi ketenagakerjaan mulai Februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035.

Definisi yang digunakan antara lain:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, Kegiatan tersebut

termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

Setengah Penganggur (*Underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Pekerja Paruh Waktu (*Part time worker*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Pengangguran Terbuka (*Unemployment*), adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, yang terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

15. Kemiskinan

- a. **Penduduk miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- b. **Garis Kemiskinan (GK)** adalah total nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. GK terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM).
- c. **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- d. **Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM)** adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

- e. **Persentase Penduduk miskin (*Head Count Index- P₀*)** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
- f. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*)** yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- g. **Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*)** yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

16. Ketimpangan Pengeluaran

- a. **Gini Ratio** adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Gini Ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
- b. **Ukuran Bank Dunia** adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada besarnya jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) pada kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut :
 - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
 - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
 - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

17. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir, pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan (*purchasing power parity*)

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100 dan paritas daya beli.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

$$\diamond I_{\text{kehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

$$\bullet I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$\bullet I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$\diamond I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\diamond I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

18. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- a. **Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)** adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh BPS. SPAK merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan di seluruh provinsi yang terdiri dari 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga.
- b. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
- c. IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama, yakni **persepsi atau penilaian** masyarakat terhadap kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai yang dipahami maupun sikap diri terhadap korupsi dan **pengalaman langsung** pada jenis layanan publik tertentu yang biasa diakses, menyangkut perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*).
- d. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2017 menggunakan *explanatory factor analysis*.
- e. Responden adalah kepala rumah tangga atau pasangannya yang dipilih dengan acak (Tabel *Kish*) dan diwawancarai secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*).

FOKUS PERHATIAN

1. Pada Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 0,69 persen

Pada Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 0,69 persen. Dari 82 kota, 79 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 4,48 persen dengan IHK 150,91 dan terendah terjadi di Merauke sebesar 0,12 persen dengan IHK 135,57. Inflasi Juni 2017 sebesar 0,69 persen lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2016 yang mengalami inflasi sebesar 0,66 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2017 terhadap Juni 2016) sebesar 4,37 persen.

2. Triwulan I-2017 perekonomian Indonesia tumbuh 5,01 persen

Ekonomi Indonesia triwulan I-2017 dibanding triwulan I-2016 (*y-on-y*) tumbuh 5,01 persen meningkat dibanding capaian triwulan I-2016 sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,49 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,10 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,04 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,02 persen.

Sementara bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2017 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,34 persen. Dari sisi produksi, kontraksi disebabkan oleh penurunan pada beberapa lapangan usaha antara lain Lapangan Usaha Jasa Pendidikan dan Konstruksi. Ditinjau dari sisi pengeluaran, secara *q-to-q* ekonomi Indonesia triwulan I-2017 didorong oleh pertumbuhan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,41 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,14 persen. Sementara itu, komponen-komponen lainnya menunjukkan penurunan.

3. Nilai ekspor Indonesia Mei 2017 mencapai US\$14,29 miliar, naik 24,08 persen (year-on-year)

Nilai ekspor Indonesia Mei 2017 mencapai US\$14,29 miliar, naik 24,08 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), demikian juga jika dibanding ekspor April 2017 naik 7,62 persen. Nilai ekspor nonmigas Mei 2017 mencapai US\$13,02 miliar atau naik 23,34 persen dibanding ekspor nonmigas Mei 2016. Demikian pula, ekspor migas pada Mei 2017 naik 32,31 persen dibanding Mei tahun sebelumnya. Ditinjau menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Mei 2017 naik sebesar 16,22 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2016, demikian juga ekspor nonmigas hasil pertanian naik 28,54 persen dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya naik 45,46 persen.

4. Nilai impor Indonesia Mei 2017 sebesar US\$13,82 miliar, naik sebesar 24,03 (year-on-year)

Nilai impor Indonesia Mei 2017 sebesar US\$13,82 miliar, atau naik 15,67 persen dibanding impor April 2017, dan naik 24,03 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Mei 2017 sebesar US\$12,00 miliar atau naik 16,49 persen dibanding April 2017. Sementara impor migas Mei 2017 tercatat sebesar US\$1,82 miliar, naik 10,54 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Mei 2017 adalah golongan mesin dan peralatan mekanik sebesar US\$274,6 juta, atau naik 17,64 persen dibanding April 2017 (US\$1.557,1 juta). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari–Mei 2017 ditempati oleh Tiongkok (US\$13,67 miliar) dengan pangsa 26,12 persen.

5. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Mei 2017 masing-masing sebesar Rp49.782,00 dan Rp83.958,00

Rata-rata upah nominal buruh tani pada Mei 2017 sebesar Rp49.782,00, naik 0,29 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan upah riil turun sebesar 0,45 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Mei 2017 tercatat Rp83.958,00, naik 0,26 persen

dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan upah riil turun sebesar 0,13 persen.

6. Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2017 tercatat 100,53, naik 0,38 persen dibanding Mei 2017, inflasi perdesaan sebesar 0,22 persen, dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) naik sebesar 0,41 persen dibanding Mei 2017.

NTP Juni 2017 tercatat 100,53 atau naik sebesar 0,38 persen dibanding NTP Mei 2017 sebesar 100,15. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di empat subsektor penyusun NTP yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan masing-masing sebesar 0,69 persen, 0,08 persen, 0,52 persen dan 0,72 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Hortikultura turun sebesar 0,01 persen.

Pada Juni 2017 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,22 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 133,47. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 27 provinsi, dan deflasi perdesaan di 6 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 2,30 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,02 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,54 persen, sedangkan deflasi perdesaan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,06 persen.

Pada Juni 2017 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,41 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It lebih tinggi dari kenaikan indeks BPPBM masing masing sebesar 0,60 persen dan 0,19 persen. Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya NTUP di lima subsektor penyusun NTUP yaitu NTUP Tanaman Pangan (0,67 persen), Tanaman Hortikultura (0,08 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,10 persen), Peternakan (0,55 persen), dan Perikanan (0,93 persen).

7. Rata-rata harga beras pada Juni 2017 sebesar Rp13.125,00 per kg, naik 0,22 persen

Rata-rata harga beras pada Juni 2017 sebesar Rp13.125,00 per kg, naik 0,22 persen dari bulan sebelumnya. Dibandingkan Juni 2016, harga beras naik 0,08 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang

sama sebesar 4,37 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah daging ayam ras naik 2,53 persen; ikan kembung naik 1,58 persen; daging sapi naik 1,01 persen; sedangkan harga cabai rawit turun 14,71 persen; cabai merah turun 9,27 persen.

8. a. Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada triwulan I-2017 naik 1,13 persen terhadap triwulan IV-2016 (q-to-q). Demikian pula terhadap triwulan I-2016 (y-on-y) naik 4,05 persen

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen pada triwulan I-2017 (q-to-q). Kenaikan terjadi pada IHP Sektor Pertanian (1,33 persen), Sektor Pertambangan dan Penggalian (1,48 persen) dan IHP Sektor Industri Pengolahan (1,03 persen).

Dibandingkan terhadap triwulan I-2016 (y-on-y), IHP naik 4,05 persen. IHP Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,46 persen, 24,02 persen, dan 2,48 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas Juni 2017 turun sebesar 0,07 persen dari bulan sebelumnya

IHPB Umum Nonmigas Juni 2017 turun sebesar 0,07 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada Kelompok Barang Ekspor yaitu sebesar 0,75 persen. Sektor Pertanian naik sebesar 0,03 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian naik sebesar 0,06 persen, Sektor Industri naik sebesar 0,08 persen, serta Kelompok Barang Impor Nonmigas naik sebesar 0,03 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Mei 2017 turun 0,28 persen. Penurunan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 1,44 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi Juni 2017 naik sebesar 0,15 persen. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi sebesar 0,37 persen.

9. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2017 sebesar 103,42 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2017 sebesar 102,27

Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan I-2017 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan I-2017 sebesar 103,42. Namun, optimisme pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan ini lebih rendah dibandingkan pada triwulan IV-2016 (nilai ITB sebesar 106,70). Kondisi bisnis pada triwulan I-2017 yang meningkat disebabkan oleh capaian dari tiga komponen pembentuknya, yaitu penggunaan kapasitas produksi/usaha dengan capaian nilai indeks sebesar 104,60, pendapatan usaha dengan capaian nilai indeks sebesar 104,54, dan rata-rata jumlah jam kerja dengan capaian nilai indeks sebesar 101,13.

Nilai ITB triwulan II-2017 diperkirakan sebesar 104,22. Dengan demikian, secara umum kondisi bisnis pada triwulan II-2017 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan I-2017. Angka indeks yang di atas seratus, sebagai indikasi tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis, pada triwulan II-2017 juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2017. Pada triwulan II-2017 kondisi bisnis di 15 kategori lapangan usaha diperkirakan mengalami peningkatan, namun dua kategori mengalami penurunan.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada triwulan I-2017 sebesar 102,27 menunjukkan kondisi ekonomi konsumen meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan I-2017 relatif sama dibandingkan triwulan IV-2016. Kondisi ini tercermin dari nilai ITK triwulan I-2017 yang hampir sama dengan triwulan IV-2016 sebesar 102,46. Membaiknya kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2017 terutama disebabkan oleh meningkatnya volume konsumsi dengan nilai indeks sebesar 107,75. Sementara itu, inflasi yang terjadi tidak terlalu berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga dengan nilai indeks sebesar 101,60. Begitu pula pendapatan rumah tangga tidak menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya, dengan nilai indeks sebesar 100,33.

Nilai ITK nasional pada triwulan II-2017 diperkirakan sebesar 112,73. Dengan demikian, kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat. Tingkat

optimisme konsumen diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2017 (nilai ITK sebesar 102,27). Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan II-2017 didorong oleh perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga dengan nilai indeks sebesar 119,40 dan rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi, dan pesta/hajatan dengan nilai indeks sebesar 101,03

10. Pertumbuhan produksi IBS naik 4,33 persen dan IMK naik 6,63 persen pada triwulan I-2017 (*year-on-year*)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan I-2017 naik 4,33 persen dibanding triwulan I-2016 (*year-on-year*) dan mengalami kenaikan 0,86 persen dari triwulan IV-2016 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada Januari 2017 naik 3,60 persen dari Januari 2016, Februari 2017 naik 3,83 persen dari Februari 2016, dan Maret 2017 naik 5,54 persen dari Maret 2016. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan I-2017 naik 6,63 persen dibanding triwulan I-2016 (*y-on-y*) dan mengalami kenaikan 2,44 persen dari triwulan IV-2016 (*q-to-q*).

11. Jumlah kunjungan wisman Mei 2017 mencapai 1,09 juta kunjungan

Kunjungan wisman ke Indonesia selama Mei 2017 sebanyak 1,09 juta kunjungan, yang terdiri atas 963,31 ribu kunjungan wisman melalui 19 pintu utama dan 128,18 ribu kunjungan wisman selain dari 19 pintu utama. Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia pada Mei 2017 mencapai 56,07 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 0,61 poin dibandingkan TPK Mei 2016.

12. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Mei 2017 mencapai 7,2 juta orang, naik 5,18 persen (*year-on-year*)

Pada Mei 2017, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 7,2 juta orang atau naik 5,18 persen (*year-on-year*), angkutan udara internasional naik 10,06 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 12,23 persen, dan penumpang kereta api naik 9,91 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angkutan udara domestik naik 2,47 persen, angkutan udara

internasional turun 3,83 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 5,16 persen, dan penumpang kereta api naik 7,12 persen.

13. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Mei 2017

a. Rupiah terdepresiasi 0,26 persen terhadap dolar Amerika.

Rupiah terdepresiasi 0,26 persen terhadap dolar Amerika pada Mei 2017. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika terjadi pada minggu kedua Mei 2017 yang mencapai Rp13.319,55 per dolar Amerika.

b. Rupiah terapresiasi 0,86 persen terhadap dolar Australia.

Rupiah terapresiasi 0,86 persen terhadap dolar Australia pada Mei 2017. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia terjadi pada minggu kedua Mei 2017 yang mencapai Rp9.820,18 per dolar Australia.

c. Rupiah terapresiasi 0,08 persen terhadap yen Jepang.

Rupiah terapresiasi 0,08 persen terhadap yen Jepang pada Mei 2017. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap yen Jepang terjadi pada minggu kedua Mei 2017 yang mencapai Rp116,91 per yen Jepang.

d. Rupiah terdepresiasi 2,71 persen terhadap euro.

Rupiah terdepresiasi 2,71 persen terhadap euro pada Mei 2017. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap euro terjadi pada minggu keempat Mei 2017 yang mencapai Rp14.854,91 per euro.

14. Satu dari tiga atau 33,4 Persen Perempuan Usia 15–64 Tahun di Indonesia Mengalami Kekerasan Fisik dan atau Seksual yang Dilakukan oleh Pasangan dan Selain Pasangan Selama Hidup Mereka

Prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual cenderung lebih tinggi pada perempuan usia 15–64 tahun yang tinggal di daerah perkotaan (36,3 persen), daripada perempuan di daerah perdesaan (29,8 persen). Sementara, kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami perempuan usia 15–64 tahun

dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas (39,4 persen) dan status pekerjaan tidak bekerja (35,1 persen)

15. Pada Februari 2017, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 3,89 juta orang dibandingkan Februari 2016

Ketenagakerjaan Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah persoalan diantaranya sekitar 30,98 persen tenaga kerja tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, penyediaan lapangan kerja bagi 7,01 juta orang penganggur dan 9,49 juta orang setengah penganggur, serta masih sekitar 58,35 persen bekerja pada kegiatan informal.

16. a. Jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen)

Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen) menurun 0,25 juta orang (0,16 persen). Namun, berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016). Sementara itu, di daerah perdesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016).

b. Pada September 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,394

Gini Ratio September 2016 turun 0,003 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,397 dan turun 0,008 poin dibanding September 2016 yang sebesar 0,402. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 0,409, turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,410 dan turun dibanding *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,419. Sedangkan *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 0,316 turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,327 dan turun dibanding September 2015 yang sebesar 0,329.

17. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 mencapai kategori “Tinggi”

Pada tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2015. Pada tahun 2016, status pembangunan manusia di Indonesia telah beranjak dari “sedang” menjadi berstatus “tinggi”. Jika dilihat menurut provinsi, 12 provinsi telah mencapai status pembangunan manusia “tinggi” atau berada pada selang 70 hingga 80, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat diantaranya dialami oleh Provinsi Papua (1,40%), Provinsi Sumatera Selatan (1,16%), dan Provinsi Jawa Timur (1,15%).

18. Hasil pendaftaran (*Listing*) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan, meningkat 17,51 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 22,73 juta usaha/perusahaan

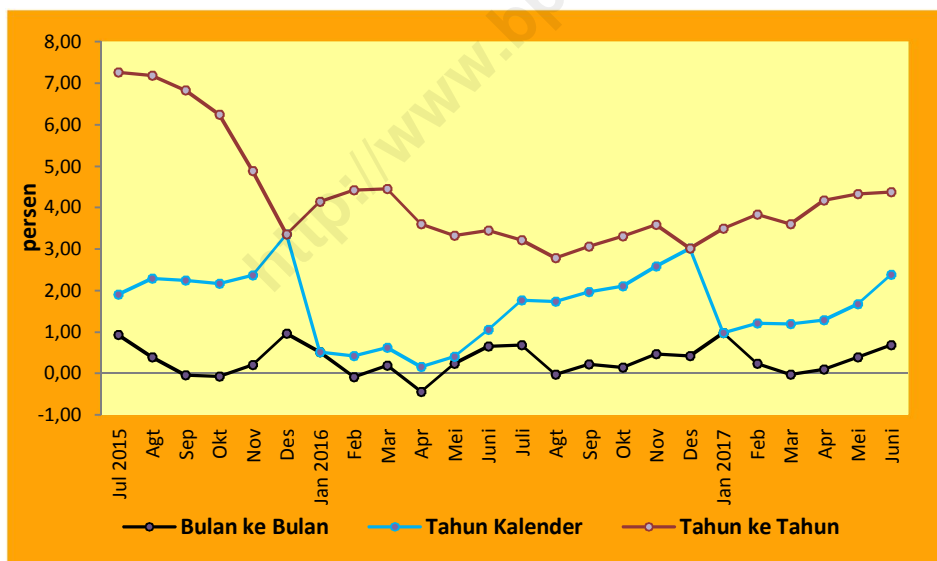
Hasil pendaftaran (*listing*) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan nonpertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, meningkat 17,51 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 22,73 juta usaha/perusahaan. Bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta usaha/perusahaan (98,33 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0,45 juta usaha/perusahaan (1,67 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB). Dilihat menurut lapangan usaha, jumlah usaha/perusahaan perdagangan besar dan eceran mendominasi sebesar 46,17 persen dari total usaha. Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha sejalan dengan jumlah usaha/perusahaan, yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,37 juta tenaga kerja atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sebaran jumlah usaha/perusahaan antarkawasan dan antarpulau secara umum menunjukkan bahwa sebanyak 16,2 juta usaha/perusahaan berada di Pulau Jawa atau 60,74 persen terhadap jumlah usaha/perusahaan di Indonesia.

I. INFLASI JUNI 2017

1. Pada Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 0,69 persen. Dari 82 kota, 79 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 4,48 persen dengan IHK 150,91 dan terendah terjadi di Merauke sebesar 0,12 persen dengan IHK 135,57. Inflasi Juni 2017 sebesar 0,69 persen lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2016 yang mengalami inflasi sebesar 0,66 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2017 terhadap Juni 2016) sebesar 4,37 persen.

Pada Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 0,69 persen

Grafik 1.1
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
Gabungan 82 Kota, 2015–2017



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, inflasi umum (*headline inflation*) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok: bahan makanan 0,69 persen; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,39 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,75 persen; sandang 0,78 persen; kesehatan 0,34 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,07 persen; transpor, komunikasi dan jasa keuangan 1,27 persen.

3. Dari inflasi 0,69 persen, andil tarif listrik 0,17 persen; tarif angkutan udara 0,12 persen; tarif angkutan antar kota 0,08 persen; ikan segar 0,05 persen; bawang merah dan daging ayam ras masing-masing 0,03 persen; pepaya dan emas perhiasan masing-masing 0,02 persen; beras, ayam hidup, daging ayam kampung, daging sapi, ikan diawetkan, bayam, kacang panjang, kangkung, kentang, ketimun, tomat sayur, wortel, kelapa, kue kering berminyak, mie, nasi dengan lauk, kopi manis, rokok kretek, rokok kretek filter, tarif air minum PAM, baju muslim wanita, dan tarif kereta api masing-masing 0,01 persen.
4. Inflasi Juni 2017 sebesar 0,69 persen, angka tersebut lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2016 yang mengalami inflasi 0,66 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2017 terhadap Juni 2016) sebesar 4,37 persen.
5. Menurut karakteristik perubahan harga, inflasi Juni 2017 sebesar 0,69 persen dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,26 persen; kenaikan indeks pada komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 2,10 persen; dan kenaikan indeks pada komponen bergejolak (*volatile*) 0,65 persen.
6. Inflasi Juni 2017 sebesar 0,69 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,15 persen, sumbangan inflasi komponen barang/jasa yang harganya diatur pemerintah 0,42 persen dan komponen bergejolak 0,12 persen.
7. Inflasi komponen inti Juni 2017 sebesar 0,26 persen, inflasi tahun kalender 2017 sebesar 1,59 persen, dan inflasi tahun ke tahun (Juni 2017 terhadap Juni 2016) sebesar 3,13 persen.
8. Pada Mei 2017, Indonesia menjadi negara yang mengalami Inflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 0,39 persen.

Tabel 1.1
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota Juni 2017
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2016	IHK Desember 2016	IHK Juni 2017	Inflasi Juni 2017 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2017 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	124,29	126,71	129,72	0,69	2,38	4,37	0,69
1. Bahan Makanan	137,38	140,58	140,72	0,69	0,10	2,43	0,14
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	130,32	133,27	136,02	0,39	2,06	4,37	0,07
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	119,46	121,68	126,84	0,75	4,24	6,18	0,18
4. Sandang	113,28	113,50	116,40	0,78	2,56	2,75	0,05
5. Kesehatan	119,07	121,48	123,65	0,34	1,79	3,85	0,02
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	115,12	117,88	118,38	0,07	0,42	2,83	0,00
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	122,53	124,42	129,64	1,27	4,20	5,80	0,23

¹⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2017 terhadap IHK bulan sebelumnya.

²⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2017 terhadap IHK Desember 2016.

³⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2017 terhadap IHK Juni 2016.

Tabel 1.2
Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi Juni 2017
Menurut Komponen Perubahan Harga
(2012=100)

Komponen	IHK Juni 2016	IHK Desember 2016	IHK Juni 2017	Inflasi Juni 2017 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2017 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	124,29	126,71	129,72	0,69	2,38	4,37	0,69
Inti	117,45	119,23	121,13	0,26	1,59	3,13	0,15
Harga Diatur Pemerintah	136,52	140,11	151,04	2,10	7,80	10,64	0,42
Bergejolak	138,86	142,15	141,88	0,65	-0,19	2,17	0,12

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,97	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,97
Februari	0,05	0,75	0,26	-0,36	-0,09	0,23	0,81	1,79	1,33	-0,61	0,42	1,21
Maret	0,07	0,63	0,08	0,17	0,19	-0,02	0,88	2,43	1,41	-0,44	0,62	1,19
April	0,21	-0,10	-0,02	0,36	-0,45	0,09	1,09	2,32	1,39	-0,08	0,16	1,28
Mei	0,07	-0,03	0,16	0,50	0,24	0,39	1,15	2,30	1,56	0,42	0,40	1,67
Juni	0,62	1,03	0,43	0,54	0,66	0,69	1,79	3,35	1,99	0,96	1,06	2,38
Juli	0,70	3,29	0,93	0,93	0,69		2,50	6,75	2,94	1,90	1,76	
Agustus	0,95	1,12	0,47	0,39	-0,02		3,48	7,94	3,42	2,29	1,74	
September	0,01	-0,35	0,27	-0,05	0,22		3,49	7,57	3,71	2,24	1,97	
Oktober	0,16	0,09	0,47	-0,08	0,14		3,66	7,66	4,19	2,16	2,11	
November	0,07	0,12	1,50	0,21	0,47		3,73	7,79	5,75	2,37	2,59	
Desember	0,54	0,55	2,46	0,96	0,42		4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)

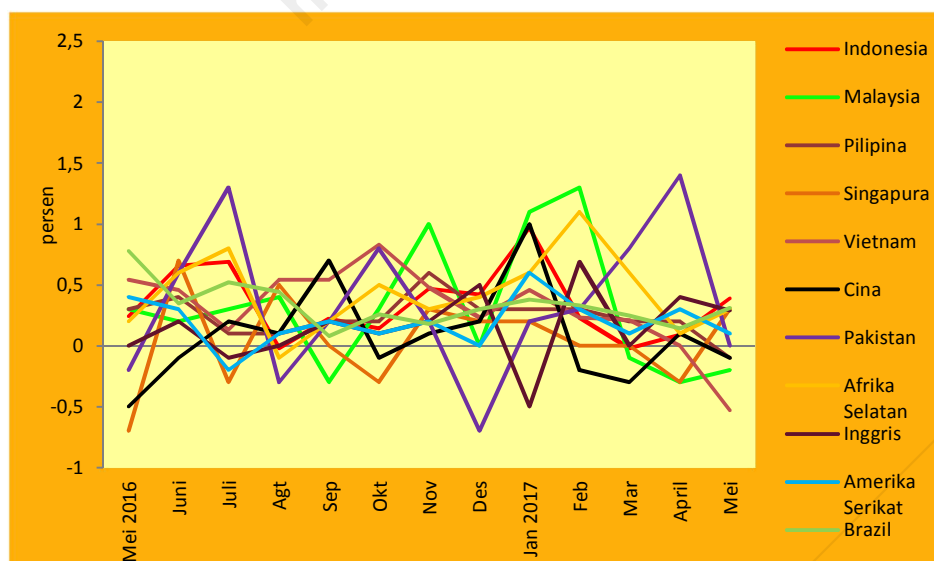
Bulan	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014	2016:2015	2017:2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	3,65	4,57	8,22	6,96	4,14	3,49
Februari	3,56	5,31	7,75	6,29	4,42	3,83
Maret	3,97	5,90	7,32	6,38	4,45	3,61
April	4,50	5,57	7,25	6,79	3,60	4,17
Mei	4,45	5,47	7,32	7,15	3,33	4,33
Juni	4,53	5,90	6,70	7,26	3,45	4,37
Juli	4,56	8,61	4,53	7,26	3,21	
Agustus	4,58	8,79	3,99	7,18	2,79	
September	4,31	8,40	4,53		3,07	
Oktober	4,61	8,32	4,83	6,83	6,25	3,31
November	4,32	8,37	6,23	4,89	3,58	
Desember	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	

Tabel 1.5
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, April 2017–Mei 2017 (persen)

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun (<i>Y-on-Y</i>)	
	April 2017	Mei 2017	April 2017	Mei 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	0,09	0,39	4,17	4,33
2. Malaysia	-0,30	-0,20	4,40	3,90
3. Pilipina	0,20	-0,10	3,40	3,10
4. Singapura	-0,30	0,30	0,40	1,40
5. Vietnam	0,00	-0,53	4,30	3,19
6. Cina	0,10	-0,10	1,20	1,50
7. Pakistan	1,40	0,00	4,80	5,00
8. Afrika Selatan	0,10	0,30	5,30	5,40
9. Inggris	0,40	0,29	2,70	2,90
10. Amerika Serikat	0,30	0,10	2,20	1,90
11. Brazil	0,14	0,31	4,08	3,60

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.dosm.gov.my>, <http://www.statpak.gov.pk>, <http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>, <http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <http://www.statistics.gov.uk>, <http://www.statssa.gov.za>, dan www.bloomberg.com

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2016–2017

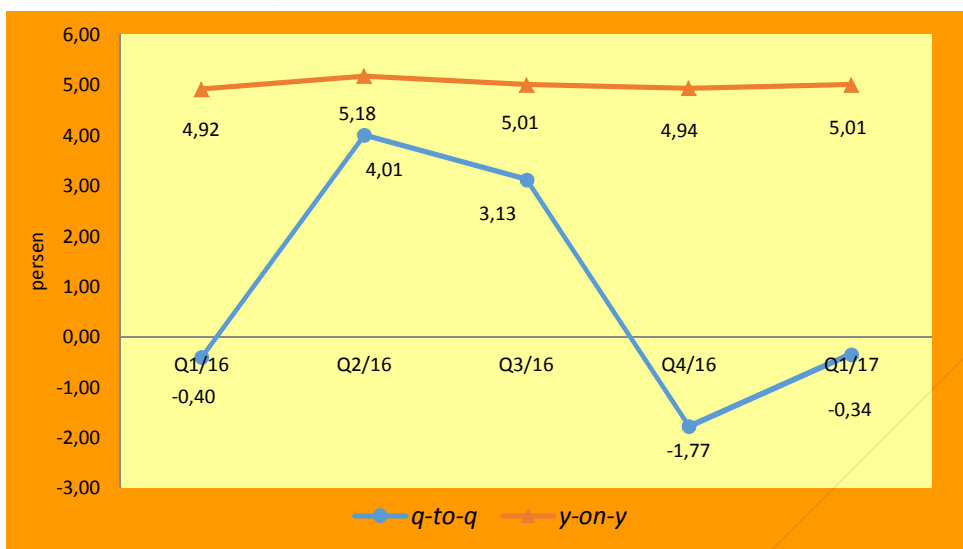


II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I-2017

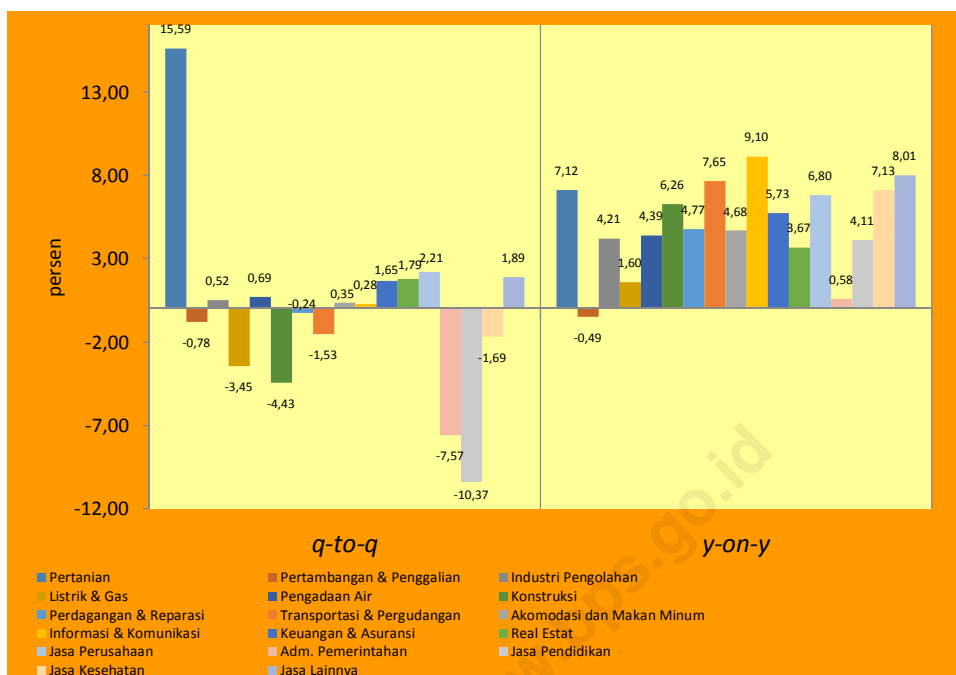
1. Ekonomi Indonesia triwulan I-2017 dibandingkan triwulan I-2016 (*y-on-y*) tumbuh 5,01 persen dan dibandingkan triwulan IV-2016 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,34 persen.
2. Dari sisi produksi pertumbuhan triwulan I-2017 (*y-on-y*) terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,49 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,10 persen.
3. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi diwarnai oleh faktor musiman Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan khususnya komoditas padi yang memasuki panen raya. Fenomena ini menyebabkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 15,59 persen. Selain itu, pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya seperti Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, dan Jasa Lainnya.

**Triwulan I-2017,
perekonomian
Indonesia
tumbuh 5,01 persen**

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2016 s.d Triwulan I-2017 (persen)



Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Triwulan I-2017 (persen)



Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2017 Terhadap Triw IV-2016 (q-to-q)	Triw I-2017 Terhadap Triw I-2016 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2017 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,59	7,12	0,90
2. Pertambangan dan Penggalian	-0,78	-0,49	-0,04
3. Industri Pengolahan	0,52	4,21	0,91
4. Pengadaan Listrik dan Gas	-3,45	1,60	0,02
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,69	4,39	0,00
6. Konstruksi	-4,43	6,26	0,61
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,24	4,77	0,64
8. Transportasi dan Pergudangan	-1,53	7,65	0,30

Lapangan Usaha	Triw I-2017 Terhadap Triw IV-2016 (q-to-q)	Triw I-2017 Terhadap Triw I-2016 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2017 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,35	4,68	0,14
10. Informasi dan Komunikasi	0,28	9,10	0,45
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,65	5,73	0,23
12. Real Estat	1,79	3,67	0,11
13. Jasa Perusahaan	2,21	6,80	0,12
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,57	0,58	0,02
15. Jasa Pendidikan	-10,37	4,11	0,12
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,69	7,13	0,08
17. Jasa lainnya	1,89	8,01	0,13
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	0,80	4,88	4,74
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	-27,19	9,37	0,27
PRODUK DOMESTIK BRUTO	-0,34	5,01	5,01

4. Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2017 mencapai Rp3.227,2 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.377,5 triliun.

Tabel 2.2
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2016	Triw IV-2016	Triw I-2017	Triw I-2016	Triw IV-2016	Triw I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	395,7	369,7	438,5	286,2	265,2	306,5
2. Pertambangan dan Penggalian	204,7	256,0	257,8	195,8	196,4	194,9
3. Industri Pengolahan	617,1	648,3	660,8	490,2	508,2	510,8
4. Pengadaan Listrik dan Gas	32,1	38,8	39,0	24,4	25,7	24,8
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,2	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0
6. Konstruksi	306,1	343,2	330,8	220,7	245,4	234,6

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2016	Triw IV-2016	Triw I-2017	Triw I-2016	Triw IV-2016	Triw I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	393,2	417,7	425,3	302,8	318,1	317,3
8. Transportasi dan Pergudangan	150,2	172,2	167,0	89,5	97,8	96,3
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	88,5	93,0	93,7	69,2	72,2	72,4
10. Informasi dan Komunikasi	106,3	117,3	122,2	109,4	119,0	119,4
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	125,3	133,9	138,0	92,1	95,7	97,3
12. Real Estat	85,7	88,3	91,6	68,9	70,2	71,4
13. Jasa Perusahaan	51,4	54,7	56,8	39,0	40,7	41,6
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	111,9	125,1	114,7	77,8	84,7	78,3
15. Jasa Pendidikan	94,5	114,3	101,1	68,8	79,9	71,6
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,6	35,2	34,5	24,8	27,1	26,6
17. Jasa lainnya	51,1	55,2	57,0	37,9	40,2	41,0
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	2 847,6	3 065,2	3 131,1	2 199,4	2 288,4	2 306,8
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK PRODUK DOMESTIK BRUTO	83,8	129,6	96,1	64,7	97,2	70,7
	2 931,4	3 194,8	3 227,2	2 264,1	2 385,6	2 377,5

5. Struktur ekonomi Indonesia triwulan I-2017 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan; diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan peran masing-masing sebesar 20,47 persen, 13,59 persen dan 13,18 persen. Selanjutnya Konstruksi; dan Pertambangan dan Penggalian memiliki peran masing-masing sebesar 10,25 persen dan 7,99 persen.

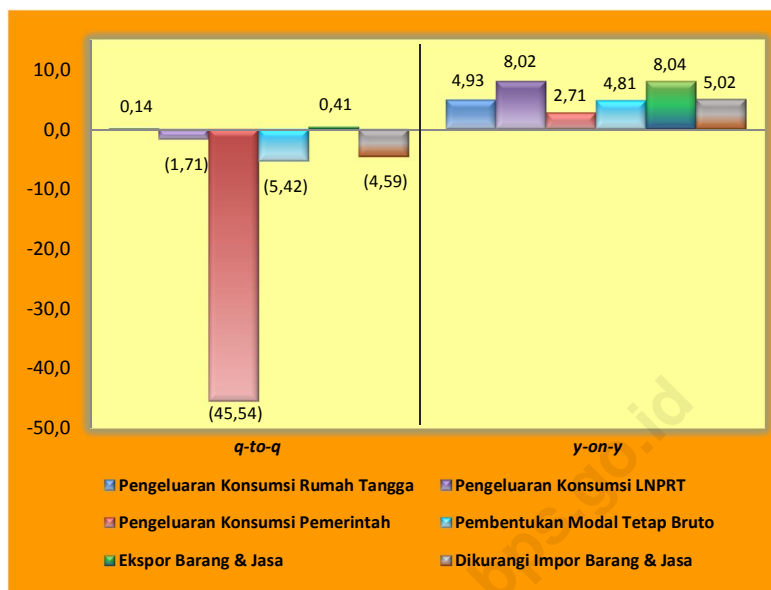
Tabel 2.3
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2016, Triwulan IV-2016
dan Triwulan I-2017 (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2016	Triw IV-2016	Triw I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,50	11,57	13,59
2. Pertambangan dan Penggalian	6,98	8,01	7,99
3. Industri Pengolahan	21,05	20,29	20,47
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,10	1,21	1,21
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07
6. Konstruksi	10,44	10,74	10,25
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,41	13,08	13,18
8. Transportasi dan Pergudangan	5,12	5,39	5,17
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,02	2,91	2,90
10. Informasi dan Komunikasi	3,63	3,67	3,79
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,27	4,19	4,28
12. Real Estat	2,93	2,76	2,84
13. Jasa Perusahaan	1,75	1,72	1,76
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,82	3,92	3,55
15. Jasa Pendidikan	3,22	3,58	3,13
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,07
17. Jasa lainnya	1,74	1,73	1,77
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	97,14	95,94	97,02
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	2,86	4,06	2,98
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00

6. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 dibandingkan dengan triwulan I-2016 (*y-on-y*) terjadi pada semua komponen. Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 8,04 persen, terutama karena ekspor barang non-migas tumbuh sebesar 9,93 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,02 persen. Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh pertumbuhan impor barang migas. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga sebesar 4,93 persen, terutama didorong oleh pengeluaran untuk kelompok kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,81 persen, terutama didorong oleh

pertumbuhan barang modal jenis bangunan dan kendaraan. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 2,71 persen.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2017 (persen)



7. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran hanya didukung oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang meningkat sebesar 0,41 persen yang didukung oleh pertumbuhan ekspor barang migas dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,14 persen (*q-to-q*) terutama didorong oleh pengeluaran untuk makanan dan minuman. Komponen lainnya tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw I-2017 Terhadap Triw IV-2016	Triw I-2017 Terhadap Triw I-2016	Sumber Pertumbuhan Triw I-2017 (<i>y-on-y</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,14	4,93	2,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,71	8,02	0,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-45,54	2,71	0,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-5,42	4,81	1,54
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	0,41	8,04	1,71
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	-4,59	5,02	0,98
PDB	-0,34	5,01	5,01

Tabel 2.5
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran
(triliun rupiah)

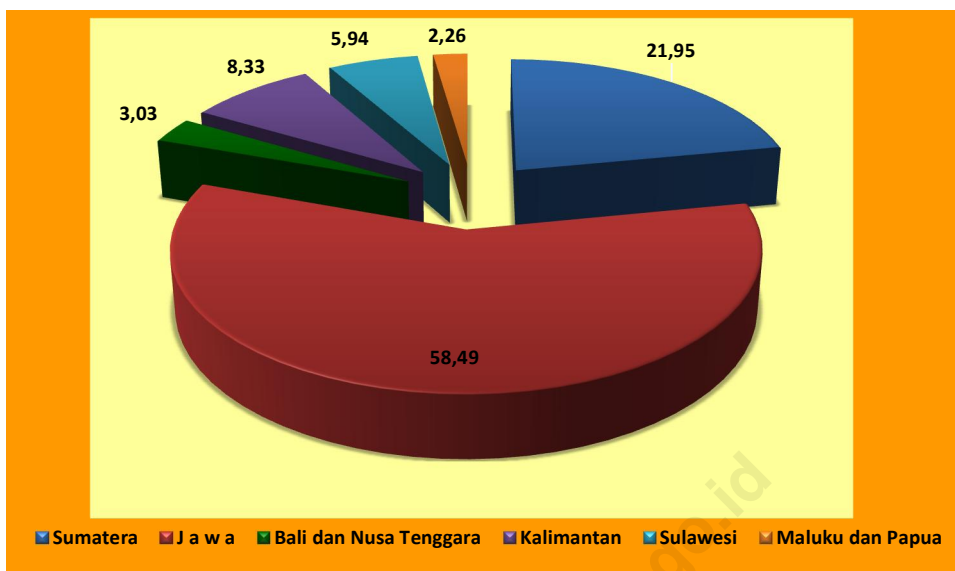
Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2016	Triw IV-2016	Triw I-2017	Triw I-2016	Triw IV-2016	Triw I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 691,5	1 807,1	1 837,5	1 247,6	1 307,3	1 309,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	34,1	38,4	38,3	25,1	27,6	27,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	201,1	390,6	212,4	138,5	261,1	142,2
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	962,0	1 071,2	1 018,4	725,6	804,2	760,6
5. Perubahan Inventori	80,6	-47,8	68,3	53,1	-30,5	43,8
6. Ekspor Barang dan Jasa	557,9	652,7	661,7	481,7	518,3	520,4
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	542,2	618,3	604,2	442,6	487,1	464,8
8. Diskrepansi Statistik	-53,6	-99,1	-5,2	35,1	-15,3	39,1
PDB	2 931,4	3 194,8	3 227,2	2 264,1	2 385,6	2 377,5

8. Struktur perekonomian Indonesia dari sisi pengeluaran pada triwulan I-2017 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,94 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor, dan Impor Barang dan Jasa memberikan kontribusi masing-masing sebesar 31,56 persen, 20,50 persen, dan 18,72 persen.

Tabel 2.6
Struktur PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2016, Triwulan IV-2016 dan Triwulan I-2017 (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw I-2016	Triw IV-2016	Triw I-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,70	56,56	56,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,20	1,19
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,86	12,23	6,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	32,82	33,53	31,56
5. Perubahan Inventori	2,75	-1,50	2,11
6. Ekspor Barang dan Jasa	19,03	20,43	20,50
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	18,49	19,35	18,72
8. Diskrepansi Statistik	-1,83	-3,10	-0,16
PDB	100,00	100,00	100,00

Grafik 2.4
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan IV-2016 (persen)



9. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2017 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,49 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,95 persen, Pulau Kalimantan 8,33 persen, dan Pulau Sulawesi 5,94 persen, dan sisanya 5,29 persen di pulau-pulau lainnya.

Tabel 2.7
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)

Wilayah/Pulau	2015	2016	2016		Triw I-2017
			Triw I	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sumatera	22,18	22,03	22,12	22,02	21,95
2. Jawa	58,34	58,49	58,85	57,88	58,49
3. Bali & Nusa Tenggara	3,06	3,13	3,10	3,11	3,03
4. Kalimantan	8,15	7,85	7,74	8,27	8,33
5. Sulawesi	5,91	6,04	5,89	6,07	5,94
6. Maluku dan Papua	2,36	2,46	2,30	2,65	2,26
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

10. Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan I-2017 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,55 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta,

Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 6,48 persen; 5,37 persen; 5,24 persen dan 5,20 persen.

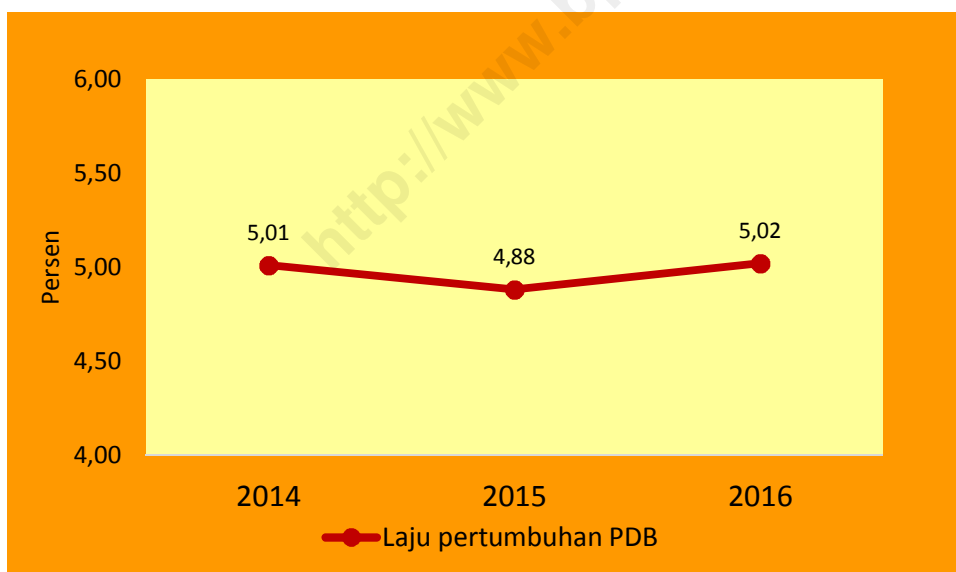
Tabel 2.8
Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan I-2017 (persen)

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	Q	Y	C	Terhadap Pulau	Terhadap 34 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	-0,70	4,05	4,05	100,00	21,95
01. Aceh	-1,91	2,87	2,87	4,84	1,06
02. Sumatra Utara	0,36	4,50	4,50	22,75	4,99
03. Sumatra Barat	-0,29	4,91	4,91	7,13	1,57
04. Riau	-4,88	2,82	2,82	23,72	5,21
05. Jambi	-1,44	4,27	4,27	6,37	1,40
06. Sumatra Selatan	1,08	5,11	5,11	12,68	2,78
07. Bengkulu	-0,03	5,21	5,21	2,03	0,44
08. Lampung	6,59	5,11	5,11	10,47	2,30
09. Kep. Bangka Belitung	0,15	6,42	6,42	2,36	0,52
10. Kepulauan Riau	-2,76	2,02	2,02	7,65	1,68
Jawa	0,51	5,66	5,66	100,00	58,49
11. DKI Jakarta	0,42	6,48	6,48	29,80	17,43
12. Jawa Barat	0,24	5,24	5,24	22,08	12,92
13. Jawa Tengah	1,79	5,20	5,20	14,72	8,61
14. DI Yogyakarta	0,20	5,12	5,12	1,49	0,87
15. Jawa Timur	0,25	5,37	5,37	24,94	14,59
16. Banten	0,06	5,90	5,90	6,96	4,07
Bali dan Nusa Tenggara	-3,66	2,36	2,36	100,00	3,03
17. Bali	-1,34	5,75	5,75	50,82	1,54
18. Nusa Tenggara Barat	-6,26	-4,18	-4,18	28,06	0,85
19. Nusa Tenggara Timur	-5,08	4,98	4,98	21,12	0,64
Kalimantan	0,16	4,92	4,92	100,00	8,33
20. Kalimantan Barat	0,64	4,77	4,77	15,75	1,31
21. Kalimantan Tengah	3,01	9,49	9,49	11,32	0,94
22. Kalimantan Selatan	-4,28	5,33	5,33	13,30	1,11
23. Kalimantan Timur	0,54	3,85	3,85	52,83	4,40
24. Kalimantan Utara	1,13	6,17	6,17	6,81	0,57
Sulawesi	-2,50	6,87	6,87	100,00	5,94
25. Sulawesi Utara	-11,96	6,43	6,43	12,69	0,75
26. Sulawesi Tengah	-0,09	3,91	3,91	15,96	0,95
27. Sulawesi Selatan	0,51	7,52	7,52	49,80	2,96
28. Sulawesi Tenggara	-5,63	8,39	8,39	12,62	0,75
29. Gorontalo	3,55	7,27	7,27	4,29	0,26
30. Sulawesi Barat	-7,48	7,38	7,38	4,64	0,28

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	Q	Y	C	Terhadap Pulau	Terhadap 34 Provinsi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku dan Papua	-17,10	4,16	4,16	100,00	2,26
31. Maluku	-2,39	6,19	6,19	12,81	0,29
32. Maluku Utara	0,11	7,54	7,54	10,27	0,23
33. Papua Barat	-2,99	3,68	3,68	23,30	0,53
34. Papua	-26,60	3,36	3,36	53,62	1,21

11. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2016 meningkat sebesar 5,02 persen terjadi pada semua lapangan usaha ekonomi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 8,90 persen, diikuti oleh Informasi-Komunikasi, dan Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing sebesar 8,87 persen dan 7,80 persen.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2014–2016 (persen)



12. Tahun 2016, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 20,51 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,45 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,19 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,24	3,77	3,25	13,34	13,49	13,45
B Pertambangan dan Penggalian	0,43	-3,42	1,06	9,83	7,65	7,20
C Industri Pengolahan	4,64	4,33	4,29	21,07	20,97	20,51
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,90	0,90	5,39	1,09	1,14	1,15
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,24	7,07	3,60	0,07	0,07	0,07
F Konstruksi	6,97	6,36	5,22	9,86	10,21	10,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,18	2,59	3,93	13,43	13,31	13,19
H Transportasi dan Pergudangan	7,36	6,68	7,74	4,42	5,02	5,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	4,31	4,94	3,04	2,96	2,92
J Informasi dan Komunikasi	10,12	9,69	8,87	3,50	3,52	3,62
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	8,59	8,90	3,86	4,03	4,20
L Real Estat	5,00	4,11	4,30	2,79	2,84	2,81
M,N Jasa Perusahaan	9,81	7,69	7,36	1,57	1,65	1,70
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	4,63	3,19	3,83	3,91	3,86
P Jasa Pendidikan	5,47	7,33	3,84	3,23	3,37	3,37
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	6,68	5,00	1,03	1,07	1,07
R,S,T,U Jasa Lainnya	8,93	8,08	7,80	1,55	1,65	1,71
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	5,00	4,18	4,55	97,51	96,86	96,43
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	5,08	32,24	19,31	2,49	3,14	3,57
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,01	4,88	5,02	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

13. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2016 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp 9.433,0 triliun.

Tabel 2.10
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014–2016 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 409,7	1 555,7	1 669,0	1 129,1	1 171,6	1 209,7
B Pertambangan dan Penggalian	1 039,4	881,7	893,9	794,5	767,3	775,5
C Industri Pengolahan	2 227,6	2 418,4	2 544,6	1 854,3	1 934,5	2.017,6
D Pengadaan Listrik dan Gas	114,9	131,3	142,8	94,0	94,9	100,0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,8	8,5	9,0	6,9	7,4	7,6
F Konstruksi	1 042,0	1 177,1	1 287,7	826,6	879,2	925,1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 419,2	1 535,3	1 636,0	1 177,3	1 207,7	1 255,2
H Transportasi dan Pergudangan	467,0	579,1	647,2	326,9	348,8	375,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	321,1	341,6	362,2	257,8	268,9	282,2
J Informasi dan Komunikasi	369,5	406,0	449,1	384,5	421,7	459,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	408,4	465,0	520,9	319,8	347,3	378,2
L Real Estat	294,6	327,6	348,3	256,4	267,0	278,5
M,N Jasa Perusahaan	166,0	190,3	211,6	137,8	148,4	159,3
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	404,6	450,2	478,6	296,3	310,1	319,9
P Jasa Pendidikan	341,8	388,0	418,3	263,7	283,0	293,9
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,1	122,9	132,4	91,4	97,5	102,3
R,S,T,U Jasa Lainnya	163,5	190,6	212,2	134,1	144,9	156,2
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	10 306,2	11 169,3	11 963,8	8 351,4	8 700,2	9 096,2
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	263,5	362,4	443,0	213,5	282,3	336,8
PRODUK DOMESTIK BRUTO	10 569,7	11 531,7	12 406,8	8 564,9	8 982,5	9 433,0

14. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,02 persen ditopang oleh hampir semua Komponen, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen dan 0,15 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,62 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, masing-masing tumbuh sebesar 5,01 persen dan 4,48 persen.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (persen)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,15	4,96	5,01	55,96	56,17	56,50
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,19	-0,62	6,62	1,18	1,14	1,16
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,16	5,32	-0,15	9,43	9,75	9,45
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4,45	5,01	4,48	32,52	32,80	32,57
5 Perubahan Inventori	-	-	-	2,08	1,38	1,73
6 Ekspor Barang dan Jasa	1,07	-2,12	-1,74	23,67	21,15	19,08
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,12	-6,41	-2,27	24,41	20,72	18,31
PDB	5,01	4,88	5,02	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

15. Tahun 2016, Komponen Konsumsi Rumah Tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 56,50 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 32,57 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 19,08 persen, Impor Barang dan Jasa sebesar 18,31 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 9,45 persen, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 1,16 persen.

Tabel 2.12
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 915,2	6 477,6	7 009,6	4 651,0	4 881,9	5.126,5
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	124,3	130,9	144,5	99,4	98,8	105,3
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	996,2	1 124,8	1 172,4	736,3	775,4	774,3
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3 436,9	3 782,1	4 040,5	2 772,5	2 911,5	3.041,8
5 Perubahan Inventori	220,2	158,8	214,1	163,6	112,8	139,6
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 501,4	2 439,1	2 367,3	2 047,9	2 004,4	1.969,6
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 580,5	2 389,6	2 271,2	1 987,1	1 859,7	1.817,5
Diskrepansi Statistik	-44,0	-192,0	-270,4	81,3	57,4	93,4
PDB	10.569,7	11 531,7	12 406,8	8 564,9	8 982,5	9 433,0

16. Dalam kurun waktu 2011–2016, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp32,4 juta (tahun 2011), sebesar Rp35,1 juta (tahun 2012), sebesar Rp38,4 juta (tahun 2013), sebesar Rp41,9 juta (tahun 2014), sebesar Rp45,1 juta (tahun 2015), dan sebesar Rp48,0 juta (tahun 2016).

Tabel 2.13
PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2011–2016

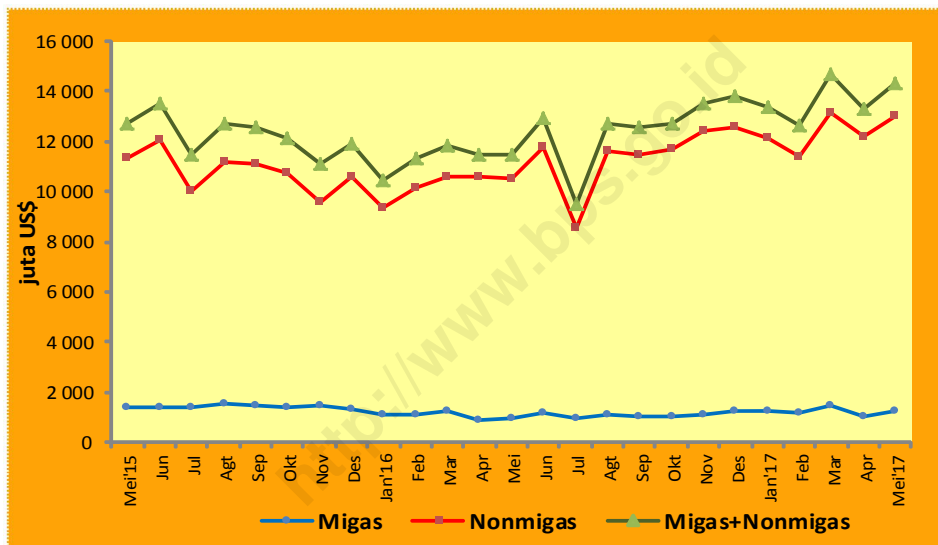
Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDB Per Kapita						
Atas Dasar Harga Berlaku						
a. Nilai (juta rupiah)	32,4	35,1	38,4	41,9	45,1	48,0
b. Indeks Peningkatan (persen)	12,46	8,47	9,29	9,25	7,69	6,24
c. Nilai (US\$)	3.691,9	3.740,9	3.666,8	3.532,3	3.374,5	3.605,1

III. EKSPOR MEI 2017

1. Nilai ekspor Indonesia Mei 2017 mencapai US\$14,29 miliar, atau naik sebesar 7,62 persen dibanding ekspor April 2017. Demikian juga dibanding Mei 2016, ekspor naik sebesar 24,08 persen.

Nilai ekspor Mei 2017 mencapai US\$14,29 miliar, naik 24,08 persen

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)
Mei 2015–Mei 2017



2. Ekspor nonmigas Mei 2017 mencapai US\$13,02 miliar, naik 6,37 persen dibanding ekspor nonmigas April 2017, demikian juga dibanding ekspor Mei 2016, naik 23,34 persen.
3. Secara kumulatif nilai ekspor Januari–Mei 2017 mencapai US\$68,26 miliar atau naik 19,93 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2016. Sementara itu ekspor nonmigas mencapai US\$61,98 miliar atau naik 20,10 persen.
4. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Mei 2017 terhadap April 2017 terjadi pada mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar US\$178,2 juta (43,81 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US\$115,9 juta (6,47 persen).
5. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Mei 2017 naik sebesar 16,22 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2016, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 28,54 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 45,46 persen.

6. Ekspor nonmigas Mei 2017 terbesar adalah ke Amerika Serikat, yaitu US\$1,53 miliar, disusul Tiongkok US\$1,51 miliar dan India US\$1,28 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,14 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US\$1,39 miliar.
7. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari–Mei 2017 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$11,68 miliar (17,11 persen), diikuti Jawa Timur sebesar US\$7,52 miliar (11,02 persen) dan Kalimantan Timur sebesar US\$7,13 miliar (10,45 persen).

Tabel 3.1
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya (Δ%)

Uraian	2016		2017			Δ (%)			Peran (%) Jan–Mei 2017
	Mei	Jan–Mei	April	Mei	Jan–Mei	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	11 517,4	56 917,9	13 279,2	14 291,2	68 264,4	24,08	7,62	19,93	100,00
Migas	957,9	5 310,3	1 035,8	1 267,4	6 284,2	32,31	22,36	18,34	9,21
Industri pengolahan hasil minyak	61,2	338,6	146,1	128,7	713,6	110,27	-11,91	110,73	1,05
Pengadaan gas	2,6	5,3	5,9	2,9	35,5	11,47	-50,24	573,56	0,05
Pertambangan	894,1	4 966,4	883,8	1 135,8	5 535,1	27,03	28,51	11,45	8,11
- Minyak mentah	432,0	2 166,6	302,5	402,7	2 106,2	-6,78	33,09	-2,79	3,09
- Gas	462,1	2 799,8	581,3	733,1	3 428,9	58,64	26,13	22,47	5,02
Nonmigas	10 559,5	51 607,6	12 243,4	13 023,8	61 980,2	23,34	6,37	20,10	90,79
Pertanian	221,5	1 125,7	277,8	314,8	1 447,0	42,14	13,30	28,54	2,12
Industri pengolahan	9 107,4	44 114,9	9 892,3	10 754,6	51 272,1	18,09	8,72	16,22	75,11
Pertambangan dan lainnya	1 230,6	6 367,0	2 073,2	1 954,4	9 261,1	58,82	-5,73	45,46	13,56

Tabel 3.2
Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)
Triwulanan 2016–2017

Uraian	2016				2017	Perubahan Triwulan (%)				
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		II'16	III'16	IV'16	I'17	I'17
						thd	thd	thd	thd	thd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	I'16	II'16	III'16	IV'16	I'16
Total Ekspor	33 710,7	36 413,3	34 983,2	40 079,0	40 694,0	8,02	-3,93	14,57	1,53	20,72
Migas	3 460,6	3 037,0	3 198,7	3 409,0	3 980,9	-12,24	5,32	6,57	16,78	15,04
Industri pengolahan hasil minyak	203,5	201,0	211,2	256,3	438,8	-1,25	5,08	21,35	71,23	115,59
Pengadaan gas	2,6	4,1	3,5	34,3	26,7	56,78	-14,47	887,06	-22,21	929,61
Pertambangan	3 254,5	2 832,0	2 984,1	3 118,5	3 515,4	-12,98	5,37	4,50	12,73	8,02
-Minyak mentah	1 402,9	1 315,5	1 323,9	1 154,5	1 401,0	-6,24	0,64	-12,80	21,36	-0,14
-Gas	1 851,6	1 516,5	1 660,2	1 964,0	2 114,4	-18,09	9,47	18,30	7,66	14,20
Nonmigas	30 250,1	33 376,2	31 784,4	36 670,0	36 713,1	10,33	-4,77	15,36	0,13	21,37
Pertanian	690,1	698,9	918,4	1 099,5	854,3	1,27	31,41	19,71	-22,30	23,79
Industri pengolahan	25 596,2	28 728,7	26 220,1	29 959,1	30 625,2	12,24	-8,73	14,26	2,22	19,65
Pertambangan dan lainnya	3 963,7	3 948,6	4 645,9	5 611,4	5 233,6	-0,38	17,66	20,78	-6,73	32,04

Tabel 3.3
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)

Golongan Barang (HS)	April 2017	Mei 2017	Δ	Δ%	Januari–Mei			
					2016	2017	Δ%	Peran (%) 2017
					(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Bahan bakar mineral (27)	1 792,3	1 676,4	-115,9	-6,47	5 387,6	8 429,7	56,47	13,60
2. Karet dan barang dari karet (40)	751,2	719,1	-32,1	-4,28	2 183,3	3 611,5	65,42	5,83
3. Mesin/peralatan listrik (85)	654,3	733,1	78,8	12,04	3 303,8	3 437,6	4,05	5,55
4. Kendaraan dan bagiannya (87)	543,3	631,3	88,0	16,19	2 250,6	2 809,1	24,81	4,53
5. Mesin-mesin/pesawat mekanik (84)	406,8	585,0	178,2	43,81	2 253,7	2 375,7	5,41	3,83
6. Perhiasan/permata (71)	555,4	450,9	-104,5	-18,82	3 417,4	2 278,9	-33,31	3,68
7. Barang-barang rajutan (61)	266,0	336,7	70,7	26,60	1 292,3	1 508,8	16,76	2,43
8. Biji, kerak, dan abu logam (26)	353,5	290,9	-62,6	-17,70	992,4	1 107,7	11,63	1,79
9. Besi dan baja (72)	215,5	309,0	93,5	43,39	581,7	1 082,0	86,01	1,74
10. Kapal laut (89)	94,2	15,4	-78,8	-83,69	371,6	147,4	-60,34	0,24
Total 10 Golongan Barang	5 632,5	5 747,8	115,3	2,05	22 034,4	26 788,4	21,58	43,22
Lainnya	6 610,9	7 276,0	665,1	10,06	29 573,2	35 191,8	19,00	56,78
Total Ekspor Nonmigas	12 243,4	13 023,8	780,4	6,37	51 607,6	61 980,2	20,10	100,00

Tabel 3.4
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)

Negara Tujuan	April 2017	Mei 2017	Δ	$\Delta\%$	Januari-Mei			Peran (%) 2017
					2016	2017	$\Delta\%$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASEAN	2 604,4	2 877,3	272,9	10,48	11 420,1	13 148,9	15,14	21,21
1 Singapura	768,9	729,3	-39,6	-5,14	3 960,2	3 653,0	-7,76	5,90
2 Malaysia	540,1	644,9	104,8	19,40	2 328,0	2 894,3	24,33	4,67
3 Thailand	410,7	518,6	107,9	26,25	1 833,9	2 196,3	19,76	3,54
ASEAN Lainnya	884,7	984,5	99,8	11,29	3 298,0	4 405,3	33,58	7,11
Uni Eropa	1 358,9	1 388,6	29,7	2,18	5 796,6	6 848,5	18,15	11,05
4 Jerman	228,7	214,4	-14,3	-6,27	1 065,6	1 083,6	1,68	1,75
5 Belanda	311,5	325,9	14,4	4,60	1 193,1	1 665,8	39,63	2,69
6 Italia	183,6	178,2	-5,4	-2,91	669,8	837,6	25,05	1,35
Uni Eropa Lainnya	635,1	670,1	35,0	5,51	2 868,1	3 261,5	13,72	5,26
Negara Utama Lainnya	6 124,1	6 521,4	397,3	6,49	24 256,9	31 034,4	27,94	50,07
7 Tiongkok	1 568,4	1 508,0	-60,4	-3,85	4 873,4	7 773,5	59,51	12,54
8 Jepang	1 059,2	1 236,6	177,4	16,75	5 182,8	5 664,6	9,30	9,14
9 Amerika Serikat	1 363,0	1 526,5	163,5	12,00	6 252,6	7 177,0	14,78	11,58
10 India	1 190,9	1 281,5	90,6	7,61	3 652,1	5 878,5	60,96	9,49
11 Australia	142,1	172,0	29,9	21,02	1 112,4	777,4	-30,11	1,25
12 Korea Selatan	542,7	519,2	-23,5	-4,34	2 069,4	2 626,4	26,91	4,24
13 Taiwan	257,8	277,6	19,8	7,65	1 114,2	1 137,0	2,05	1,83
Total 13 Negara Tujuan Lainnya	8 567,6	9 132,7	565,1	6,60	35 307,5	43 365,0	22,82	69,97
Total Ekspor Nonmigas	12 243,4	13 023,8	780,4	6,37	51 607,6	61 980,2	20,10	100,00

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2015–2017
(FOB:juta US\$)

Bulan	2015			2016 ^t			2017		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	1 959,0	11 285,9	13 244,9	1 108,0	9 473,9	10 581,9	1 271,6	12 130,1	13 401,7
Feb	1 753,4	10 419,4	12 172,8	1 113,3	10 203,4	11 316,7	1 198,1	11 415,4	12 613,5
Mar	1 988,9	11 645,1	13 634,0	1 239,3	10 572,8	11 812,1	1 511,2	13 167,6	14 678,8
Apr	1 458,2	11 646,4	13 104,6	891,7	10 798,0	11 689,7	1 035,8	12 243,4	13 279,2
Mei	1 392,8	11 361,9	12 754,7	957,9	11 559,5	11 517,4	1 267,4	13 023,8	14 291,2
Jun	1 439,9	12 074,2	13 514,1	1 187,4	12 018,7	13 206,1			
Jul	1 421,8	10 044,0	11 465,8	998,6	8 650,9	9 649,5			
Agt	1 530,9	11 195,2	12 726,0	1 138,6	11 615,3	12 753,9			
Sep	1 453,6	11 134,8	12 588,4	1 061,5	11 518,3	12 579,8			
Okt	1 379,5	10 742,2	12 121,7	1 055,9	11 687,8	12 743,7			
Nov	1 497,0	9 625,1	11 122,2	1 103,0	12 399,9	13 502,9			
Des	1 299,5	10 617,6	11 917,1	1 250,2	12 582,2	13 832,4			
Total	18 574,4	131 791,9	150 366,3	13 105,5	132 080,7	145 186,2	6 284,2	61 980,2	68 264,4

Tabel 3.6
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang
dan Pelabuhan Muat, Januari–Mei 2017

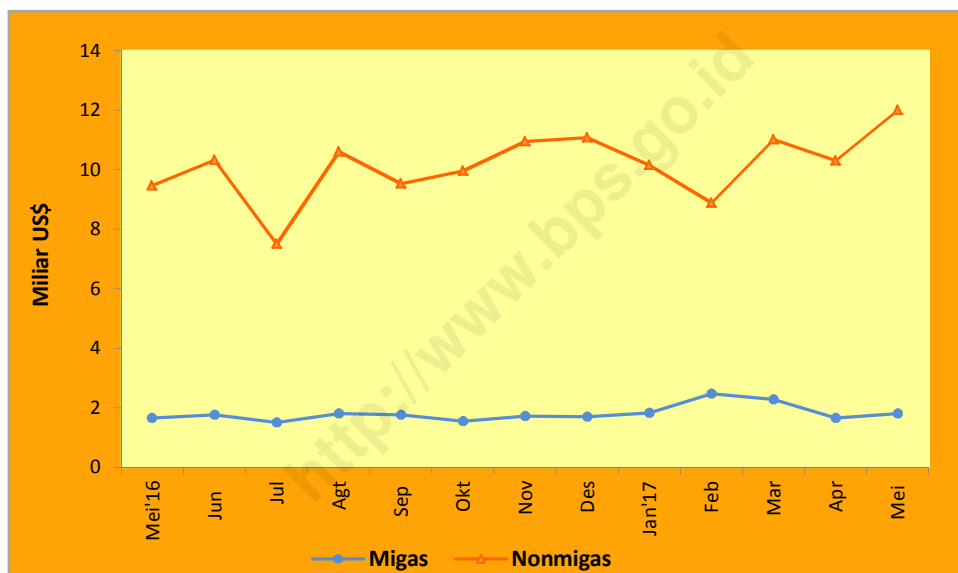
No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	29,7	0,06	50,19	29,5	0,15	49,81	59,1	0,09	100,00
2	Sumatera Utara	3 639,8	7,43	99,26	27,2	0,14	0,74	3 667,0	5,37	100,00
3	Sumatera Barat	796,3	1,63	92,16	67,7	0,35	7,84	864,0	1,27	100,00
4	Riau	6 704,4	13,69	97,94	141,2	0,73	2,06	6 845,6	10,03	100,00
5	Kepulauan Riau	4 614,1	9,42	99,95	2,2	0,01	0,05	4 616,3	6,76	100,00
6	Jambi	479,6	0,98	41,90	664,9	3,45	58,10	1 144,5	1,68	100,00
7	Sumatera Selatan	1 425,3	2,91	90,74	145,5	0,75	9,26	1 570,8	2,30	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	725,1	1,48	96,14	29,1	0,15	3,86	754,2	1,10	100,00
9	Bengkulu	39,5	0,08	31,73	85,1	0,44	68,27	124,6	0,18	100,00
10	Lampung	1 555,2	3,18	94,21	95,6	0,50	5,79	1 650,8	2,42	100,00
11	DKI Jakarta	3 668,4	7,49	98,38	60,5	0,31	1,62	3 728,9	5,46	100,00
12	Jawa Barat	128,7	0,26	1,10	11 552,7	59,89	98,90	11 681,4	17,11	100,00
13	Banten	857,4	1,75	18,15	3 866,5	20,04	81,85	4 723,9	6,92	100,00
14	Jawa Tengah	2 324,9	4,75	77,21	686,3	3,56	22,79	3 011,1	4,41	100,00
15	DI Yogyakarta	2,9	0,01	1,80	158,8	0,82	98,20	161,7	0,24	100,00
16	Jawa Timur	7 377,1	15,06	98,10	142,7	0,74	1,90	7 519,8	11,02	100,00
17	Bali	101,1	0,21	44,49	126,2	0,65	55,51	227,3	0,33	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	346,0	0,71	99,22	2,7	0,01	0,78	348,7	0,51	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	8,3	0,02	37,34	13,9	0,07	62,66	22,2	0,03	100,00
20	Kalimantan Barat	410,4	0,84	77,61	118,4	0,61	22,39	528,8	0,77	100,00
21	Kalimantan Tengah	228,9	0,47	26,31	641,1	3,32	73,69	870,1	1,27	100,00
22	Kalimantan Selatan	2 655,6	5,42	93,76	176,8	0,92	6,24	2 832,5	4,15	100,00
23	Kalimantan Timur	7 083,9	14,46	99,31	49,0	0,25	0,69	7 132,9	10,45	100,00
24	Kalimantan Utara	344,8	0,70	94,33	20,7	0,11	5,67	365,5	0,54	100,00
25	Sulawesi Utara	385,0	0,79	89,85	43,5	0,23	10,15	428,4	0,63	100,00
26	Gorontalo	-	-	-	0,7	0,00	100,00	0,7	0,00	100,00
27	Sulawesi Tengah	945,3	1,93	98,71	12,3	0,06	1,29	957,6	1,40	100,00
28	Sulawesi Selatan	420,7	0,86	92,99	31,7	0,16	7,01	452,5	0,66	100,00
29	Sulawesi Barat	0,2	0,00	0,09	183,0	0,95	99,91	183,1	0,27	100,00
30	Sulawesi Tenggara	23,9	0,05	30,68	54,0	0,28	69,32	77,9	0,11	100,00
31	Maluku	18,1	0,04	49,90	18,2	0,09	50,10	36,3	0,05	100,00
32	Maluku Utara	72,1	0,15	99,91	0,1	0,00	0,09	72,2	0,11	100,00
33	Papua	798,8	1,63	96,19	31,6	0,16	3,81	830,4	1,22	100,00
34	Papua Barat	763,7	1,56	98,72	9,9	0,05	1,28	773,6	1,13	100,00
Total Ekspor		48 975,1	100,00	-	19 289,3	100,00	-	68 264,4	100,00	-

IV. IMPOR MEI 2017

1. Nilai impor Indonesia Mei 2017 sebesar US\$13,82 miliar atau naik 15,67 persen dibanding impor April 2017. Dibanding impor Mei 2016 naik 24,03 persen.

**Impor Mei 2017
sebesar US\$13,82 miliar
atau naik 24,03 persen**

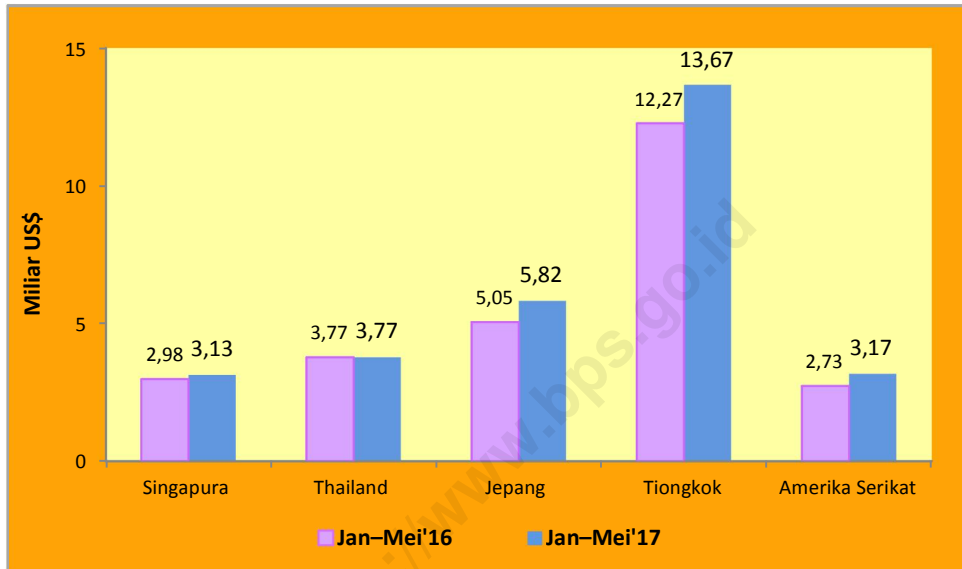
Grafik 4.1
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)
Mei 2016–Mei 2017



2. Impor nonmigas Mei 2017 sebesar US\$12,00 miliar, naik 16,49 persen dibanding April 2017 (US\$10,30 miliar). Selama Januari–Mei 2017 impor nonmigas naik 11,39 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$46,97 miliar).
3. Impor migas Mei 2017 sebesar US\$1,82 miliar, naik 10,54 persen dibanding April 2017 (US\$1,65 miliar). Selama Januari–Mei 2017 impor migas naik 45,00 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$6,93 miliar).
4. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Mei 2017 adalah golongan mesin dan peralatan mekanik sebesar US\$274,6 juta, atau naik 17,64 persen dibanding April 2017 (US\$1.557,1 juta). Impor golongan barang tersebut pada Januari–Mei 2017 mencapai US\$8.430,8 juta, naik 0,18 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari–Mei 2017 ditempati Tiongkok 26,12 persen, Jepang 11,12 persen, dan Thailand 7,21 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 20,77 persen dan 9,21 persen.

Grafik 4.2
Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)
Januari–Mei 2016 dan 2017



6. Nilai impor golongan barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–Mei 2017 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 11,78 persen, 17,63 persen dan 9,13 persen.
7. Neraca perdagangan Indonesia Mei 2017 surplus sebesar US\$0,47 miliar.

Tabel 4.1
Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya
Januari–Mei 2016 dan 2017

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Jan–Mei 2017 (%)
	April 2017	Mei 2017	Jan–Mei 2016	Jan–Mei 2017	Mei'17 thd Apr'17	Jan–Mei'17 thd Jan–Mei'16	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	11 945,2	13 817,2	53 898,6	62 368,2	15,67	15,71	100,00
Migas	1 646,8	1 820,3	6 927,6	10 045,3	10,54	45,00	16,11
-Minyak Mentah	426,1	529,0	2 657,4	2 605,7	24,15	-1,95	4,18
- Hasil Minyak	1 045,7	1 108,0	3 616,9	6 336,2	5,96	75,18	10,16
- Gas	175,0	183,3	653,3	1 103,4	4,74	68,90	1,77
Nonmigas	10 298,4	11 996,9	46 971,0	52 322,9	16,49	11,39	83,89

Tabel 4.2
Perkembangan Impor Indonesia
Mei 2016–Mei 2017

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016						
Triwulan I	3 896,8	28 047,5	31 944,3	-25,08	-4,94	-7,96
Mei	1 668,5	9 472,2	11 140,7	22,49	0,22	3,02
Juni	1 772,2	10 323,0	12 095,2	6,22	8,98	8,57
Triwulan II	4 802,8	29 246,7	34 049,5	23,25	4,28	6,59
Juli	1 506,4	7 510,8	9 017,2	-15,00	-27,24	-25,45
Agustus	1 795,9	10 589,3	12 385,2	19,23	40,99	37,35
September	1 766,4	9 531,1	11 297,5	-1,64	-9,99	-8,78
Triwulan III	5 068,7	27 631,2	32 699,9	5,54	-5,52	-3,96
Oktober	1 545,1	9 962,1	11 507,2	-12,53	4,52	1,86
November	1 724,1	10 945,4	12 669,5	11,59	9,87	10,10
Desember	1 701,9	11 080,6	12 782,5	-1,28	1,24	0,89
Triwulan IV	4 971,1	31 988,1	36 959,2	-1,92	15,77	13,03
Jan–Des	18 739,8	116 913,0	135 652,8	-23,86	-0,99	-4,94
2017						
Januari	1 828,1	10 140,3	11 968,4	7,41	-8,49	-6,37
Februari	2 473,1	8 880,9	11 354,0	35,28	-12,42	-5,13
Maret	2 277,0	11 066,4	13 283,4	-7,93	23,93	16,99
Triwulan I	6 578,2	30 027,6	36 605,8	32,32	-6,13	-0,96
April	1 646,8	10 298,4	11 945,2	-27,68	-6,43	-10,07
Mei	1 820,3	11 996,9	13 817,2	10,54	16,49	15,67

Tabel 4.3
Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya
Januari–Mei 2016 dan 2017

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan–Mei'17 (%)
	April 2017	Mei 2017	Jan–Mei 2016	Jan–Mei 2017	Mei'17 thd Apr'17	Jan–Mei'17 thd Jan–Mei'16	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan peralatan mekanik (84)	1 557,1	1 831,7	8 415,9	8 430,8	17,64	0,18	16,11
2. Mesin dan peralatan listrik (85)	1 441,1	1 614,6	6 067,4	6 972,0	12,04	14,91	13,32
3. Plastik dan barang dari plastik (39)	617,9	730,3	2 792,5	3 189,8	18,19	14,23	6,10
4. Besi dan baja (72)	637,2	816,2	2 342,6	3 080,1	28,09	31,48	5,89
5. Sereal (10)	230,4	298,5	1 688,9	1 114,9	29,56	-33,99	2,13
6. Gula dan kembang gula (17)	227,0	215,5	738,4	982,2	-5,07	33,02	1,88
7. Kapal laut dan bangunan terapung (89)	108,1	49,7	309,1	570,1	-54,02	84,44	1,09
8. Buah-buahan (08)	119,7	107,3	291,7	490,7	-10,36	68,19	0,94
9. Senjata dan amunisi (93)	44,4	27,4	260,9	230,7	-38,29	-11,58	0,44
10. Kendaraan bermotor terdismantel (98)	48,0	41,2	129,4	211,6	-14,17	63,52	0,40
Total 10 Golongan Barang	4 818,8	5 556,5	22 354,8	24 339,9	15,31	8,88	46,52
Barang Lainnya	5 479,6	6 440,4	24 616,2	27 983,0	17,53	13,68	53,48
Total Impor Nonmigas	10 298,4	11 996,9	46 971,0	52 322,9	16,49	11,39	100,00

Tabel 4.4
Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang
Januari–Mei 2017

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase thd Total (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 ASEAN	1 324,3	13 413,7	1 615,8	16 353,8	8,10	82,02	9,88	100,00
2 Jepang	216,4	4 125,0	1 489,8	5 831,2	3,71	70,74	25,55	100,00
3 Korea Selatan	359,8	2 627,4	409,8	3 397,0	10,59	77,34	12,06	100,00
4 Tiongkok	1 601,9	8 919,9	3 325,0	13 846,8	11,57	64,42	24,01	100,00
5 India	262,6	1 265,2	187,0	1 714,8	15,31	73,78	10,91	100,00
6 Australia	209,7	2 138,4	55,1	2 403,2	8,73	88,98	2,29	100,00
7 Selandia Baru	155,6	135,5	2,6	293,7	52,98	46,14	0,89	100,00
8 Amerika Serikat	264,2	2 705,3	305,4	3 274,9	8,07	82,61	9,33	100,00
9 Uni Eropa	618,3	2 721,3	1 532,9	4 872,5	12,69	55,85	31,46	100,00
10 Lainnya	628,2	9 192,1	560,0	10 380,4	6,05	88,55	5,39	100,00
Total Impor	5 641,0	47 243,8	9 483,4	62 368,2	9,04	75,75	15,21	100,00

Tabel 4.5
Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang
Januari–Mei 2016 dan 2017

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan–Mei'17 (%)
	April 2017	Mei 2017	Jan–Mei 2016	Jan–Mei 2017	Mei'17 thd Apr'17	Jan–Mei'17 thd Jan–Mei'16	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASEAN	2 129,3	2 463,2	10 445,1	10 867,2	15,68	4,04	20,77
1 Singapura	604,1	722,0	2 977,2	3 132,6	19,52	5,22	5,99
2 Thailand	735,6	884,8	3 774,2	3 772,3	20,28	-0,05	7,21
3 Malaysia	429,3	450,1	1 956,1	2 106,4	4,85	7,68	4,03
ASEAN Lainnya	360,3	406,3	1 737,6	1 855,9	12,77	6,81	3,55
Uni Eropa	871,6	1 099,8	4 461,5	4 820,9	26,18	8,06	9,21
4 Jerman	242,3	285,6	1 220,1	1 277,1	17,87	4,67	2,44
5 Belanda	64,9	77,5	318,8	371,1	19,41	16,41	0,71
6 Italia	133,1	159,4	588,7	649,4	19,76	10,31	1,24
Uni Eropa Lainnya	431,3	577,3	2 333,9	2 523,3	33,85	8,12	4,82
Negara Utama Lainnya	6 090,0	7 035,9	26 546,9	30 785,3	15,53	15,97	58,84
7 Tiongkok	2 669,6	3 307,6	12 265,6	13 667,5	23,90	11,43	26,12
8 Jepang	1 219,3	1 187,7	5 053,3	5 819,0	-2,59	15,15	11,12
9 Amerika Serikat	586,7	750,0	2 729,2	3 165,7	27,83	15,99	6,05
10 Korea Selatan	591,2	622,4	2 426,1	3 139,2	5,28	29,39	6,00
11 Australia	443,0	519,7	1 782,4	2 121,8	17,31	19,04	4,06
12 Taiwan	247,6	313,0	1 217,3	1 299,6	26,41	6,76	2,48
13 India	332,6	335,5	1 073,0	1 572,5	0,87	46,55	3,01
Total 13 Negara Utama	8 299,3	9 615,3	37 382,0	42 094,2	15,86	12,61	80,45
Negara Lainnya	1 999,1	2 381,6	9 589,0	10 228,6	19,13	6,67	19,55
Total Impor Nonmigas	10 298,4	11 996,9	46 971,0	52 322,9	16,49	11,39	100,0

Tabel 4.6
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2016–Mei 2017
(Nilai CIF: Juta US\$)

Bulan	2016				2017			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	1 160,8	7 496,8	1 809,4	10 467,0	1 006,4	9 045,7	1 916,3	11 968,4
Februari	1 005,2	7 376,4	1 794,0	10 175,6	889,4	8 761,4	1 703,2	11 354,0
Maret	986,8	8 614,9	1 700,0	11 301,7	1 343,3	9 921,8	2 018,3	13 283,4
April	865,5	8 177,6	1 770,5	10 813,6	1 107,1	8 976,5	1 861,6	11 945,1
Mei	999,3	8 496,8	1 644,6	11 140,7	1 284,2	10 537,6	1 995,4	13 817,2
Juni	1 141,6	8 957,1	1 996,5	12 095,2				
Juli	729,3	6 825,2	1 462,7	9 017,2				
Agustus	1 174,8	9 145,0	2 065,3	12 385,1				
September	995,7	8 481,1	1 820,7	11 297,5				
Oktober	960,1	8 565,0	1 982,1	11 507,2				
November	1 025,5	9 568,7	2 075,2	12 669,4				
Desember	1 307,1	9 241,0	2 234,4	12 782,5				
Total	12 351,7	100 945,9	22 355,3	135 652,9	5 641,0	47 243,8	9 483,4	62 368,2
Persentase thd Total (%)	9,11	74,41	16,48	100,00	9,04	75,75	15,21	100,00

Tabel 4.7
Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Mei 2017
(juta US\$)

Negara Asal Barang	Maret 2017	April 2017	Mei 2017	Jan-Mei 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Tiongkok	2 825,9	2 726,1	3 339,0	13 846,8
2 Singapura	1 602,5	1 249,0	1 395,3	7 019,7
3 Jepang	1 257,2	1 222,3	1 190,1	5 831,2
4 Thailand	778,3	741,5	891,7	3 795,0
5 Malaysia	782,2	713,0	688,9	3 683,2
6 Korea Selatan	896,1	616,2	669,1	3 397,0
7 Amerika Serikat	646,5	608,9	793,2	3 274,9
8 Australia	511,5	475,2	550,8	2 403,2
9 India	363,8	361,5	343,8	1 714,8
10 Vietnam	283,5	272,2	306,8	1 397,9
11 Taiwan	283,3	248,4	313,9	1 302,9
12 Saudi Arabia	375,5	181,3	301,3	1 284,6
13 Jerman	273,7	243,0	286,6	1 281,2
14 Uni Emirat Arab	185,1	119,5	155,7	947,5
15 Hongkong	145,9	128,8	148,9	653,3
Total 15 Negara	11 211,0	9 906,9	11 375,1	51 833,2
Negara Lainnya	2 072,4	2 038,3	2 442,1	10 535,0
Total Impor	13 283,4	11 945,2	13 817,2	62 368,2
Total 15 Negara (%)	84,40	82,94	82,33	83,11
Negara Lainnya (%)	15,60	17,06	17,67	16,89

Tabel 4.8
Neraca Perdagangan Indonesia, Mei 2016–Mei 2017
(miliar US\$)

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016									
Mei	0,96	10,56	11,52	1,67	9,47	11,14	-0,71	1,08	0,37
Juni	1,19	12,02	13,21	1,77	10,32	12,09	-0,58	1,47	0,88
Juli	1,00	8,65	9,65	1,51	7,51	9,02	-0,51	1,02	0,51
Agustus	1,14	11,62	12,75	1,80	10,59	12,39	-0,66	1,02	0,36
September	1,06	11,52	12,58	1,77	9,53	11,30	-0,71	1,98	1,27
Oktober	1,05	11,69	12,74	1,55	9,96	11,51	-0,49	1,72	1,23
November	1,10	12,40	13,50	1,72	10,95	12,67	-0,62	1,45	0,83
Desember	1,25	12,58	13,83	1,70	11,08	12,78	-0,45	1,50	1,05
Jan-Mei	5,31	51,61	56,92	6,93	46,97	53,90	-1,62	4,64	3,02
Jan-Des	13,11	132,08	145,19	18,74	116,91	135,65	-5,63	15,17	9,53
2017									
Januari	1,27	12,13	13,40	1,83	10,14	11,97	-0,56	1,99	1,43
Februari	1,20	11,42	12,62	2,47	8,88	11,35	-1,27	2,53	1,26
Maret	1,51	13,17	14,68	2,28	11,01	13,29	-0,77	2,16	1,39
April	1,03	12,24	13,28	1,65	10,30	11,95	-0,61	1,94	1,33
Mei	1,27	13,02	14,29	1,82	12,00	13,82	-0,55	1,03	0,47
Jan–Mei	6,28	61,98	68,26	10,05	52,32	62,37	-3,76	9,66	5,90

Tabel 4.9
Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Mei 2017

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2 585 718	1 191 376	472 664 654	246 002 090
Triwulan I	174 680	244 309	114 269 033	62 697 096
Triwulan II	561 014	425 064	129 548 175	64 587 922
Triwulan III	131 620	203 161	109 668 226	56 043 208
Triwulan IV	1 718 404	318 842	119 179 220	62 673 864
2014	516 069	759 928	844 163 741	388 178 457
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
2015	519 497	630 391	861 601 001	351 602 090
Triwulan I	39 985	51 936	66 562 915	29 213 209
Triwulan II	160 770	206 334	127 866 410	55 705 088
Triwulan III	152 844	195 941	35 181 781	14 964 060
Triwulan IV	165 898	176 180	631 989 895	251 719 733
2016	999 167	864 261	1 283 178 527	531 841 557
Triwulan I	627 653	261 673	981 992 734	401 346 706
Triwulan II	257 429	438 457	91 720 535	40 012 930
Triwulan III	83 825	105 468	72 605 748	31 181 924
Triwulan IV	30 260	58 663	136 859 510	59 299 997
2017	1 099 885	948 790	94 691 338	49 750 610
Januari	11 810	31 214	12 473 240	10 851 353
Februari	21 000	40 320	2 000 000	1 084 200
Maret	38 016	83 108	31 424 850	14 162 072
April	1 003 959	754 378	25 508 015	13 630 206
Mei	25 100	39 770	23 285 233	10 022 779

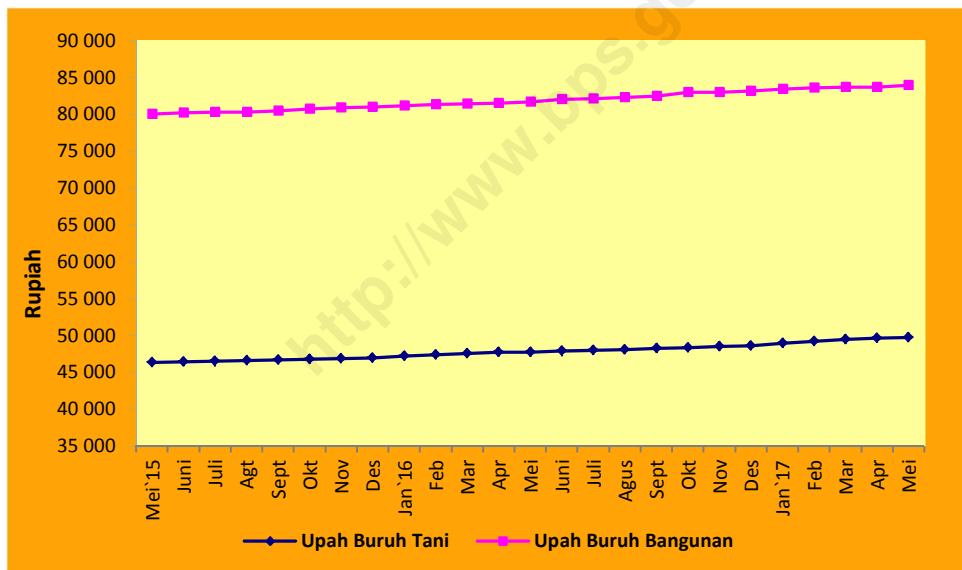
V. UPAH BURUH MEI 2017

1. Upah Harian Buruh Tani

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Mei 2017 naik sebesar 0,29 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp49.638,00 menjadi Rp49.782,00. Secara riil turun sebesar 0,45 persen, yaitu dari Rp37.549,00 menjadi Rp37.380,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Mei 2017 sebesar Rp49.782,00, naik 0,29 persen

Grafik 5.1
Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan
Mei 2015–Mei 2017



2. Upah Buruh Bangunan

Pada Mei 2017, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,26 persen dibanding upah nominal April 2017, yaitu dari Rp83.740,00 menjadi Rp83.958,00, sedangkan upah riil turun sebesar 0,13 persen, yaitu dari Rp65.254,00 menjadi Rp65.170,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Mei 2017 sebesar Rp83.958,00, naik 0,26 persen

Tabel 5.1
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)
Mei 2015–Mei 2017

Bulan	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal	Riil ¹⁾	Nominal	Riil ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mei 2015	46 386	38 383	80 087	67 019
Juni	46 458	38 130	80 237	66 786
Juli	46 572	37 887	80 293	66 216
Agustus	46 629	37 757	80 342	66 000
September	46 739	37 855	80 494	66 158
Oktober	46 800	37 918	80 744	66 418
November	46 881	37 822	80 946	66 447
Desember	46 995	37 486	81 002	65 861
Januari 2016	47 241	37 372	81 221	65 702
Februari	47 437	37 494	81 367	65 879
Maret	47 559	37 236	81 481	65 843
April	47 731	37 559	81 554	66 202
Mei	47 796	37 563	81 677	66 146
Juni	47 898	37 421	82 028	65 997
Juli	47 985	37 208	82 143	65 636
Agustus	48 120	37 290	82 348	65 810
September	48 235	37 259	82 480	65 768
Oktober	48 368	37 349	83 057	66 134
November	48 517	37 142	83 082	65 844
Desember	48 627	37 072	83 190	65 654
Januari 2017	49 000	37 064	83 432	65 211
Februari	49 268	37 125	83 657	65 235
Maret	49 473	37 318	83 724	65 297
April	49 638	37 549	83 740	65 254
Mei	49 782	37 380	83 958	65 170

Catatan: ¹⁾ Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

²⁾ Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)

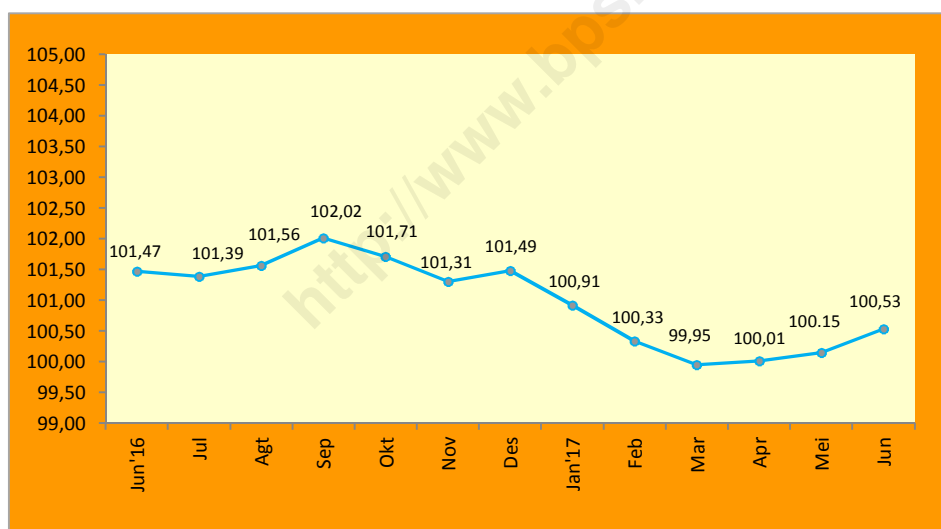
VI. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN JUNI 2017

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

1. NTP Juni 2017 tercatat 100,53 atau naik sebesar 0,38 persen dibanding NTP Mei 2017 sebesar 100,15. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di empat subsektor penyusun NTP yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan masing-masing sebesar 0,69 persen, 0,08 persen, 0,52 persen dan 0,72 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Hortikultura turun sebesar 0,01 persen.

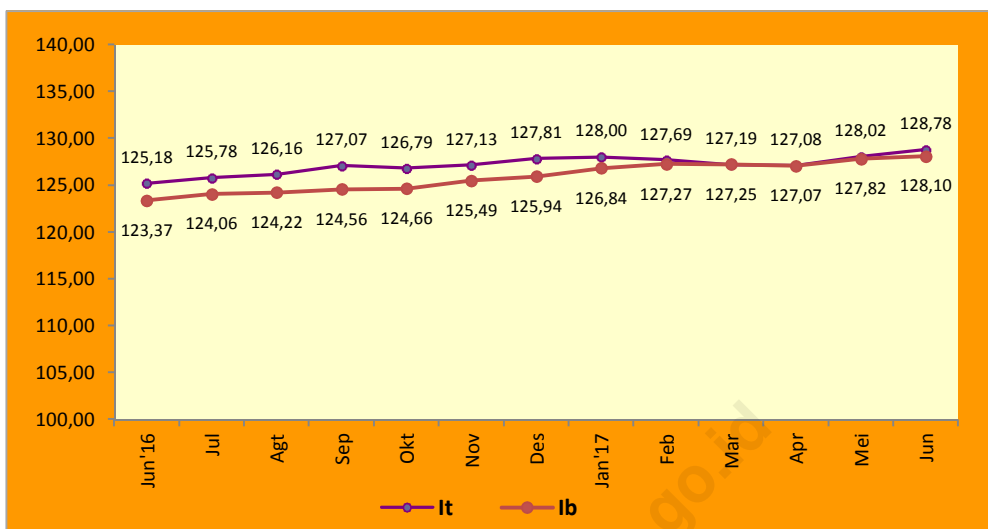
**NTP Juni 2017 naik
sebesar 0,38 persen**

Grafik 6.1
Nilai Tukar Petani (NTP), Juni 2016–Juni 2017 (2012=100)



2. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Juni 2017 naik 0,60 persen bila dibanding It pada Mei 2017, yaitu dari 128,02 menjadi 128,78. Kenaikan indeks tersebut disebabkan naiknya It di lima subsektor, yaitu Tanaman Pangan (0,87 persen), Tanaman Hortikultura (0,21 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,39 persen), Peternakan (0,68 persen), dan Perikanan (1,09 persen).
3. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada Juni 2017 naik sebesar 0,22 persen dibanding Ib Mei 2017. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,22 persen, dan indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal naik sebesar 0,19 persen.

Grafik 6.2
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
Juni 2016–Juni 2017 (2012=100)



4. NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada Juni 2017 naik sebesar 0,69 persen dibanding NTPP Mei 2017. Kenaikan NTPP disebabkan kenaikan It Tanaman Pangan (0,87 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Pangan (0,17 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) turun sebesar 0,01 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Hortikultura (0,21 persen) lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Hortikultura (0,22 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) naik sebesar 0,08 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Perkebunan Rakyat (0,39 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Perkebunan Rakyat (0,31 persen). NTP Peternakan (NTPT) naik sebesar 0,52 persen disebabkan kenaikan It Peternakan (0,68 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Peternakan (0,16 persen). NTP Perikanan (NTNP) naik 0,72 persen disebabkan kenaikan It Perikanan (1,09 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Perikanan (0,37 persen).

Tabel 6.1
Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)

Subsektor	Mei 2017	Juni 2017	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gabungan/Nasional			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	100,15	100,53	0,38
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	128,02	128,78	0,60
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	127,82	128,10	0,22
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,18	133,47	0,22
- Indeks BPPBM	117,29	117,51	0,19
Gabungan/Nasional tanpa Perikanan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	100,01	100,37	0,36
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	127,89	128,63	0,58
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	127,88	128,16	0,22
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,15	133,44	0,22
- Indeks BPPBM	117,41	117,63	0,19
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	96,73	97,40	0,69
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	126,86	127,96	0,87
- Padi	122,85	123,74	0,73
- Palawija	138,24	139,87	1,18
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	131,15	131,37	0,17
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,97	134,17	0,15
- Indeks BPPBM	122,35	122,59	0,20
2. Tanaman Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	101,62	101,61	-0,01
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	131,34	131,62	0,21
- Sayur-sayuran	128,83	129,13	0,23
- Buah-buahan	134,38	134,65	0,20
- Tanaman Obat	120,59	121,51	0,76
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	129,25	129,53	0,22
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,28	133,59	0,23
- Indeks BPPBM	116,85	117,00	0,12
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	97,49	97,57	0,08
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	124,84	125,34	0,39
- Tanaman Perkebunan Rakyat	124,84	125,34	0,39
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	128,06	128,46	0,31
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	131,79	132,19	0,31
- Indeks BPPBM	116,44	116,79	0,30

Subsektor	Mei 2017	Juni 2017	Persentase Perubahan
(1)			(4)
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)	106,13	106,68	0,52
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	129,68	130,56	0,68
- Ternak Besar	132,57	133,63	0,80
- Ternak Kecil	122,99	123,60	0,49
- Unggas	129,31	130,79	1,14
- Hasil Ternak	122,75	122,79	0,03
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	122,19	122,38	0,16
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,37	133,60	0,18
- Indeks BPPBM	112,21	112,35	0,13
5. Perikanan			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	103,39	104,14	0,72
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)	130,01	131,42	1,09
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	125,74	126,20	0,37
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,23	133,84	0,46
- Indeks BPPBM	113,22	113,39	0,15
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	110,18	111,01	0,76
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	137,35	139,07	1,25
- Penangkapan Perairan Umum	134,24	134,73	0,36
- Penangkapan Laut	137,19	138,87	1,22
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	124,67	125,27	0,49
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,35	133,19	0,63
- Indeks BPPBM	112,60	112,77	0,15
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	98,58	99,26	0,68
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	124,74	125,95	0,97
- Budidaya Air Tawar	125,37	126,63	1,00
- Budidaya Laut	115,49	115,58	0,07
- Budidaya Air Payau	122,44	122,99	0,45
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	126,54	126,90	0,28
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,90	134,34	0,33
- Indeks BPPBM	113,70	113,87	0,15

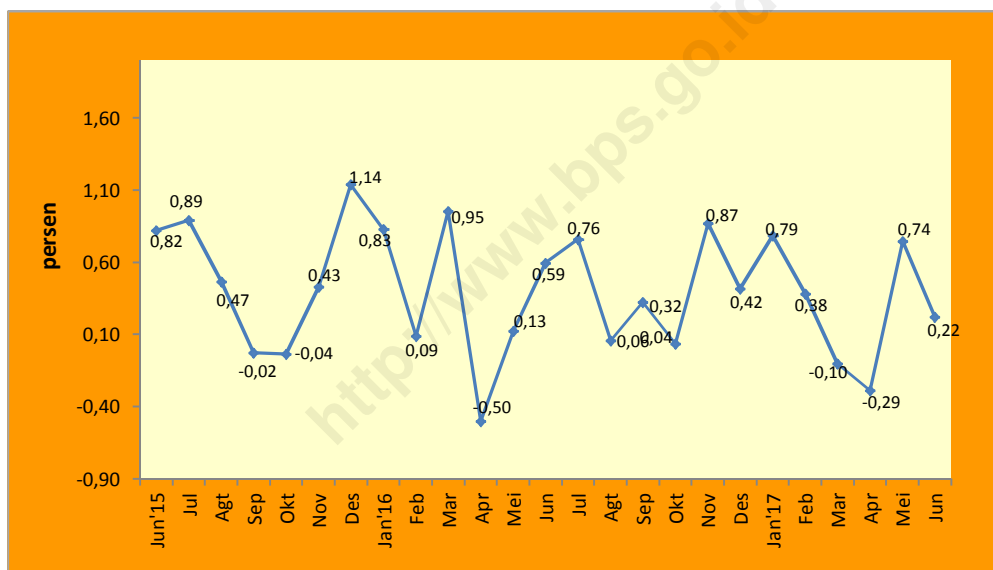
BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

B. Inflasi Perdesaan

1. Pada Juni 2017 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,22 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 133,47. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 27 provinsi, dan deflasi perdesaan di 6 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 2,30 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,02 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,54 persen, sedangkan deflasi perdesaan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,06 persen.

Pada Juni 2017 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,22 persen

Grafik 6.3
Inflasi Perdesaan, Juni 2015–Juni 2017



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada Juni 2017, terjadi kenaikan indeks harga di enam kelompok pengeluaran yaitu Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 0,28 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 1,50 persen; Sandang 1,29 persen; Kesehatan 0,33 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,45 persen; Transportasi dan Komunikasi 0,28 persen. Sebaliknya, kelompok Bahan Makanan mengalami penurunan sebesar 0,35 persen.
3. Inflasi perdesaan Juni 2017 sebesar 0,22 persen dipicu oleh naiknya harga komoditas biaya listrik PLN golongan I, beras, tomat sayur, ikan cakalang, dan rokok kretek filter.

Tabel 6.2
Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran
Juni 2015–Juni 2017

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Juni 2015	1,35	0,70	0,36	0,53	0,23	0,30	0,15	0,82
Juli	1,52	0,38	0,28	1,65	0,31	0,56	0,24	0,89
Agustus	0,83	0,29	0,15	0,12	0,21	0,42	0,11	0,47
September	-0,40	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,17	-0,02
Oktober	-0,43	0,44	0,14	0,15	0,23	0,20	0,09	-0,04
November	0,62	0,47	0,28	0,18	0,21	0,18	0,13	0,43
Desember	2,22	0,61	0,26	0,21	0,22	0,13	0,14	1,14
Januari 2016	1,60	0,93	0,40	0,39	0,53	0,33	-1,28	0,83
Februari	-0,10	0,50	0,10	0,29	0,28	0,13	-0,16	0,09
Maret	1,88	0,48	0,18	0,25	0,29	0,09	0,03	0,95
April	-0,83	0,38	0,14	0,17	0,25	0,10	-2,28	-0,50
Mei	-0,22	0,90	0,21	0,24	0,23	0,14	-0,15	0,13
Juni	0,63	1,05	0,28	0,92	0,26	0,17	0,14	0,59
Juli	1,24	0,63	0,23	0,48	0,26	0,47	0,12	0,76
Agustus	-0,10	0,14	0,21	0,21	0,29	0,35	0,04	0,06
September	0,44	0,34	0,16	0,23	0,33	0,10	0,09	0,32
Oktober	-0,25	0,37	0,28	0,17	0,27	0,24	0,09	0,04
November	1,65	0,35	0,27	0,21	0,29	0,07	0,19	0,87
Desember	0,62	0,35	0,20	0,24	0,27	0,14	0,16	0,42
Januari 2017	0,75	0,90	0,95	0,51	0,88	0,41	0,70	0,79
Februari	0,37	0,45	0,44	0,22	0,36	0,18	0,47	0,38
Maret	-0,69	0,34	0,81	0,25	0,38	0,09	-0,06	-0,10
April	-1,02	0,26	0,38	0,26	0,28	0,07	0,29	-0,29
Mei	1,43	0,33	0,36	0,45	0,30	0,13	-0,09	0,74
Juni	-0,35	0,28	1,50	1,29	0,33	0,45	0,28	0,22

4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender 2016 (Juni 2017 terhadap Desember 2016) adalah sebesar 1,75 persen dan tingkat inflasi perdesaan tahun ke tahun (Juni 2017 terhadap Juni 2016) adalah sebesar 4,27 persen.

Tabel 6.3
Tingkat Inflasi Perdesaan Juni 2017, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2017
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan Juni 2017	Tingkat Inflasi Perdesaan 2017	
	Juni 2016	Desember 2016	Juni 2017		Tahun Kalender	Tahun ke Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	128,00	131,17	133,47	0,22	1,75	4,27
1. Bahan Makanan	137,87	142,89	143,59	-0,35	0,48	4,15
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	125,47	128,23	131,55	0,28	2,59	4,85
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	120,49	122,13	127,64	1,50	4,51	5,93
4. Sandang	121,67	123,57	127,30	1,29	3,02	4,63
5. Kesehatan	117,35	119,36	122,41	0,33	2,55	4,31
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	113,95	115,51	117,06	0,45	1,34	2,72
7. Transportasi dan Komunikasi	119,75	120,58	122,52	0,28	1,61	2,31

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- Pada Juni 2017 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,41 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It lebih tinggi dari kenaikan indeks BPPBM masing masing sebesar 0,60 persen dan 0,19 persen. Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya NTUP di lima subsektor penyusun NTUP yaitu NTUP Tanaman Pangan (0,67 persen), Tanaman Hortikultura (0,08 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,10 persen), Peternakan (0,55 persen), dan Perikanan (0,93 persen).
- Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 20 provinsi mengalami kenaikan dan 13 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTUP terbesar terjadi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 1,52 persen. Sebaliknya, penurunan NTUP tertinggi pada Juni 2017 terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,30 persen.

Tabel 6.4
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya,
(2012=100)

Subsektor	Mei 2017	Juni 2017	Persentase Perubahan
(1)	(3)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	103,69	104,38	0,67
2. Tanaman Hortikultura	112,40	112,50	0,08
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	107,21	107,32	0,10
4. Peternakan	115,57	116,20	0,55
5. Perikanan	114,83	115,90	0,93
a. Tangkap	121,98	123,32	1,09
b. Budidaya	109,71	110,61	0,82
Nasional	109,15	109,59	0,41

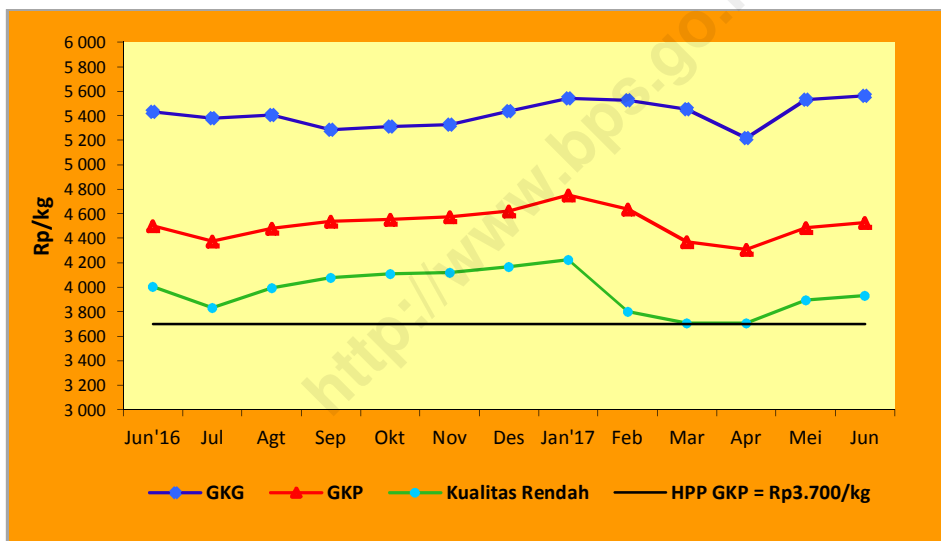
VII. HARGA PANGAN JUNI 2017

A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

- Selama Juni 2017, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani naik 0,97 persen menjadi Rp4.528,00 per kg dan di tingkat penggilingan naik 0,98 persen menjadi Rp4.615,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKP di tingkat petani Juni 2017 sebesar Rp4.528,00 per kg naik 0,97 persen

Grafik 7.1
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas Juni 2016–Juni 2017



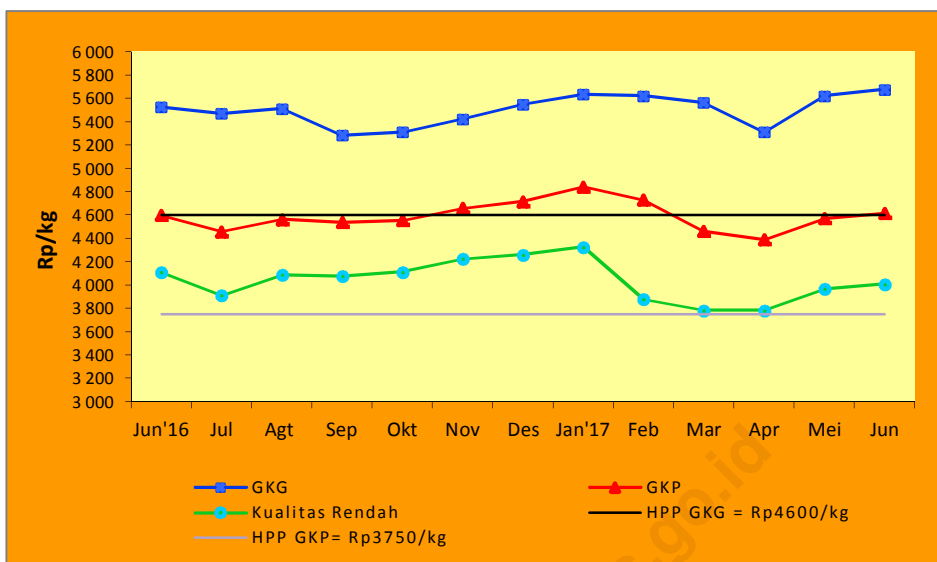
- Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani Rp8.469,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp8.571,00 per kg. Sedangkan harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan masing-masing Rp2.700,00 per kg dan Rp2.800,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan tingkat penggilingan berasal dari kualitas Gabah Kering Giling (GKG) varietas Unus Mayang yang terjadi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan berasal dari GKP varietas IR-64, Merah Putih, dan Super Biru yang terjadi di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Riau).

Tabel 7.1
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, Juni 2016–Juni 2017

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah			
	Kadar Air (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2016										
Jun	18,17	4 501	1,37	12,31	5 430	-1,45	24,54	4 008	4,42	
Jul	18,96	4 376	-2,79	12,80	5 380	-0,92	26,02	3 831	-4,41	
Agt	18,88	4 480	2,38	12,79	5 405	0,46	26,90	3 997	4,34	
Sep	18,43	4 537	1,29	12,45	5 285	-2,23	24,73	4 076	1,98	
Okt	19,37	4 555	0,40	12,60	5 312	0,51	26,48	4 111	0,85	
Nov	19,33	4 574	0,41	12,95	5 325	0,26	25,86	4 122	0,28	
Des	18,75	4 623	1,07	12,88	5 438	2,12	26,52	4 168	1,11	
2017										
Jan	18,29	4 754	2,83	12,82	5 542	1,91	26,64	4 225	1,36	
Feb	18,82	4 639	-2,41	12,89	5 525	-0,32	25,79	3 803	-9,98	
Mar	18,83	4 373	-5,74	12,60	5 452	-1,32	26,12	3 709	-2,47	
Apr	18,33	4 308	-1,49	12,82	5 220	-4,25	25,90	3 705	-0,10	
Mei	18,49	4 485	4,10	12,83	5 531	5,96	24,41	3 897	5,17	
Jun	18,04	4 528	0,97	13,03	5 564	0,60	25,50	3 934	0,96	
Perubahan (%)			0,60				2,47			
Jun'17 thd Jun'16								-1,85		

- Rata-rata harga GKG di tingkat petani selama Juni 2017 naik 0,60 persen menjadi Rp5.564,00 per kg, sedangkan di tingkat penggilingan naik 0,99 persen menjadi Rp5.677,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Untuk harga gabah kualitas rendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan mengalami kenaikan masing-masing 0,96 persen menjadi Rp3.934,00 per kg dan 0,96 persen menjadi Rp4.008,00 per kg.
- Selama periode Juni 2016–Juni 2017, rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.754,00 per kg dan Rp4.225,00 per kg terjadi pada Januari 2017, sedangkan untuk GKG Rp5.564,00 terjadi pada Juni 2017. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.308,00 per kg, Rp5.220,00 per kg, dan Rp3.705,00 per kg terjadi pada April 2017.

Grafik 7.2
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas
Juni 2016–Juni 2017



5. Pada periode Juni 2016–Juni 2017, rata-rata harga tertinggi di tingkat penggilingan untuk GKP dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.844,00 per kg dan Rp4.326,00 per kg terjadi pada Januari 2017, sedangkan untuk GKG Rp5.677,00 terjadi pada Juni 2017. Untuk rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.391,00 per kg, Rp5.313,00 per kg, dan Rp3.782,00 per kg terjadi pada April 2017.
6. Dibandingkan Juni 2016, rata-rata harga di tingkat petani pada Juni 2017 untuk kualitas GKP dan GKG mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0,60 persen dan 2,47 persen, sedangkan gabah kualitas rendah mengalami penurunan sebesar 1,85 persen. Begitu pula di tingkat penggilingan pada Juni 2017 untuk kualitas GKP dan GKG mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,37 persen dan 2,73 persen, sedangkan gabah kualitas rendah mengalami penurunan sebesar 2,48 persen.
7. Berdasarkan komposisinya, jumlah 1.124 observasi harga gabah masih didominasi transaksi penjualan GKP sebanyak 718 observasi (63,88 persen), diikuti oleh gabah kualitas rendah sebanyak 237 observasi (21,09 persen), dan GKG sebanyak 169 observasi (15,03 persen). Dari jumlah observasi tersebut, terdapat kasus harga di bawah HPP, yaitu 4 observasi atau 0,56 persen terjadi di tingkat petani dan 4 observasi atau 0,45 persen terjadi di tingkat penggilingan.

Tabel 7.2
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, Juni 2016–Juni 2017

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016									
Jun	18,17	4 598	1,56	12,31	5 526	-1,32	24,54	4 110	4,48
Jul	18,96	4 458	-3,03	12,80	5 473	-0,97	26,02	3 912	-4,82
Agt	18,88	4 564	2,37	12,79	5 514	0,75	26,90	4 088	4,50
Sep	18,43	4 621	1,26	12,45	5 397	-2,13	24,73	4 184	2,35
Okt	19,37	4 643	0,47	12,60	5 413	0,31	26,48	4 211	0,65
Nov	19,33	4 660	0,37	12,95	5 426	0,23	25,86	4 225	0,31
Des	18,75	4 717	1,23	12,88	5 551	2,31	26,52	4 260	0,83
2017									
Jan	18,29	4 844	2,69	12,82	5 636	1,53	26,64	4 326	1,56
Feb	18,82	4 731	-2,34	12,89	5 621	-0,27	25,79	3 880	-10,33
Mar	18,83	4 460	-5,71	12,60	5 564	-1,01	26,12	3 783	-2,48
Apr	18,33	4 391	-1,56	12,82	5 313	-4,52	25,90	3 782	-0,03
Mei	18,49	4 570	4,09	12,83	5 622	5,82	24,41	3 966	4,87
Jun	18,04	4 615	0,98	13,03	5 677	0,99	25,50	4 008	1,05
Perubahan (%)			0,37			2,73			-2,48
Jun'17 thd Jun'16									

8. Pada Juni 2017, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.444,00 per kg naik sebesar 0,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp8.794,00 per kg naik sebesar 0,05 persen. Rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.380,00 per kg naik sebesar 0,07 persen.

Pada Juni 2017, rata-rata harga beras medium di penggilingan sebesar Rp8.794,00 per kg, naik 0,05 persen

9. Dibandingkan Juni 2016, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Juni 2017 untuk kualitas premium mengalami kenaikan sebesar 0,96 persen, sedangkan medium, dan rendah mengalami penurunan harga masing-masing sebesar 1,99 persen dan 2,35 persen.

Tabel 7.3
Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah
(Broken), Juni 2016–Juni 2017

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah			
	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2016										
Jun	9 354	1,88	7,35	8 973	1,55	15,55	8 582	1,10	23,04	
Jul	9 374	0,21	7,26	8 932	-0,45	15,58	8 558	-0,28	23,55	
Agt	9 367	-0,08	7,47	8 901	-0,35	15,87	8 502	-0,65	22,75	
Sep	9 111	-2,74	7,15	8 965	0,72	15,53	8 578	0,89	22,89	
Okt	9 132	0,24	7,26	8 981	0,17	15,76	8 597	0,23	23,08	
Nov	9 257	1,37	7,20	9 050	0,77	15,66	8 632	0,40	22,87	
Des	9 342	0,91	7,21	9 069	0,21	15,55	8 658	0,30	22,83	
2017										
Jan	9 431	0,96	7,32	9 100	0,34	15,72	8 669	0,13	22,90	
Feb	9 408	-0,24	7,33	9 048	-0,57	15,24	8 584	-0,99	23,17	
Mar	9 389	-0,21	7,26	8 705	-3,78	16,01	8 339	-2,85	23,06	
Apr	9 325	-0,68	7,41	8 654	-0,59	15,70	8 306	-0,39	23,14	
Mei	9 436	1,20	7,34	8 790	1,58	15,28	8 374	0,82	23,15	
Juni	9 444	0,09	7,21	8 794	0,05	15,39	8 380	0,07	22,71	
Perubahan (%)		0,96			-1,99			-2,35		
Jun'17 thd Jun'16										

Keterangan: Premium: Maksimum beras patah (*Broken*) s.d. 10%
Medium: Beras patah (*Broken*) 10,1% - 20%
Rendah: Beras patah (*Broken*) 20,1% - 25%

B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

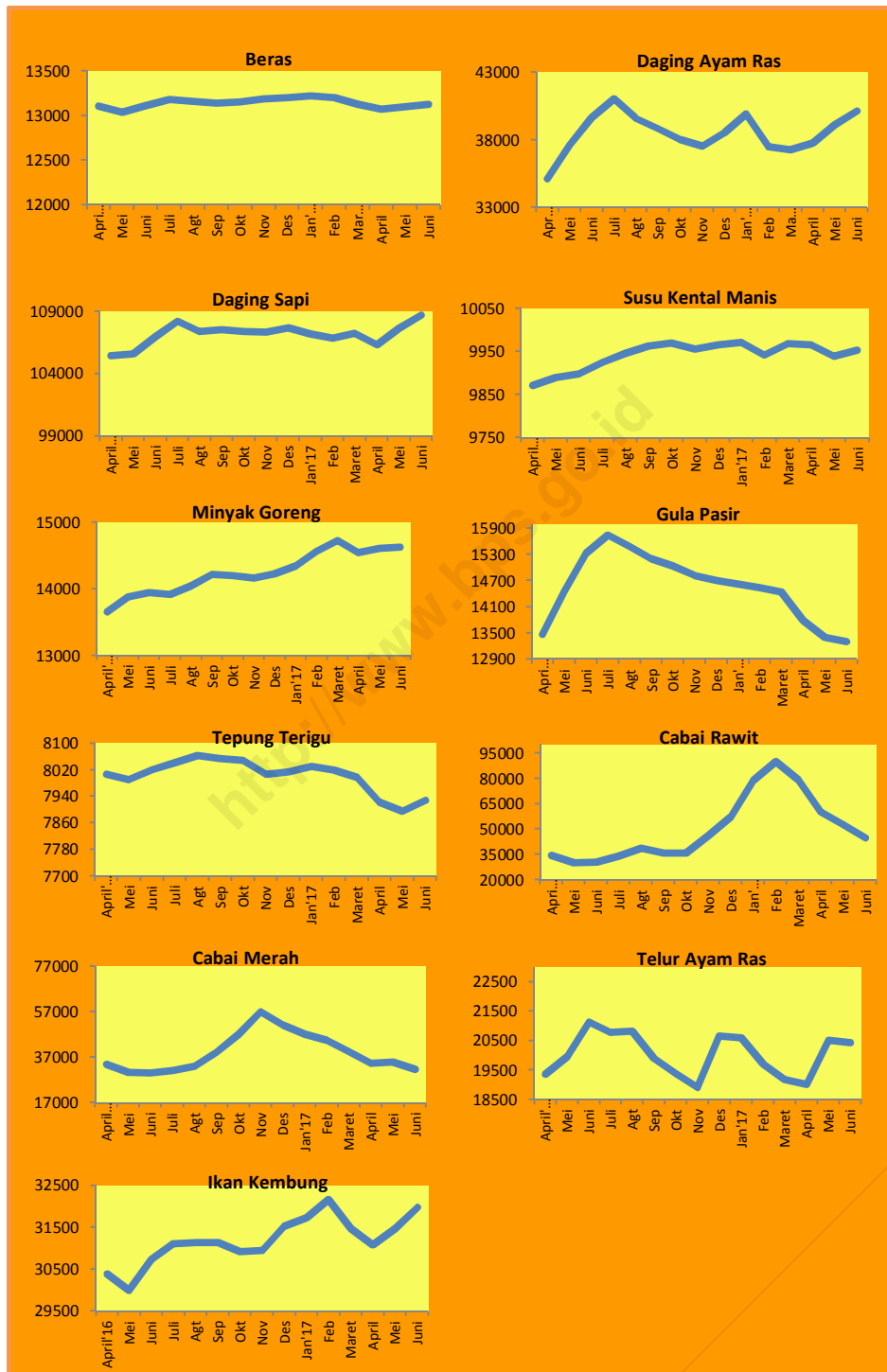
1. Secara nasional, rata-rata harga beras pada Juni 2017 naik 0,22 persen dibanding Mei 2017. Dibandingkan Juni 2016, harga beras naik 0,08 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 4,37 persen. Artinya, pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami penurunan nilai riil sebesar 4,29 persen. Kenaikan tertinggi terjadi di Manado, Serang, Pare-pare (3 persen); Cilacap dan Bengkulu (2 persen).
2. Harga daging ayam ras naik 2,53 persen dibanding Mei 2017 atau naik 1,23 persen dibanding Juni 2016. Kenaikan tertinggi terjadi Tanjung Pandan (39 persen) dan Kupang (37 persen). Harga ikan kembung naik 1,58 persen dibanding Mei 2017 atau naik 4,05 persen dibanding Juni 2016. Kenaikan tertinggi terjadi di Tual (26 persen) dan Bau-bau (19 persen). Harga daging sapi naik 1,01 persen dibanding Mei 2017 atau naik 1,63 persen dibanding Juni 2016. Kenaikan tertinggi terjadi di Madiun (11 persen) dan Tanjung Pandan (9 persen). Sedangkan harga cabai rawit turun 14,71 persen dibanding Mei 2017 atau naik 47,97 persen dibanding Juni 2016. Penurunan tertinggi terjadi di Bima (56 persen) dan Kupang (50 persen). Harga cabai merah turun 9,27 persen dibanding Mei 2017 atau naik 5,66 persen dibanding Juni 2016. Penurunan tertinggi terjadi di Merauke (38 persen) dan Meulaboh (37 persen).
3. Komoditas lain seperti tepung terigu, susu kental manis, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir perubahannya relatif rendah.

Rata-rata harga beras Juni 2017 sebesar Rp13.125 per kg, naik 0,22 persen

Tabel 7.4
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Juni 2016–Juni 2017 (rupiah)

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Daging Sapi (kg)	Susu Kental Manis (385 gram)	Minyak Goreng (liter)	Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Juni'16	13 115	39 635	106 986	9 898	13 941	15 327	8 019	30 339	30 031	21 135	30 727
Juli	13 181	41 034	108 256	9 925	13 919	15 745	8 042	34 004	31 160	20 786	31 105
Agustus	13 157	39 606	107 393	9 946	14 041	15 490	8 064	38 805	32 955	20 815	31 136
September	13 140	38 830	107 576	9 962	14 222	15 211	8 054	35 790	39 151	19 897	31 133
Oktober	13 153	38 015	107 425	9 969	14 198	15 039	8 048	35 704	47 095	19 374	30 918
November	13 185	37 547	107 361	9 956	14 164	14 822	8 006	46 083	57 079	18 909	30 952
Desember	13 201	38 538	107 694	9 966	14 232	14 709	8 014	57 479	51 291	20 654	31 534
Januari'17	13 222	39 906	107 199	9 971	14 349	14 628	8 030	78 947	47 172	20 590	31 730
Februari	13 202	37 480	106 877	9 941	14 567	14 546	8 020	89 763	44 464	19 703	32 168
Maret	13 125	37 285	107 251	9 968	14 730	14 441	7 998	79 117	39 551	19 181	31 476
April	13 074	37 777	106 329	9 965	14 546	13 791	7 922	60 335	34 429	19 008	31 079
Mei	13 096	39 133	107 647	9 939	14 610	13 402	7 895	52 636	34 973	20 515	31 474
Juni	13 125	40 123	108 734	9 952	14 629	13 306	7 929	44 893	31 731	20 439	31 971
Juni'17 thd April'17	0,22	2,53	1,01	0,13	0,13	-0,72	0,43	-14,71	-9,27	-0,37	1,58
Juni'17 thd Juni'16 (dalam persen)	0,08	1,23	1,63	0,55	4,94	-13,19	-1,12	47,97	5,66	-3,29	4,05

Grafik 7.3
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Juni 2016–Juni 2017 (rupiah)



VIII. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN I-2017 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR MEI 2017

A. INDEKS HARGA PRODUSEN

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan dari Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan pada triwulan I-2017 sebesar 133,86. Pada triwulan I-2017, IHP gabungan tersebut mengalami kenaikan sebesar

**Pada triwulan I-2017 terjadi
inflasi harga produsen sebesar
1,13 persen**

1,13 persen dibandingkan IHP triwulan IV-2016 sebesar 132,36 (*q-to-q*). Hal ini dipengaruhi oleh IHP Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan yang mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,33 persen, 1,48 persen dan 1,03 persen. IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas triwulan I-2017 sebesar 132,30 naik 0,11 persen dibandingkan dengan IHP triwulan IV-2016 sebesar 132,15 (*q-to-q*). Demikian pula dengan IHP Sektor Pengelolaan Air triwulan I-2017 sebesar 119,51 naik sebesar 0,50 persen dibandingkan dengan IHP triwulan IV-2016 sebesar 118,92 (*q-to-q*). Adapun IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan I-2017 sebesar 126,04 naik 0,56 persen dibandingkan IHP triwulan IV-2016 sebesar 125,34 (*q-to-q*). Sedangkan IHP Sektor Angkutan Penumpang triwulan I-2017 sebesar 210,12 turun 3,66 persen dibandingkan dengan IHP triwulan IV-2016 sebesar 218,09 (*q-to-q*). Perubahan IHP gabungan triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 (*y-on-y*) sebesar 4,05 persen, yaitu dari 128,64 pada triwulan I-2016 menjadi 133,86 pada triwulan I-2017. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh naiknya indeks atau inflasi harga produsen pada semua sektor, yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 1,46 persen, 24,02 persen dan 2,48 persen. IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 2,07 persen, yaitu dari 129,61 pada triwulan I-2016 menjadi 132,30 pada triwulan I-2017. Sedangkan IHP Sektor Pengelolaan Air naik sebesar 0,51 persen, yaitu dari 118,91 pada triwulan I-2016 (*y-on-y*) menjadi 119,51 pada triwulan I-2017. Sebaliknya, Sektor Angkutan Penumpang mengalami penurunan 0,56 persen, yaitu dari 211,31 pada triwulan I-2016 (*y-on-y*) menjadi 210,12 pada triwulan I-2017. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan IV-2016 terhadap triwulan I-2016 (*y-*

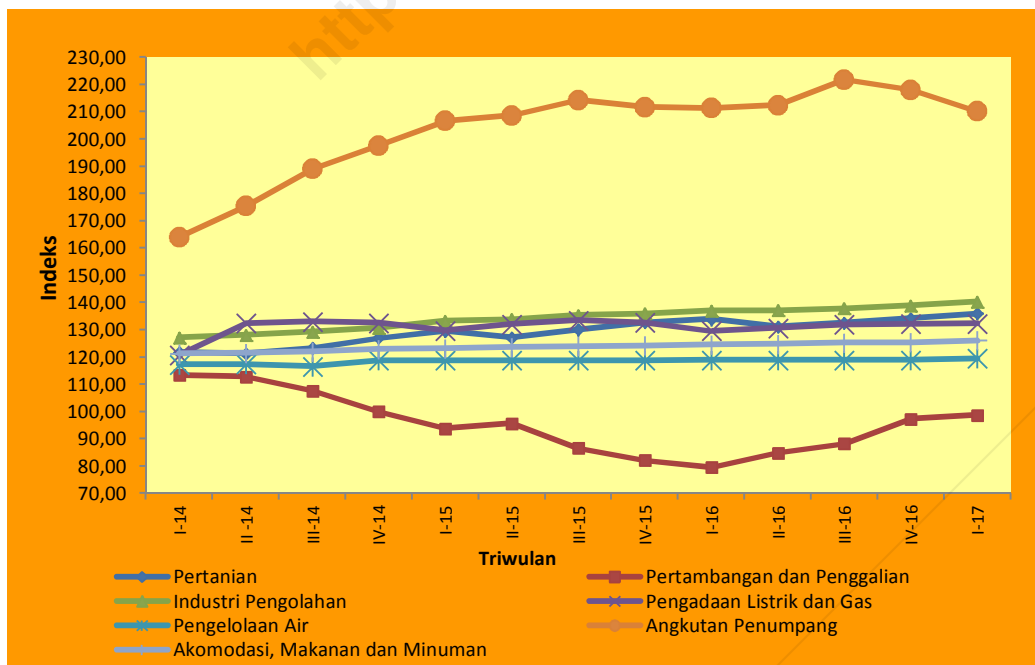
on-y) mengalami kenaikan sebesar 1,20 persen, yaitu dari 124,55 pada triwulan I-2016 menjadi 126,04 pada triwulan I-2017.

Tabel 8.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor
Triwulan I-2017

Sektor	IHP Triw I- 2016	IHP Triw IV- 2016	IHP Triw I- 2017	Inflasi Harga Produsen (q-to-q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ²⁾ (%)	
				Triw IV- 2016	Triw I- 2017	Triw I- 2016	Triw I- 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gabungan (1+2+3)	128,64	132,36	133,86	1,77	1,13	1,16	4,05
1. Pertanian	133,96	134,13	135,92	1,20	1,33	3,49	1,46
2. Pertambangan dan Penggalian	79,59	97,26	98,70	10,28	1,48	-15,12	24,02
3. Industri Pengolahan	136,95	138,92	140,34	0,84	1,03	2,79	2,48
4. Pengadaan Listrik dan Gas	129,61	132,15	132,30	0,17	0,11	-0,06	2,07
5. Pengelolaan Air	118,91	118,92	119,51	0,01	0,50	0,11	0,51
6. Angkutan Penumpang	211,31	218,09	210,12	-1,65	-3,66	2,23	-0,56
7. Akomodasi, Makanan dan Minuman	124,55	125,34	126,04	0,06	0,56	1,15	1,20

Keterangan: 1). Inflasi Produsen (q-to-q) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t terhadap Triwulan t-1
2). Inflasi Produsen (y-on-y) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t-2017 terhadap Triwulan t-2016

Grafik 8.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor
Triwulan I-2014 s.d. Triwulan I-2017



1. Sektor Pertanian

IHP Sektor Pertanian pada triwulan I-2017 naik 1,33 persen (*q-to-q*), yaitu dari 134,13 pada triwulan IV-2016 menjadi 135,92 pada triwulan I-2017. Inflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh naiknya IHP di semua subsektor yaitu Subsektor Perkebunan (4,90 persen), Subsektor Perikanan (1,37 persen), Subsektor Tanaman Bahan Makanan (0,44 persen), Subsektor Peternakan (0,23 persen), dan Subsektor Kehutanan (0,08 persen). Apabila dibandingkan dengan triwulan I-2016, Sektor Pertanian pada triwulan I-2017 mengalami inflasi harga produsen (*y-on-y*) sebesar 1,46 persen, yaitu dari 133,96 pada triwulan I-2016 menjadi 135,92 pada triwulan I-2017. Subsektor Perkebunan merupakan penyebab utama kenaikan IHP pada periode tersebut yaitu sebesar 11,29 persen, diikuti oleh Subsektor Perikanan sebesar 3,50 persen dan Subsektor Peternakan sebesar 3,00 persen. Sedangkan untuk Subsektor Tanaman Bahan Makanan mengalami deflasi sebesar 3,37 persen.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I-2017 sebesar 98,70 mengalami kenaikan sebesar 1,48 persen dibandingkan IHP pada triwulan IV-2016 sebesar 97,26 (*q-to-q*). Inflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh naiknya Subsektor Pertambangan sebesar 2,12 persen. Sedangkan Subsektor Penggalian mengalami penurunan sebesar 0,87 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Demikian pula terhadap triwulan I-2016 (*y-on-y*), IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian triwulan I-2017 mengalami kenaikan sebesar 24,02 persen, yaitu dari 79,59 pada triwulan I-2016 menjadi 98,70 pada triwulan I-2017. Inflasi harga produsen (*y-on-y*) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh naiknya IHP Subsektor Pertambangan sebesar 33,78 persen.

3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan I-2017, IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 138,92 pada triwulan IV-2016 menjadi 140,34 pada triwulan I-2017 (*q-to-q*). Tiga subsektor pada Sektor Industri Pengolahan yang mengalami inflasi tinggi adalah Subsektor Industri Karet, Plastik dan hasil-hasilnya (6,13 persen); Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (2,36 persen); dan Subsektor Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan (1,79 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi antara lain Subsektor Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki (0,81 persen), Industri Kimia Dasar, Bahan

Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (0,63 persen) dan Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak (0,44 persen). Dibandingkan triwulan I-2016, IHP Sektor Industri Pengolahan pada triwulan I-2017 (*y-on-y*) mengalami kenaikan (2,48 persen) dari 136,95 menjadi 140,34. Penyebab kenaikan IHP terutama terjadi pada Subsektor Industri Karet, Plastik dan hasil-hasilnya (9,45 persen); Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (8,09 persen); dan Subsektor Industri Minuman dan Rokok (4,92 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi adalah Subsektor Industri Pupuk (3,26 persen); Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak (1,36 persen); Subsektor Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (1,16 persen); dan Subsektor Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki (0,21 persen).

4. Sektor Pengadaan listrik dan Gas

IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada triwulan I-2017 (*q-to-q*) sebesar 132,30 mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen terhadap triwulan IV-2016 yang sebesar 132,15. Inflasi Harga Produsen pada sektor ini disebabkan oleh naiknya Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 0,12 persen. Sedangkan terhadap triwulan I-2016, IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami inflasi sebesar 2,07 persen, yaitu dari 129,61 pada triwulan I-2016 menjadi 132,30 pada triwulan I-2017 (*y-on-y*). Inflasi Harga Produsen terjadi di Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 2,35 persen.

5. Sektor Pengelolaan Air

IHP Sektor Pengelolaan Air pada Triwulan I-2017 sebesar 119,51 mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen terhadap triwulan IV-2016 yaitu sebesar 118,92 (*q-to-q*). Demikian juga terhadap triwulan I-2016 naik 0,51 persen yaitu dari 118,91 di triwulan I-2016 menjadi 119,51 di triwulan I-2017 (*y-on-y*).

6. Sektor Angkutan Penumpang

IHP Sektor Angkutan penumpang pada triwulan I-2017 sebesar 210,12 mengalami deflasi sebesar 3,66 persen dibandingkan IHP triwulan sebelumnya yang sebesar 218,09 (*q-to-q*). Deflasi Harga Produsen pada sektor ini disebabkan oleh turunnya IHP pada Subsektor Angkutan Udara Penumpang (6,17 persen), Angkutan Kereta Api Penumpang (0,47 persen), dan Subsektor Angkutan Laut Penumpang (0,45 persen). Sedangkan Subsektor Angkutan Darat Penumpang mengalami inflasi sebesar 0,04 persen. IHP Sektor Angkutan penumpang triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 (*y-on-y*) turun sebesar 0,56 persen, yaitu dari 211,31 menjadi

210,12. Hal ini diakibatkan terutama oleh deflasi Harga Produsen Subsektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Penumpang (1,67 persen) dan Subsektor Angkutan Udara Penumpang (1,31 persen).

7. Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman pada triwulan I-2017 sebesar 126,04 mengalami kenaikan 0,56 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 125,34 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan IHP Subsektor Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar 0,62 persen dan Subsektor Penyediaan Akomodasi sebesar 0,10 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 (*y-on-y*) naik sebesar 1,20 persen, yaitu dari 124,55 menjadi 126,04. Hal ini diakibatkan oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makanan dan Minuman masing-masing sebesar 1,38 persen dan 1,16 persen.

Tabel 8.2
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor
Triwulan I-2017

Sektor/Subsektor	IHP Triw I- 2016	IHP Triw IV- 2016	IHP Triw I- 2017	Inflasi Harga Produsen (q- to-q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ²⁾ (%)	
				Triw IV- 2016	Triw I- 2017	Triw I- 2016	Triw I- 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	133,96	134,13	135,92	1,20	1,33	3,49	1,46
1. Tanaman Bahan Makanan	145,93	140,40	141,02	1,24	0,44	5,27	-3,37
2. Perkebunan	117,08	124,21	130,30	3,22	4,90	-2,14	11,29
3. Peternakan	127,76	131,30	131,60	-0,05	0,23	5,23	3,00
4. Perikanan	126,97	129,63	131,41	0,60	1,37	2,59	3,50
5. Kehutanan	141,85	144,71	144,82	-0,15	0,08	4,98	2,10
Pertambangan dan Penggalian	79,59	97,26	98,70	10,28	1,48	-15,12	24,02
1. Pertambangan	69,06	90,46	92,38	14,27	2,12	-19,93	33,78
2. Penggalian	135,81	133,60	132,43	-2,08	-0,87	1,42	-2,49
Industri Pengolahan	136,95	138,92	140,34	0,84	1,03	2,79	2,48
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	145,94	154,10	157,74	1,80	2,36	6,61	8,09
2. Industri Susu dan Makanan Dari Susu	116,41	117,14	117,93	0,47	0,68	2,40	1,31
3. Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	152,51	151,10	150,43	0,35	-0,44	6,11	-1,36
4. Industri Makanan Lainnya	132,09	135,56	136,94	0,62	1,02	4,00	3,67
5. Industri Minuman dan Rokok	140,14	144,62	147,03	0,84	1,67	5,50	4,92
6. Industri Pemintalan dan Pertununan Tekstil	132,12	135,29	136,85	0,42	1,15	4,85	3,58
7. Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki	154,25	155,18	153,92	-0,70	-0,81	3,76	-0,21
8. Industri Kayu Gergajian dan Olahan	158,39	158,87	159,94	0,66	0,67	1,35	0,98
9. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan	131,84	134,72	137,13	2,17	1,79	0,46	4,01
10. Industri Pupuk	128,78	122,64	124,59	2,26	1,59	-0,63	-3,26
11. Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	144,41	143,64	142,74	-0,09	-0,63	0,43	-1,16
12. Pengilangan Minyak Bumi dan Gas	124,43	124,96	126,11	1,09	0,92	-1,91	1,35
13. Industri Karet, Plastik, dan Hasil-Hasilnya	113,90	117,47	124,67	2,35	6,13	-0,07	9,45
14. Industri Barang Mineral Bukan Logam	142,86	143,31	144,69	0,93	0,96	1,05	1,28
15. Industri Logam Dasar	109,74	111,14	113,10	0,66	1,76	-2,98	3,07
16. Industri Barang-Barang dari Logam	119,04	120,56	122,44	1,25	1,56	0,26	2,85
17. Industri Mesin, Listrik, Elektronik, dan Perlengkapannya	139,17	140,39	141,03	1,15	0,45	3,41	1,33
18. Industri Alat Angkutan	131,50	133,12	133,24	0,08	0,10	3,00	1,33
19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Barang Lainnya	148,51	148,95	149,77	0,10	0,55	3,35	0,85
Pengadaan Listrik dan Gas	129,61	132,15	132,30	0,17	0,11	-0,06	2,07
1. Ketenagalistrikan	124,23	126,99	127,15	0,19	0,12	-0,50	2,35
2. Pengadaan Gas	191,96	191,96	191,96	0,00	0,00	3,32	0,00

Sektor/Subsektor	IHP Triw I- 2016	IHP Triw IV- 2016	IHP Triw I- 2017	Inflasi Harga Produsen (q - to - q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y - on - y) ²⁾ (%)	
				Triw IV- 2016	Triw I- 2017	Triw I- 2016	Triw I- 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengelolaan Air	118,91	118,92	119,51	0,01	0,50	0,11	0,51
Angkutan Penumpang	211,31	218,09	210,12	-1,65	-3,66	2,23	-0,56
1. Angkutan Kereta Api Penumpang	181,43	187,16	186,28	-2,78	-0,47	0,63	2,67
2. Angkutan Darat Penumpang	151,48	152,23	152,29	-1,75	0,04	1,24	0,53
3. Angkutan Laut Penumpang	109,43	110,20	109,71	-2,11	-0,45	0,00	0,26
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Penumpang	159,59	156,93	156,93	-4,42	0,00	-0,69	-1,67
5. Angkutan Udara Penumpang	299,26	314,76	295,33	-1,44	-6,17	3,09	-1,31
Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	124,55	125,34	126,04	0,06	0,56	1,15	1,20
1. Akomodasi	139,32	141,11	141,25	0,49	0,10	0,86	1,38
2. Makanan dan Minuman	122,38	123,04	123,81	0,00	0,62	1,20	1,16

Keterangan: 1) Inflasi Produsen (q - to - q) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t terhadap Triwulan $t-1$

2) Inflasi Produsen (y - on - y) adalah persentase perubahan IHP Triwulan $t-2017$ terhadap Triwulan $t-2016$

B. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR (IHPB)

- Pada Bulan Juni 2017, IHPB Umum Nonmigas turun sebesar 0,07 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada Kelompok Barang Ekspor yaitu sebesar 0,75 persen. Sektor Pertanian naik sebesar 0,03 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian naik sebesar 0,06 persen, Sektor Industri naik sebesar 0,08 persen, serta Kelompok Barang Impor Nonmigas naik sebesar 0,03 persen.

Pada Juni 2017 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas turun sebesar 0,07 persen

Pada Mei 2017 IHPB Umum turun sebesar 0,28 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Penurunan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 1,44 persen serta penurunan terendah Kelompok Barang Ekspor yaitu sebesar 0,81 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian naik sebesar 0,24 persen, Sektor Industri naik sebesar 0,21 persen, sedangkan Kelompok Barang Impor naik sebesar 0,26 persen

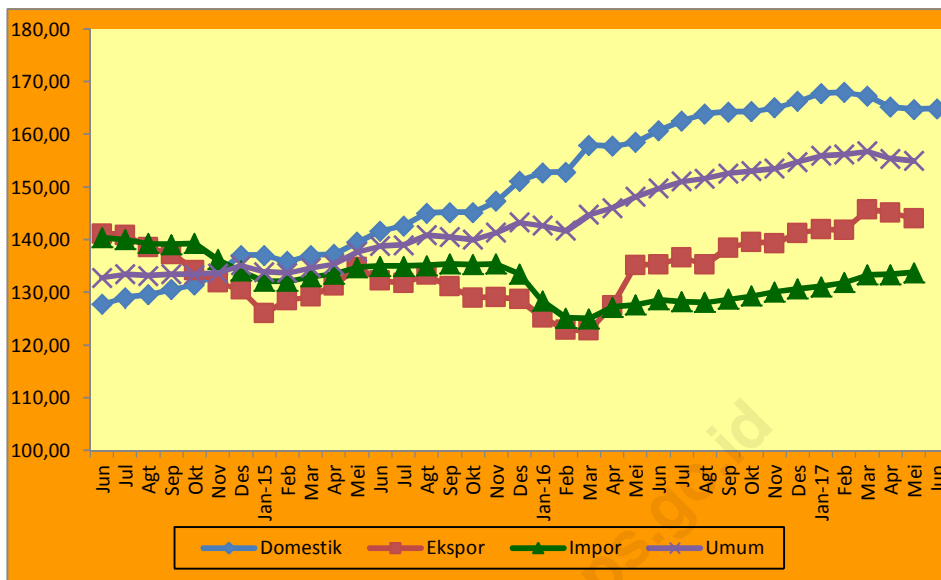
Tabel 8.3
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia
April–Juni 2017, (2010=100)

Sektor/Kelompok	April	Mei	Juni	Perubahan	
				Mei terhadap April (%)	Juni terhadap Mei (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	368,43	363,12	363,23	-1,44	0,03
2. Pertambangan dan Penggalian	121,19	121,48	121,55	0,24	0,06
3. Industri	137,83	138,11	138,23	0,21	0,08
Domestik	165,19	164,79	164,90	-0,24	0,07
4. Impor Nonmigas	138,86	139,17	139,21	0,22	0,03
Impor	133,41	133,76		0,26	
5. Ekspor Nonmigas	154,30	152,90	151,75	-0,91	-0,75
Ekspor	145,22	144,04		-0,81	
Umum Nonmigas	159,28	158,81	158,69	-0,29	-0,07
Umum	155,42	154,99		-0,28	

Tabel 8.4
Tingkat Inflasi Perdagangan Besar Juni 2017 (2010=100)

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan Juni terhadap Mei	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	Juni 2016	Desember 2016	Mei 2017	Juni 2017		Tahun Kalender	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	358,46	383,96	363,12	363,23	0,03	-5,40	1,33
2. Pertambangan dan Penggalian	116,44	120,32	121,48	121,55	0,06	1,03	4,39
3. Industri	134,28	136,93	138,11	138,23	0,08	0,95	2,94
4. Impor Nonmigas	136,32	136,82	139,17	139,21	0,03	1,75	2,12
5. Ekspor Nonmigas	148,23	148,94	152,90	151,75	-0,75	1,89	2,38
Umum Nonmigas	154,86	158,78	158,81	158,69	-0,07	-0,06	2,47

Grafik 8.2
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Juni 2014–Juni 2017



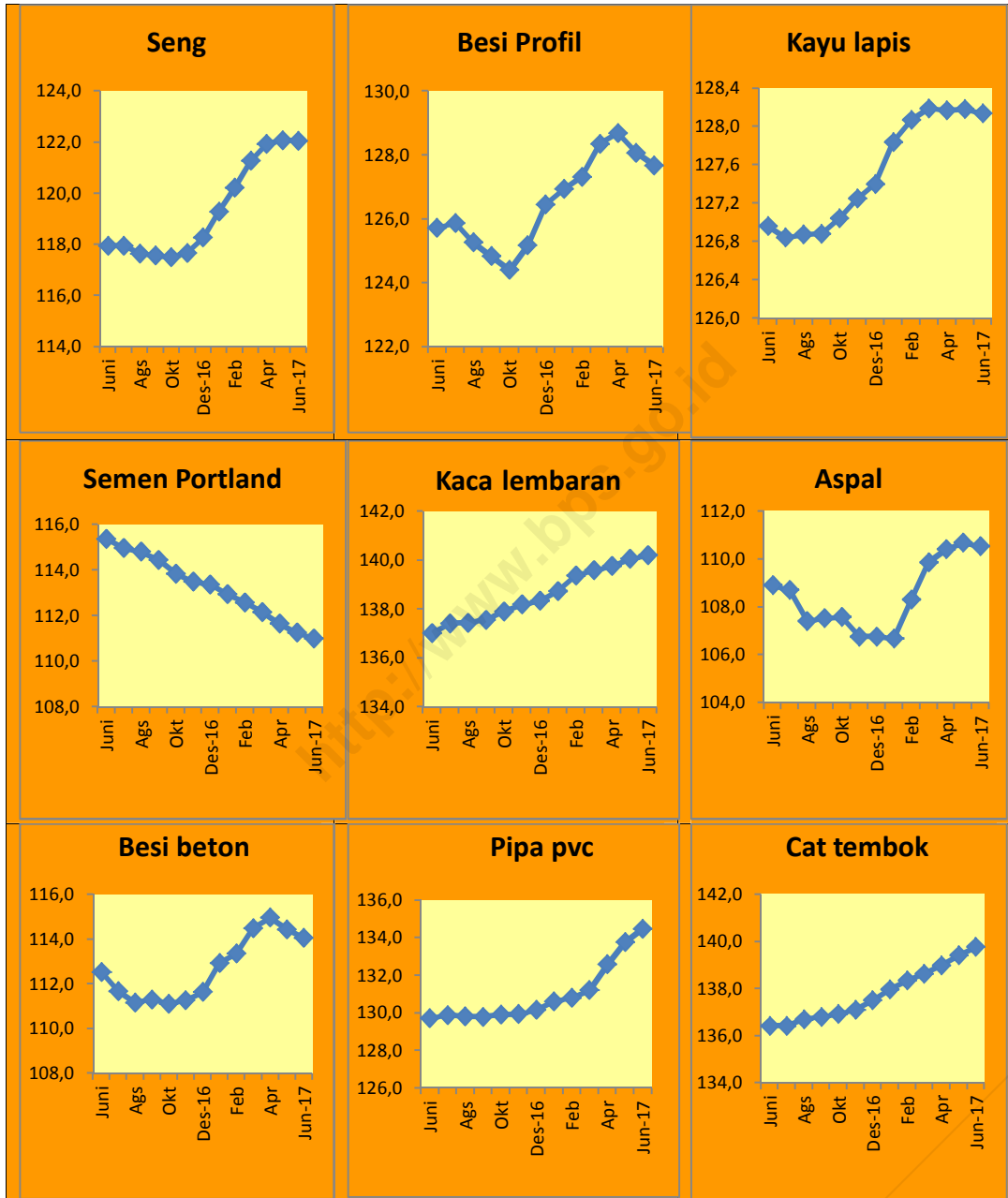
2. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada Juni 2017 naik sebesar 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi sebesar 0,37 persen.

Tabel 8.5
Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia Juni 2017
Menurut Jenis Bangunan (2010=100)

Jenis Bangunan	Juni 2016	Desember 2016	Mei 2017	Juni 2017	Perubahan Juni terhadap Mei	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2017	Year- on- Year
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	132,15	132,97	134,66	134,81	0,11	1,38	2,01
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	128,76	130,11	131,85	132,08	0,17	1,51	2,58
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	125,02	125,95	128,53	128,67	0,11	2,16	2,92
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	130,35	131,11	132,81	133,30	0,37	1,67	2,26
Bangunan Lainnya	128,02	128,78	129,37	129,47	0,08	0,54	1,14
Konstruksi Indonesia	129,78	130,64	132,46	132,66	0,15	1,55	2,22

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (aspal, semen, kayu lapis, besi profil, dan besi beton) pada Juni 2017 turun dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada besi beton sebesar 0,34 persen dan terkecil terjadi pada kayu lapis sebesar 0,04 persen. Besi profil turun sebesar 0,31 persen, semen turun sebesar 0,24 persen, dan aspal turun sebesar 0,13 persen. Pipa pvc naik sebesar 0,53 persen, cat tembok naik sebesar 0,25 persen, sedangkan kaca lembaran naik sebesar 0,11 persen. Seng lembaran relatif stabil.

Grafik 8.3
Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Juni 2016–Juni 2017



IX. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULAN I-2017

A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

A.1. ITB TRIWULAN I-2017

1. Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan I-2017 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan I-2017 sebesar 103,42. Namun, optimisme pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan ini lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada triwulan IV-2016 (nilai ITB sebesar 106,70)
2. Pada triwulan I-2017, tercatat 12 kategori lapangan usaha mengalami peningkatan kondisi bisnis, empat kategori mengalami penurunan, dan satu kategori relatif stagnan. Peningkatan kondisi bisnis tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai ITB sebesar 127,31. Sementara itu, penurunan kondisi bisnis terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai ITB sebesar 92,00. Kategori lapangan usaha Transportasi & Pergudangan mengalami kondisi bisnis yang relatif stagnan, dengan capaian nilai ITB sebesar 99,63.
3. Berdasarkan variabel pembentuknya, kondisi bisnis pada triwulan I-2017 yang meningkat disebabkan oleh capaian ketiga komponen, yaitu penggunaan kapasitas produksi/usaha dengan capaian nilai indeks sebesar 104,60, pendapatan usaha dengan capaian nilai indeks sebesar 104,54, dan rata-rata jumlah jam kerja dengan capaian nilai indeks sebesar 101,13.

Kondisi bisnis triwulan I-2017 meningkat (ITB 103,42) namun optimisme pelaku bisnis menurun dibandingkan triwulan IV-2016

Tabel 9.1
Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2017
Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan I-2017			ITB Triwulan I-2017
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-Rata Jumlah Jam Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	101,06	101,06	-	101,06
2. Pertambangan dan Penggalian	102,96	101,78	100,59	101,78
3. Industri Pengolahan	101,20	101,71	101,91	101,61
4. Pengadaan Listrik dan Gas	123,58	125,47	106,60	118,55
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	128,79	110,61	98,48	112,63
6. Konstruksi	99,08	96,62	90,46	95,38
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	103,97	101,72	99,87	101,85
8. Transportasi dan Pergudangan	90,11	101,10	107,69	99,63
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	104,60	103,07	103,07	103,58
10. Informasi dan Komunikasi	101,25	110,63	101,88	104,58
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	142,17	132,53	107,23	127,31
12. Real Estat	108,70	101,45	101,45	103,86
13. Jasa Perusahaan	103,86	109,87	102,58	105,44
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	81,82	102,27	104,55	96,21
15. Jasa Pendidikan	95,45	96,10	99,35	96,97
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91,00	98,00	87,00	92,00
17. Jasa Lainnya	102,27	103,79	104,55	103,54
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	104,54	104,60	101,13	103,42

A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN II-2017

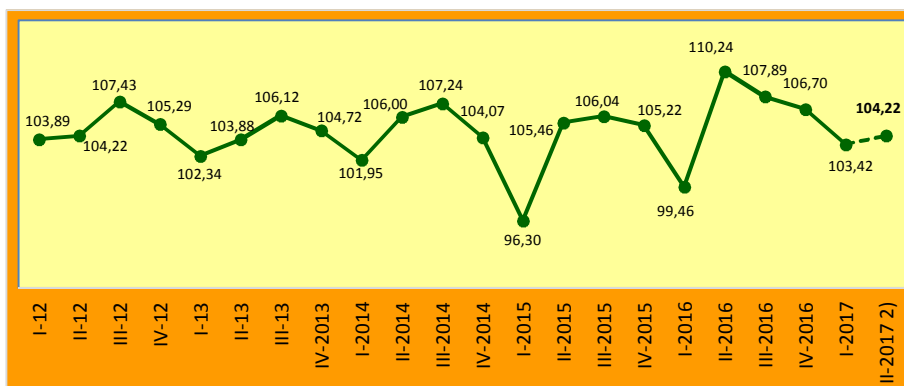
1. Nilai ITB triwulan II-2017 diperkirakan sebesar 104,22. Dengan demikian, secara umum kondisi bisnis pada triwulan II-2017 diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan triwulan I-2017. Tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis pada triwulan II-2017 juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2017 (nilai ITB sebesar 103,42).
2. Pada triwulan II-2017 kondisi bisnis di 15 kategori lapangan usaha diperkirakan mengalami peningkatan, sementara dua kategori mengalami penurunan. Peningkatan kondisi bisnis tertinggi diperkirakan terjadi pada kategori Transportasi dan Pergudangan dengan nilai ITB sebesar 125,27, sedangkan capaian terendah diperkirakan terjadi pada kategori Konstruksi dengan nilai ITB sebesar 87,95.

Kondisi bisnis pada triwulan II-2017 diprediksi meningkat (ITB 104,22). Optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih tinggi dibanding

Tabel 9.2
Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2017
Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan II-2017				Perkiraan ITB Triwulan II-2017
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri	Harga Jual Produk	Order Barang Input	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	104,58	100,70	109,86	-	105,05
2. Pertambangan dan Penggalian	97,63	115,38	110,06	99,41	105,62
3. Industri Pengolahan	99,90	98,90	113,96	98,85	102,90
4. Pengadaan Listrik dan Gas	124,53	-	132,08	100,47	119,03
5. Pengadaan Air	113,64	-	101,52	102,27	105,81
6. Konstruksi	79,08	-	109,85	74,92	87,95
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	94,30	97,22	129,93	96,56	104,50
8. Transportasi dan Pergudangan	141,76	-	108,79	-	125,27
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,39	-	106,14	-	117,26
10. Informasi dan Komunikasi	105,63	-	112,50	-	109,06
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	134,34	-	93,07	-	113,70
12. Real Estat	107,25	-	102,90	-	105,07
13. Jasa Perusahaan	95,28	-	109,01	-	102,15
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	127,27	-	95,45	-	111,36
15. Jasa Pendidikan	119,48	-	104,55	-	112,01
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,00	-	112,00	-	120,00
17. Jasa Lainnya	90,15	-	106,82	-	98,48
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	107,06	99,96	112,29	97,58	104,22

Grafik 9.1
Indeks Tendensi Bisnis¹⁾ Triwulan IV-2011–Triwulan IV-2016 dan
Perkiraan Triwulan I-2017²⁾



Keterangan:

¹⁾ ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.

Angka perkiraan ITB triwulan II-2017

B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

B.1. ITK TRIWULAN I-2017

1. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan I-2017 sebesar 102,27 menunjukkan kondisi ekonomi konsumen meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume konsumsi rumah tangga dengan nilai indeks sebesar 107,75. Daya

Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2017 meningkat (ITK 102,27), namun optimisme konsumen relatif sama dibandingkan triwulan IV-2016

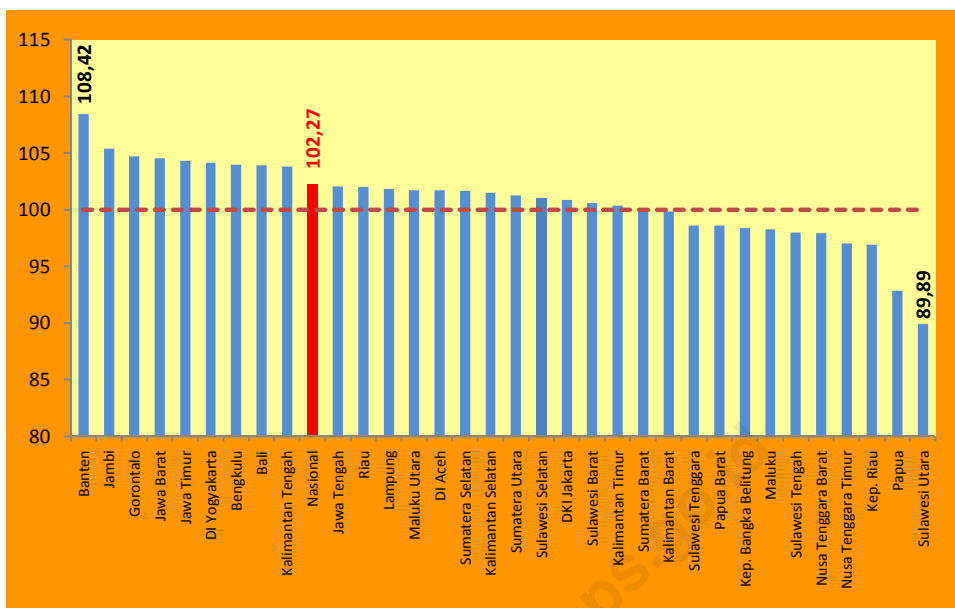
beli konsumen yang dilihat dari indeks pengaruh inflasi terhadap pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi selama triwulan I-2017 tidak terlalu berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga, dengan nilai indeks sebesar 101,60. Sementara itu, pendapatan rumah tangga tidak menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya, dengan nilai indeks sebesar 100,33.

2. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan I-2017 di tingkat regional disebabkan oleh peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 18 provinsi di Indonesia. Tercatat sembilan provinsi (27,27 persen) yang memiliki angka indeks di atas nasional. Provinsi Banten memiliki nilai ITK triwulan I-2017 tertinggi dengan nilai ITK mencapai 108,42. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai ITK triwulan I-2017 terendah, yakni sebesar 89,89.

Tabel 9.3
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2016 dan Triwulan I-2017
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	ITK Triw IV-2016	ITK Triw I-2017
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	103,89	100,33
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	98,72	101,60
Volume konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	103,81	107,75
Indeks Tendensi Konsumen	102,46	102,27

Grafik 9.2
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2017
Tingkat Nasional dan Provinsi



B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN I-2017

1. Nilai ITK nasional pada triwulan II-2017 diperkirakan sebesar 112,73. Dengan demikian, kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat. Tingkat optimisme konsumen diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan ITK triwulan I-2017 yang sebesar 102,27. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen

Kondisi ekonomi dan optimisme konsumen triwulan II-2017 diprediksi meningkat (ITK 112,73) dibanding triwulan I-2017

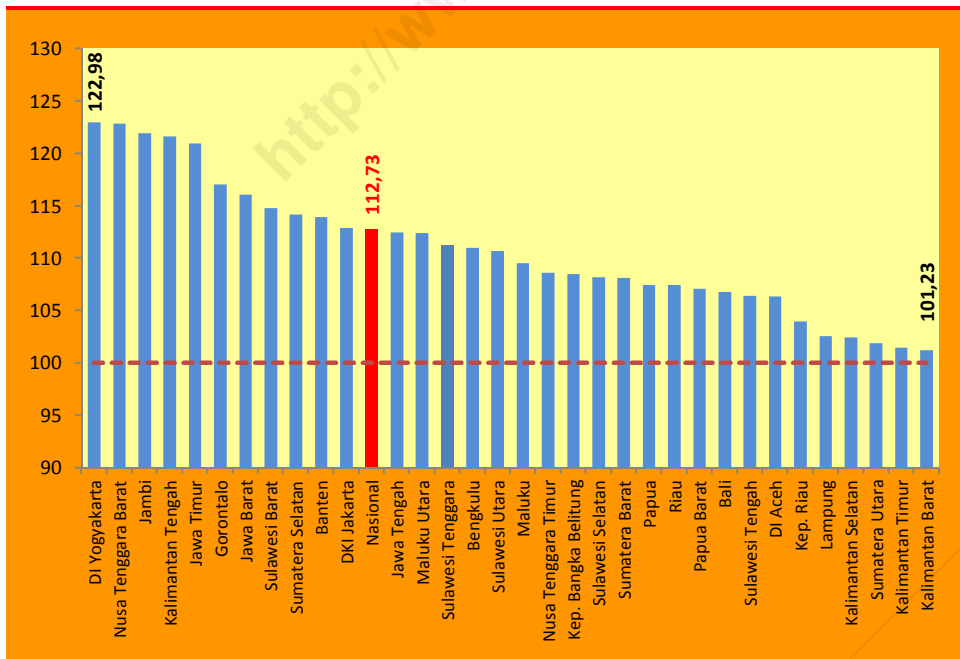
2. Perkiraan membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan II-2017 terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Tercatat 11 provinsi (33,33 persen) yang diperkirakan memiliki nilai indeks di atas nasional. Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat perkiraan nilai ITK triwulan II-2017 tertinggi, dengan nilai ITK sebesar 122,98. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai ITK sebesar 122,87 dan Provinsi Jambi dengan nilai ITK sebesar 121,96 menyusul di bawah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki perkiraan nilai ITK triwulan II-2017 terendah meliputi Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai ITK sebesar 101,23, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai ITK sebesar 101,49, dan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai ITK sebesar 101,91.

Tabel 9.4
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2017
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw II-2017
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	119,40
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	101,03
Indeks Tendensi Konsumen	112,73

Grafik 9.3
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2017
Tingkat Nasional dan Provinsi



Tabel 9.5
Indeks Tendensi Konsumen¹⁾ Triwulan I-2016–Triwulan II-2017²⁾
Tingkat Nasional dan Provinsi

No	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		I-2016	II-2016	III-2016	IV-2016	I-2017	II-2017 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	100,99	113,04	106,73	103,65	101,68	106,37
2.	Sumatera Utara	100,55	105,65	106,36	102,83	101,24	101,91
3.	Sumatera Barat	101,85	109,04	109,53	103,73	99,93	108,12
4.	R i a u	95,99	109,81	106,03	102,61	101,99	107,45
5.	J a m b i	100,53	106,97	114,22	100,83	105,37	121,96
6.	Sumatera Selatan	96,44	108,05	110,85	100,40	101,62	114,19
7.	Bengkulu	100,57	106,01	109,22	100,30	103,93	111,02
8.	Lampung	101,55	106,42	102,12	102,29	101,81	102,57
9.	Kep. Bangka Belitung	94,71	104,74	112,38	104,59	98,34	108,52
10.	Kep. R i a u	101,56	113,34	104,32	100,86	96,88	103,98
11.	DKI Jakarta	105,20	110,71	108,79	104,28	100,84	112,89
12.	Jawa Barat	104,03	107,28	108,27	101,59	104,50	116,05
13.	Jawa Tengah	100,28	106,66	109,16	99,93	102,05	112,50
14.	D.I. Yogyakarta	107,96	108,98	115,02	103,15	104,13	122,98
15.	Jawa Timur	105,38	108,42	108,23	103,34	104,30	120,94
16.	Banten	105,25	109,97	110,01	104,65	108,42	113,94
17.	B a l i	108,40	108,78	109,98	100,57	103,91	106,82
18.	Nusa Tenggara Barat	108,20	107,50	114,81	103,16	97,93	122,87
19.	Nusa Tenggara Timur	98,15	103,87	106,14	109,62	97,03	108,62
20.	Kalimantan Barat	104,15	105,80	103,71	95,07	99,82	101,23
21.	Kalimantan Tengah	103,04	106,22	101,13	101,92	103,81	121,64
22.	Kalimantan Selatan	99,34	103,00	100,21	99,09	101,45	102,45
23.	Kalimantan Timur	102,40	112,69	105,79	101,23	100,35	101,49
24.	Sulawesi Utara	96,08	102,14	103,46	106,15	89,89	110,68
25.	Sulawesi Tengah	107,58	105,34	104,50	103,06	97,96	106,43
26.	Sulawesi Selatan	101,91	106,83	107,09	102,43	101,02	108,22
27.	Sulawesi Tenggara	100,57	104,65	109,25	98,54	98,57	111,26
28.	Gorontalo	101,14	109,53	107,89	100,60	104,71	117,08
29.	Sulawesi Barat	105,58	110,20	111,00	104,44	100,58	114,81
30.	Maluku	109,96	113,17	110,89	111,57	98,26	109,53
31.	Maluku Utara	100,45	109,30	100,87	103,05	101,71	112,42
32.	Papua Barat	98,53	107,81	110,17	106,88	98,57	107,09
33.	Papua	99,78	109,20	112,09	112,47	92,84	107,49
	Indonesia	102,89	107,93	108,22	102,46	102,27	112,73

Keterangan:

¹⁾ ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

²⁾ Angka perkiraan ITK triwulan II-2017.

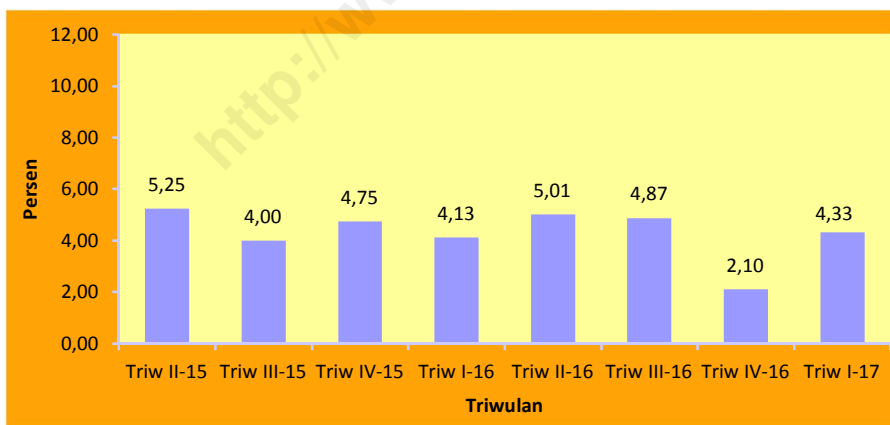
X. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN I-2017

A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

- Pertumbuhan IBS triwulan I-2017 naik sebesar 4,33 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2016, triwulan IV-2016 naik sebesar 2,10 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2015, triwulan III-2016 naik sebesar 4,87 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2015, triwulan II-2016 naik sebesar 5,01 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2015, triwulan I-2016 naik sebesar 4,13 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 4,75 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2014, triwulan III-2015 naik sebesar 4,00 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2014, dan triwulan II-2015 naik sebesar 5,25 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014.

Pertumbuhan produksi IBS triwulan I-2017 naik sebesar 4,33 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2016

Grafik 10.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*) Triwulan II-2015–Triwulan I-2017



- Pertumbuhan produksi IBS triwulan I-2017 turun naik 0,86 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2016, triwulan IV-2016 turun sebesar 0,30 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2016, triwulan III-2016 naik sebesar 0,70 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2016, triwulan II-2016 naik sebesar 3,02 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2016, triwulan I-2016 turun sebesar 1,29 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 2,41 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2015, dan triwulan III-2015 naik sebesar 0,83 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2015.

3. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan I-2017 (*y-on-y*) adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia naik sebesar 9,59 persen, industri makanan naik 8,20 persen, serta industri karet, barang dari karet dan plastik naik 7,80 persen.
4. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan I-2017 (*q-to-q*) adalah industri mesin dan perlengkapan ytdl naik 7,57 persen, industri karet, barang dari karet dan plastik naik 6,02 persen, dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya naik 3,79 persen..
5. Pertumbuhan produksi IBS *m-to-m* Februari 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,82 persen dan Maret 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,77 persen. Sementara pada Januari 2017 mengalami penurunan sebesar 0,92 persen.

Tabel 10.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2015–2017 (persen)
(2010=100)

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015	-0,70	2,16	0,83	2,41	5,06	5,25	4,00	4,75	4,76
2016	-1,29	3,02	0,70	-0,30	4,13	5,01	4,87	2,10	4,01
2017	0,86				4,33				

Tabel 10.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2015–2017 (persen)
(2010=100)

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	5,12	2,57	3,60 ^{*)}	-1,29	-0,27	-0,92 ^{*)}
Februari	2,63	7,38	3,83 ^{**)}	-2,97	1,58	1,82 ^{**)}
Maret	7,42	2,55	5,54 ^{***)}	4,84	0,13	1,77 ^{***)}
April	8,41	0,13		1,31	-1,08	
Mei	2,39	7,04		-3,21	3,47	
Juni	5,02	7,96		2,62	3,50	
Juli	4,41	8,77		-3,20	-2,47	
Agustus	5,73	6,07		3,93	1,35	
September	2,01	0,05		2,60	-3,23	
Oktober	6,20	0,06		1,35	1,37	
November	6,60	2,04		-1,74	0,20	
Desember	1,52	4,28		-2,26	-0,12	

Catatan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

****) Angka Sangat Sangat Sementara

Tabel 10.3
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan I-2017
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI (1)	Jenis Industri Manufaktur (2)	Pertumbuhan	
		q-to-q (3)	y-on-y (4)
10	Makanan	-0,01	8,20
11	Minuman	-4,36	-5,42
12	Pengolahan Tembakau	-4,63	-0,72
13	Tekstil	1,16	-6,87
14	Pakaian Jadi	-0,09	-3,79
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	-0,71	7,12
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	3,79	-4,49
17	Kertas dan Barang dari Kertas	0,65	4,96
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-1,40	3,80
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	0,12	9,59
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	2,50	6,29
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6,02	7,80
23	Barang Galian Bukan Logam	-1,88	3,82
24	Logam Dasar	0,25	-1,29
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2,20	0,09
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	1,22	2,84
27	Peralatan Listrik	-3,53	-2,20
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	7,57	4,87
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	1,47	0,20
30	Alat Angkutan Lainnya	-2,65	-2,45
31	Furnitur	0,98	0,72
32	Pengolahan Lainnya	-0,84	-3,47
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-1,34	-3,44
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		0,86	4,33

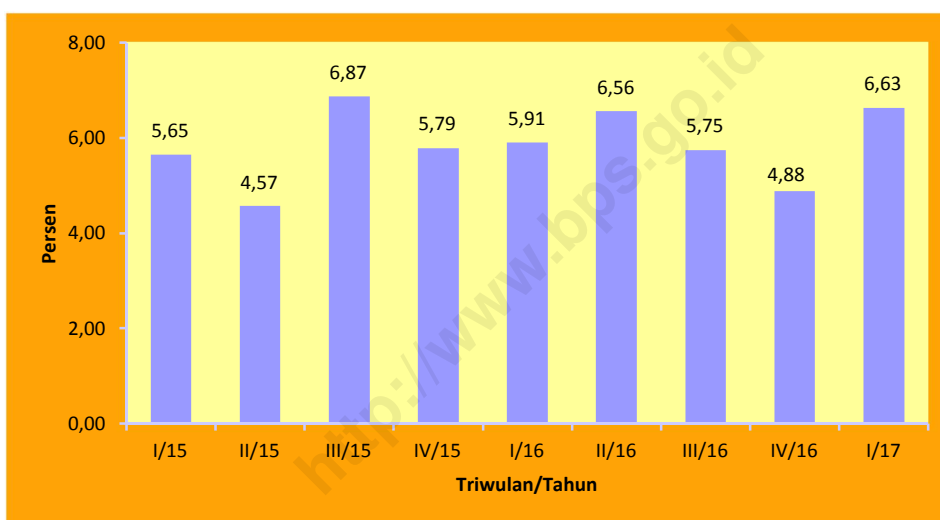
B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan I-2017 naik sebesar 6,63 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2016, triwulan IV-2016 naik sebesar 4,88 persen dari triwulan IV-2015, triwulan III-2016 naik sebesar 5,75 persen dari triwulan III-2015, triwulan II-2016 naik sebesar 6,56 persen dari triwulan II-2015.

**Pertumbuhan produksi
IMK triwulan I-2017 naik 6,63
persen dari triwulan I-2016**

Grafik 10.2

**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)
Triwulan I-2015–Triwulan I-2017**



2. Pertumbuhan Produksi IMK triwulan I-2017 naik 2,44 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2016, triwulan IV-2016 naik 0,51 persen dari triwulan III-2016, triwulan III-2016 turun 2,06 persen dari triwulan II-2016, dan triwulan II-2016 naik 5,74 persen dari triwulan I-2016.
3. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan I-2017 (*y-on-y*) adalah industri komputer, barang elektronik dan optik naik 41,11 persen, industri mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya) naik 15,24 persen, serta industri minuman naik 11,95 persen.
4. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan I-2017 (*q-to-q*) adalah industri komputer, barang elektronika dan optik naik 11,29 persen, industri peralatan listrik naik 11,07 persen, dan industri pengolahan tembakau naik 6,49 persen.

Tabel 10.4
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan
Triwulan I-2015–Triwulan I-2017 (persen)

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015	0,64	5,09	-1,31	1,35	5,65	4,57	6,87	5,79	5,71
2016	0,76	5,74	-2,06	0,51	5,91	6,56	5,75	4,88	5,78
2017	2,44				6,63				

Tabel 10.5
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan I-2017
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	4,49	11,05
11	Minuman	2,28	11,95
12	Pengolahan tembakau	6,49	-3,68
13	Tekstil	-0,39	7,96
14	Pakaian jadi	1,01	5,40
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	6,26	9,24
16	Kayu, barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya)	0,34	7,35
17	Kertas dan barang dari kertas	1,66	11,95
18	Percetakan dan reproduksi media rekaman	-0,46	8,47
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	-3,12	7,70
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional	-0,16	-8,45
22	Karet, barang dari karet dan plastik	2,65	-3,41
23	Barang galian bukan logam	0,79	0,88
24	Logam dasar	1,10	2,45
25	Barang logam, bukan mesin & peralatannya	3,58	0,26
26	Komputer, barang elektronik dan optik	11,29	41,11
27	Peralatan listrik	11,07	-5,63
28	Mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya)	2,79	15,24
29	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	6,07	2,95
30	Alat angkutan lainnya	5,82	11,35
31	Furnitur	4,48	8,26
32	Pengolahan lainnya	4,65	6,97
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	-1,97	-6,30
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil		2,44	6,63

XI. PARIWISATA MEI 2017

A. Kunjungan Wisman

1. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari–Mei 2017 mencapai 5,36 juta kunjungan atau naik 20,85 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2016, yang tercatat sebanyak 4,43 juta kunjungan.

Jumlah kunjungan wisman selama Januari–Mei 2017 mencapai 5,36 juta kunjungan atau naik 20,85 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2016

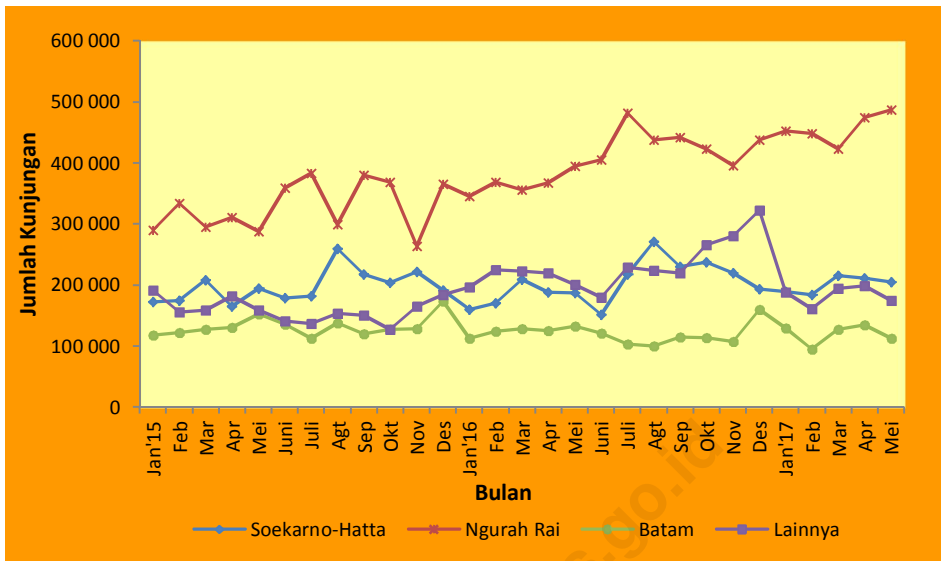
Tabel 11.1
Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia

Jenis Pengunjung	Jumlah Kunjungan					Perubahan Mei 2017 thd 2016 (%)	Perubahan Mei 2017 thd Apr 2017 (%)	Perubahan Jan–Mei 2017 thd 2016 (%)
	Mei 2016	Apr 2017	Mei 2017*	Jan–Mei 2016	Jan–Mei 2017			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Wisman melalui 19 Pintu Utama	865 419	994 130	963 310	4 082 547	4 687 721	11,31	-3,10	14,82
a. Wisman Reguler	841 723	966 936	938 623	3 925 249	4 556 402	11,51	-2,93	16,08
b. Wisman Khusus (wisman lansia, rohaniawan, diklat, riset, dll)	23 696	27 194	24 687	157 298	131 319	4,18	-9,22	-16,52
2. Wisman Diluar 19 Pintu Utama	49 787	148 050	195 898	351 385	670 768	293,47	32,32	90,89
a. Pos Lintas Batas (PLB)	18 976	96 133	156 054	142 068	422 483	722,38	62,33	197,38
b. Pintu Lainnya	30 811	51 917	39 844	209 317	248 285	29,32	-23,25	18,62
Jumlah	915 206	1 142 180	1 159 208	4 433 932	5 358 489	26,66	1,49	20,85

*)Angka sementara

2. Jumlah kunjungan wisman selama Mei 2017 mencapai 1,16 juta kunjungan atau naik 26,66 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan selama Mei 2016, yang tercatat sebanyak 915,21 ribu kunjungan. Demikian juga, jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman bulan Mei 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 1,49 persen.

Grafik 11.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman menurut Pintu Masuk
Januari 2015–Mei 2017



3. Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Mei 2017 mengalami kenaikan sebesar 23,37 persen dibandingkan Mei 2016, yaitu dari 394,44 ribu kunjungan menjadi 486,64 ribu kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali juga mengalami kenaikan sebesar 2,53 persen.
4. Dari sekitar 1,16 juta kunjungan wisman yang datang ke Indonesia pada Mei 2017, sebanyak 13,19 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Tionghoa, diikuti oleh wisman Singapura (9,83 persen), Malaysia (9,62 persen), Australia (7,91 persen), dan India (4,19 persen).

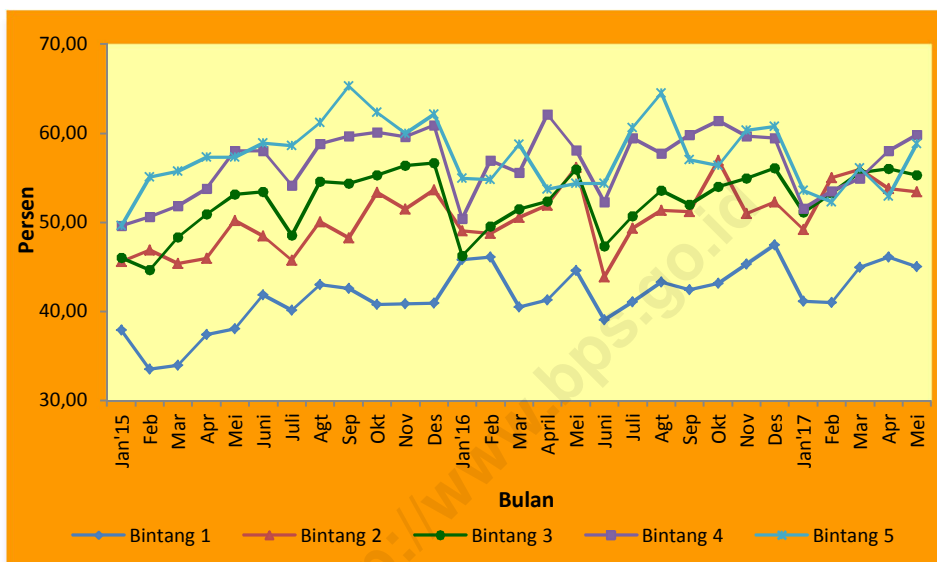
B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia selama Mei 2017 mencapai 56,07 persen, yang berarti terjadi kenaikan 0,61 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada bulan yang sama tahun 2016. Begitu pula jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK Mei 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 0,93 poin.

TPK hotel berbintang Mei 2017 mencapai 56,07 persen atau naik 0,61 poin dibanding TPK Mei 2016

2. Angka TPK menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Selain TPK, kinerja sektor perhotelan juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.

Grafik 11.2
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia, Januari 2015–Mei 2017



3. TPK hotel berbintang di Bali pada Mei 2017 sebesar 61,91 persen, atau naik sebesar 1,87 poin dibandingkan TPK Mei 2016. Begitu pula jika dibandingkan dengan April 2017, TPK Mei 2017 di Bali mengalami kenaikan sebesar 3,37 poin.
4. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama Mei 2017 mencapai 1,99 hari, atau mengalami kenaikan 0,24 hari dibandingkan rata-rata lama menginap selama Mei 2016. Begitu pula jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Mei 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin.

Tabel 11.2
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Januari 2016–Mei 2017

Bulan/ Tahun	Wisman		Wisman Bali (Ngorah Rai)		TPK*)		TPK Bali		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- bahan (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2016	11 519 275	10,69	4 852 634	23,29	53,74	0,70	61,63	1,08	1,80	-0,18
Jan–Mei	4 433 932	7,48	1 827 278	20,72	52,85	3,06	58,08	2,09	1,82	-0,26
Mei	915 206	1,57	394 443	7,37	55,46	1,08	60,04	4,96	1,75	-0,13
Juni	857 651	-6,29	405 686	2,85	48,63	-6,83	56,77	-5,51	1,84	0,09
Juli	1 032 741	20,42	482 201	18,86	53,77	5,14	70,62	13,85	1,81	-0,03
Agustus	1 031 986	-0,07	437 929	-9,18	55,21	1,44	72,40	1,78	1,80	-0,01
September	1 006 653	-2,45	442 304	1,00	54,16	-1,05	68,26	-4,14	1,90	0,10
Oktober	1 040 651	3,38	423 140	-4,33	56,13	1,97	62,19	-6,07	1,81	-0,09
November	1 002 333	-3,68	396 150	-6,38	55,76	-0,37	59,71	-2,48	1,72	-0,09
Desember	1 113 328	11,07	437 946	10,55	56,50	0,74	60,08	0,37	1,70	-0,02
2017	5 358 489	20,85	2 284 426	25,02	53,98	1,13	59,41	1,33	1,91	0,09
Januari	1 032 930	-7,22	452 660	3,36	50,66	-5,84	59,61	-0,47	1,94	0,24
Februari	957 583	-7,29	447 762	-1,08	52,57	1,91	60,82	0,66	1,91	-0,03
Maret	1 066 588	11,38	422 757	-5,58	54,70	2,13	56,58	-4,24	1,89	-0,02
April	1 142 180	7,09	474 610	12,27	55,14	0,44	58,79	1,96	1,84	-0,05
Mei	1 159 208	1,49	486 637	2,53	56,07	0,93	61,91	3,37	1,99	0,15

*) TPK 2016: angka 27 Provinsi, TPK 2017: angka 34 Provinsi

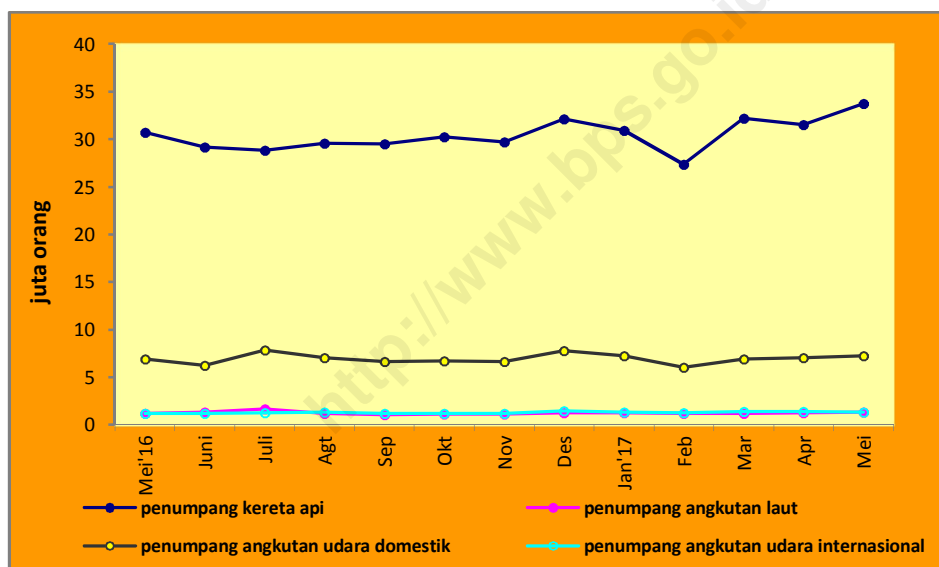
XII. TRANSPORTASI NASIONAL MEI 2017

A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Mei 2017 mencapai 7,2 juta orang atau naik 2,47 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 5,18 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik Mei 2017 mencapai 7,2 juta orang, naik 2,47 persen

Grafik 12.1
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Mei 2016–Mei 2017



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) Mei 2017 mencapai 1,3 juta orang atau turun 3,83 persen dibandingkan bulan sebelumnya, namun naik 10,06 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

B. Angkutan Laut Dalam Negeri

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Mei 2017 mencapai 1,3 juta orang atau naik 5,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 12,23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Mei 2017 mencapai 22,7 juta ton atau naik 8,43 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 4,62 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Mei 2017 mencapai 1,3 juta orang, naik 5,16 persen

C. Angkutan Kereta Api

1. Jumlah penumpang kereta api Mei 2017 mencapai 33,7 juta orang atau naik 7,12 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 9,91 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Mei 2017 mencapai 3,7 juta ton atau naik 5,92 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 36,12 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

Jumlah penumpang kereta api Mei 2017 mencapai 33,7 juta orang, naik 7,12 persen

Tabel 12.1
Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi
Mei 2016–Mei 2017

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2016	80 449,9	-	14 772,4	-	14 907,8	-	258 245,2	-	351 819	-	35 306	-
Mei	6 883,0	12,05	1 219,4	4,61	1 174,2	10,35	21 692,1	4,04	30 703	7,98	2 683	-6,94
Juni	6 219,4	-9,64	1 166,7	-4,32	1 348,2	14,82	22 028,7	1,55	29 159	-5,03	2 983	11,18
Juli	7 876,6	26,65	1 257,2	7,76	1 655,7	22,81	20 916,6	-5,05	28 831	-1,12	2 811	-5,77
Agustus	7 076,1	-10,16	1 335,1	6,20	1 206,0	-27,16	23 604,1	12,85	29 588	2,63	2 844	1,17
September	6 635,8	-6,22	1 219,6	-8,65	1 068,4	-11,41	21 558,1	-8,67	29 515	-0,25	2 932	3,09
Oktober	6 734,4	1,49	1 224,9	0,43	1 119,6	4,79	22 187,6	2,92	30 263	2,53	3 329	13,54
November	6 659,7	-1,11	1 178,7	-3,77	1 108,7	-0,97	22 820,1	2,85	29 690	-1,89	3 175	-4,63
Desember	7 790,3	16,98	1 462,9	24,11	1 285,6	15,96	22 407,1	-1,81	32 150	8,29	3 314	4,38
2017	34 551,9	-	6 717,7	-	6 208,4	-	105 302,1	-	155 709	-	16 816	-
Januari	7 273,7	-6,63	1 343,8	-8,14	1 251,0	-2,69	21 350,3	-4,72	30 949	-3,74	3 304	-0,30
Februari	6 040,7	-16,95	1 265,0	-5,86	1 178,3	-5,81	19 388,3	-9,19	27 343	-11,65	2 905	-12,08
Maret	6 933,4	14,78	1 371,3	8,40	1 208,2	2,54	20 941,6	8,01	32 170	17,65	3 507	20,72
April	7 064,8	1,90	1 395,5	1,76	1 253,1	3,72	20 928,3	-0,06	31 502	-2,08	3 448	-1,68
Mei	7 239,3	2,47	1 342,1	-3,83	1 317,8	5,16	22 693,6	8,43	33 745	7,12	3 652	5,92

XIII. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH MEI 2017

A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Amerika pada Mei 2017 cenderung terdepresiasi dibanding minggu terakhir April 2017. Level terendah nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah pada minggu terakhir April 2017 tercatat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp13.324,00 per dolar AS, sementara pada minggu terakhir Mei 2017 terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Rp13.362,50 per dolar AS. Sedangkan untuk level tertinggi, nilai tukar pada minggu terakhir April 2017 terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp13.200,00 per dolar AS dan pada minggu terakhir Mei 2017 terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai tengah Rp13.236,25 per dolar AS.
2. Pada minggu pertama Mei 2017, jika dibanding minggu terakhir April 2017, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata nasional melemah 11,30 poin atau 0,09 persen. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 50,00 poin atau melemah sebesar 0,38 persen.
3. Pada minggu terakhir Mei 2017, rata-rata nasional nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah 34,95 poin atau 0,26 persen dibanding kurs pada minggu terakhir April 2017. Depresiasi rupiah terbesar terjadi di Provinsi Bengkulu, melemah sebesar 102,50 poin atau 0,78 persen.

Rupiah terdepresiasi 34,95 poin atau 0,26 persen terhadap dolar Amerika pada Mei 2017. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Bengkulu.

B. Dolar Australia (AUD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Australia pada minggu pertama hingga terakhir Mei 2017 mengalami apresiasi jika dibanding minggu terakhir April 2017. Rata-rata nasional kurs eceran rupiah terapresiasi sebesar 15,79 poin pada minggu pertama Mei 2017 atau menguat sebesar 0,16 persen. Apresiasi rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 96,50 poin atau menguat sebesar 0,96 persen dibanding minggu terakhir April 2017.
2. Pada minggu terakhir Mei 2017 rata-rata nasional kurs eceran rupiah terhadap dolar Australia mengalami apresiasi sebesar 85,80 poin atau 0,86 persen dibanding minggu terakhir April 2017. Apresiasi rupiah yang terbesar juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu menguat sebesar 276,50 poin atau 2,76 persen dibanding minggu terakhir April 2017.
3. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada minggu terakhir April 2017 terjadi di Provinsi Papua sebesar Rp9.807,75 per dolar Australia, sementara pada minggu terakhir Mei 2017 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp9.744,00 per dolar Australia. Di sisi lain, level terendah nilai tukar terhadap dolar Australia pada minggu terakhir April 2017 tercatat di Provinsi Riau sebesar Rp10.065,00 per dolar Australia, dan pada minggu terakhir Mei 2017 tercatat di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar Rp9.981,00 per dolar Australia.

Rupiah terapresiasi 85,80 poin atau 0,86 persen terhadap dolar Australia pada Mei 2017. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Mei 2017 secara rata-rata nasional menguat 1,19 poin atau 1,00 persen dibanding minggu terakhir April 2017. Penguatan terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 3,00 poin atau 2,62 persen.
2. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu terakhir Mei 2017 secara rata-rata nasional tercatat menguat 0,09 poin atau 0,08 persen dibanding minggu terakhir April 2017. Penguatan terbesar tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 2,00 poin atau menguat 1,75 persen.
3. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang pada minggu terakhir April 2017 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp114,50 per yen Jepang, sedangkan level terendah terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp121,29 per yen Jepang. Demikian juga pada minggu terakhir Mei 2017, level tertinggi tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp112,50 per yen Jepang, sedangkan level terendah terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp120,88 per yen Jepang.

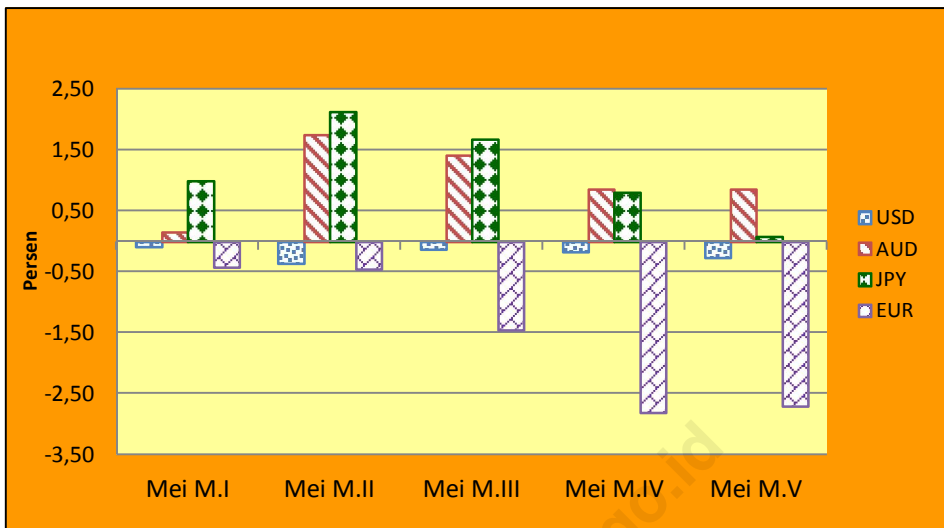
Rupiah terapresiasi 0,09 poin atau 0,08 persen terhadap yen Jepang pada Mei 2017. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Euro (EUR)

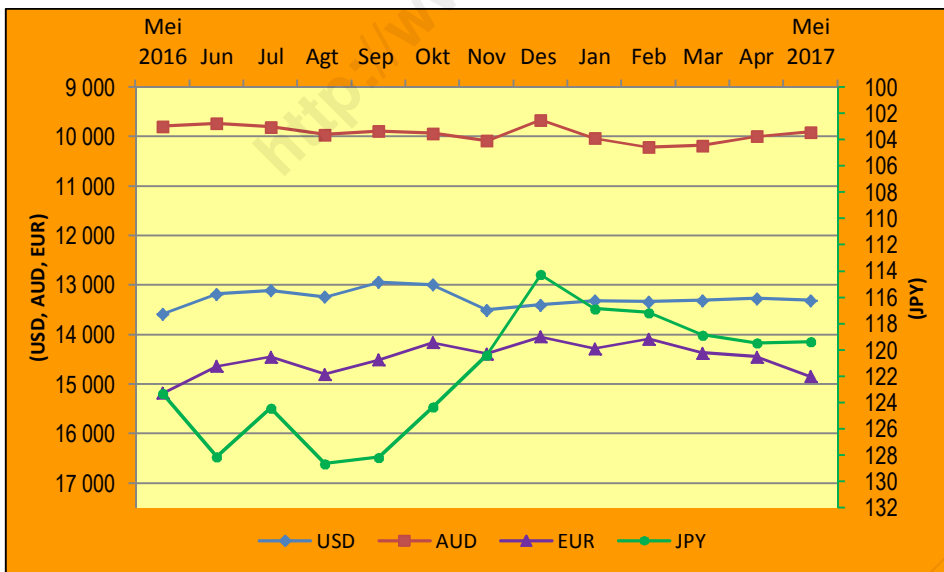
1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap euro pada Mei 2017 cenderung terdepresiasi dibanding minggu terakhir April 2017. Secara rata-rata nasional, rupiah terdepresiasi sebesar 61,32 poin pada minggu pertama Mei 2017 atau melemah sebesar 0,42 persen dan terdepresiasi kembali sebesar 391,11 poin pada minggu terakhir Mei 2017 atau melemah sebesar 2,71 persen dibanding minggu terakhir April 2017.
2. Pada minggu pertama Mei 2017, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terbesar di Provinsi Gorontalo yang mencapai 145,25 poin atau melemah sebesar 1,01 persen. Pada minggu terakhir Mei 2017, depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 531,67 poin atau melemah sebesar 3,67 persen.
3. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp14.541,69 per euro pada minggu terakhir April 2017 dan di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp14.999,17 per euro pada minggu terakhir Mei 2017. Sementara itu, level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah) pada minggu terakhir April 2017 terjadi di Provinsi Papua, yaitu Rp14.292,50 per euro dan pada minggu terakhir Mei 2017 juga terjadi di Provinsi Papua, yaitu Rp14.540,00 per euro.

Rupiah terdepresiasi 391,11 poin atau 2,71 persen terhadap euro pada Mei 2017. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 13.1
Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
 (Mei 2017 dibanding April 2017 M.IV)



Grafik 13.2
Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
 (Minggu Terakhir)



XIV. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

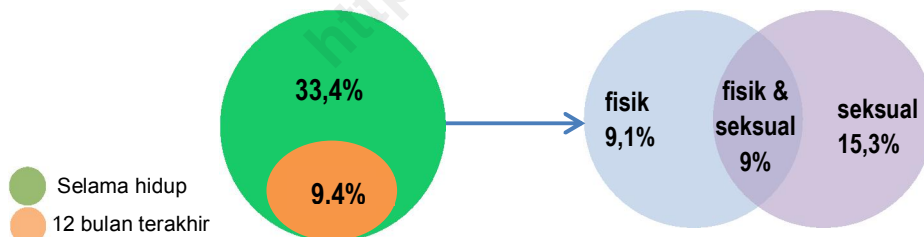
A. Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Usia 15–64 Tahun oleh Pasangan dan Selain Pasangan

Pelaku kekerasan dalam SPHPN dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pasangan (suami, pasangan hidup bersama, dan pasangan seksual tinggal terpisah), dan selain pasangan (orang tua, mertua, kakek, paman, sepupu, tetangga, teman, guru, orang tak dikenal, dll). Kekerasan fisik dan/atau seksual

1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam periode selama hidupnya

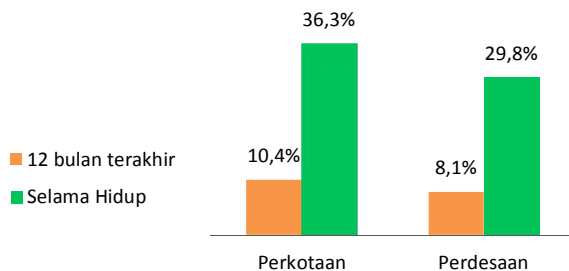
yang dilakukan pasangan dan selain pasangan dialami oleh 33,4 persen (1 dari 3) perempuan usia 15–64 tahun dalam periode selama hidupnya, dan sekitar 9,4 persen (1 dari 10) perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (Grafik 15.1).

Grafik 14.1
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Usia 15–64 tahun oleh Pasangan dan Selain Pasangan



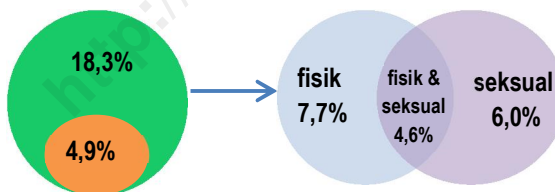
Bila dilihat daerah tempat tinggalnya, perempuan usia 15–64 tahun yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada perempuan usia 15–64 tahun yang tinggal di daerah pedesaan, baik dalam periode selama hidup maupun 12 bulan terakhir, yaitu 36,3 persen di perkotaan dan 29,8 persen di pedesaan dalam periode selama hidup, serta 10,4 persen di perkotaan dan 8,1 persen di pedesaan dalam periode 12 bulan terakhir (Grafik 15.2).

Grafik 14.2
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Daerah Tempat Tinggal

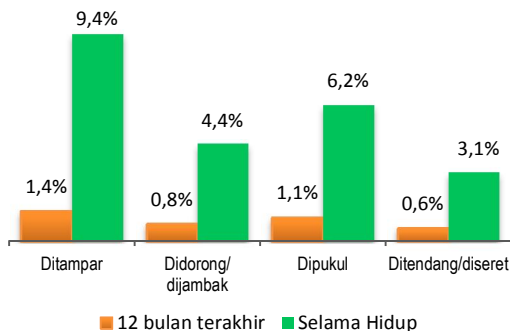


Prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan pasangan dan dialami oleh perempuan usia 15–64 tahun yang pernah/sedang menikah tercatat sebesar 18,3 persen dalam periode selama hidupnya, dan sebesar 4,9 persen dalam periode 12 bulan terakhir (Grafik 14.3). Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilakukan oleh suami/pasangan pada istrinya/pasangan perempuan. Jika dilihat jenisnya, tindakan kekerasan fisik yang paling banyak dilakukan suami/pasangan adalah menampar (9,4 persen), memukul (6,2 persen), mendorong/menjambak rambut (4,4 persen), menendang dan menghajar (3,1 persen) (Grafik 14.4).

Grafik 14.3
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Pasangan



Grafik 14.4
Prevalensi Kekerasan Fisik oleh Pasangan Menurut Jenis Tindakan

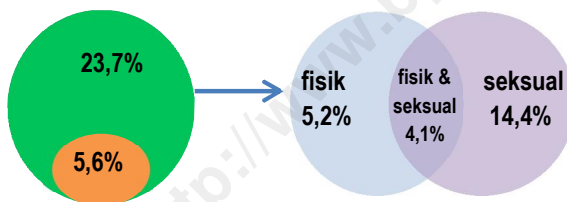


Sementara prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh selain/bukan pasangan tercatat sebesar 23,7 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun dalam periode selama hidupnya, dan sebesar 5,6 persen perempuan usia 15–64 tahun mengalami dalam 12

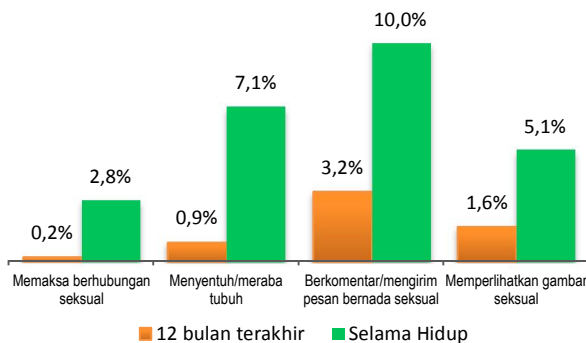
1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan dalam periode selama hidupnya

bulan terakhir (Grafik 14.5). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilakukan selain/bukan pasangan. Jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan oleh selain/bukan pasangan adalah berkomentar/mengirim pesan bernada seksual (10,0 persen), menyentuh/meraba tubuh (7,1 persen), pelaku memperlihatkan gambar seksual (5,1 persen), dan memaksa berhubungan seksual (2,8 persen) (Grafik 15.6).

Grafik 14.5
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Selain Pasangan



Grafik 14.6
Prevalensi Kekerasan Seksual oleh Selain Pasangan Menurut Jenis Tindakan



B. Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Latar Belakang Pendidikan dan Status Pekerjaan

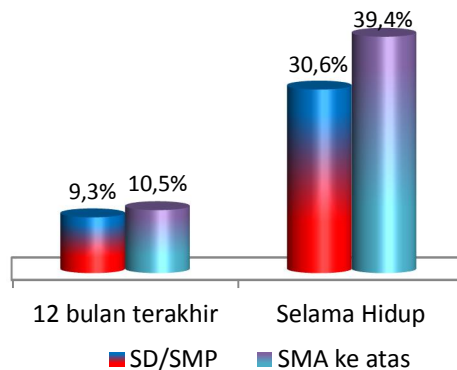
Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih rentan dialami perempuan berpendidikan tinggi (SMA ke atas). Sekitar 4 dari 10 (39,4 persen) perempuan berpendidikan tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya. Sedangkan pada perempuan berpendidikan

Kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas dan status pekerjaan tidak bekerja

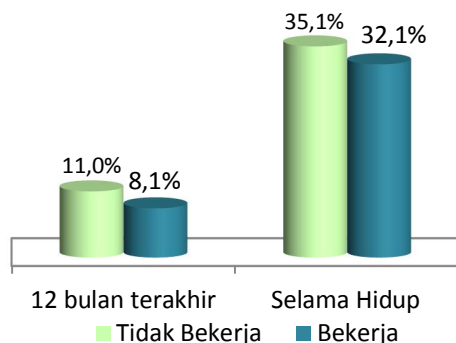
rendah (SD dan SMP) angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup lebih rendah yaitu 30,6 persen (3 dari 10). Demikian juga pada periode 12 bulan terakhir perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dengan tingkat prevalensi yang lebih tinggi (10,5 persen) daripada perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan rendah (9,3 persen) (Grafik 15.7).

Bila dilihat dari status pekerjaan, angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual pada perempuan yang tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yang bekerja, baik pada periode selama hidup maupun 12 bulan terakhir. Sekitar 35,1 persen perempuan yang tidak bekerja mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya, sedangkan pada perempuan yang bekerja prevalensi kekerasannya sekitar 32,1 persen (Grafik 15.8).

Grafik 14.7
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Pendidikan



Grafik 14.8
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Status Pekerjaan

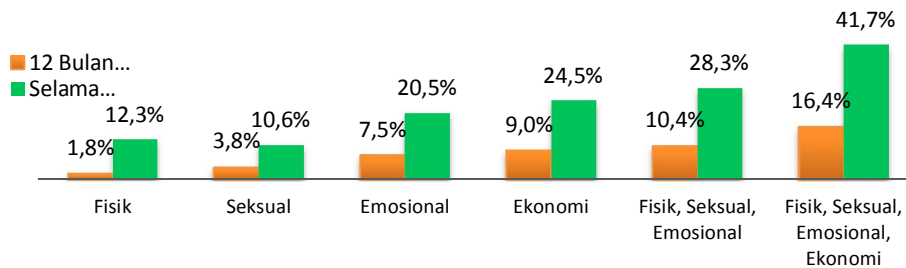


C. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Usia 15–64 Tahun Pernah/Sedang Menikah yang dilakukan oleh Pasangan

Selain jenis kekerasan fisik dan seksual, pada perempuan usia 15–64 tahun yang pernah/sedang menikah dicakup juga dua kekerasan lainnya yaitu kekerasan emosional (psikis), dan kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh pasangan/suami. Sekitar 1 dari 4 (24,5 persen) perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan ekonomi dari pasangannya selama hidupnya. Sementara 1 dari 5 (20,5 persen) perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan emosional/psikis dari pasangannya selama hidupnya

Sekitar 2 dari 5 (41,7 persen) perempuan usia 15–64 tahun yang pernah/sedang menikah mengalami sedikitnya 1 dari 4 jenis kekerasan (kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi) selama hidupnya, sedangkan sekitar 1 dari 6 (16,4 persen) perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, sekitar 1 dari 4 (28,3 persen) perempuan yang pernah/sedang menikah pernah mengalami sedikitnya 1 dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual, emosional) selama hidupnya dan sekitar 1 dari 10 (10,4 persen) perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (Grafik 15.9).

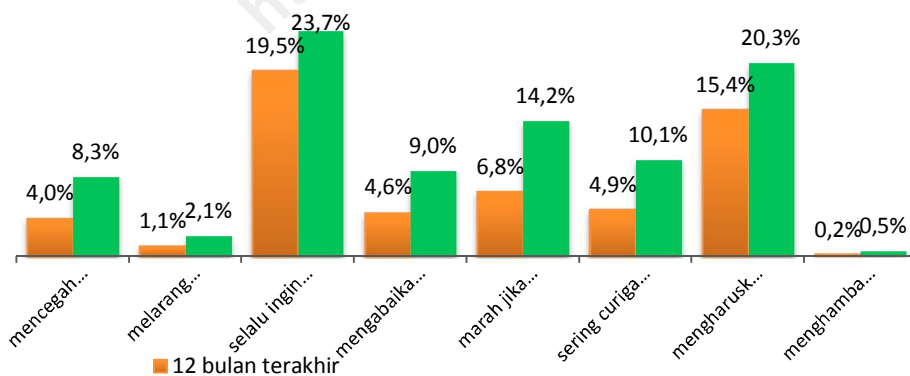
Grafik 14.9
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Pernah/Sedang Menikah yang Dilakukan oleh Pasangan



D. Pembatasan Aktivitas oleh Pasangan

Selain kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi, pada perempuan 15–64 tahun yang pernah/sedang menikah dicakup juga pembatasan aktivitas yang dilakukan pasangan/suaminya. Jenis tindakan pembatasan aktivitas yang dilakukan suami/pasangan terhadap istri/pasangan perempuan seperti mencegah bertemu dengan teman, melarang berhubungan dengan keluarga, selalu ingin tahu keberadaannya setiap saat, mengabaikan atau mengacuhkan, marah jika berbicara dengan lelaki lain, sering curiga tidak setia, mengharuskan meminta ijin sebelum periksa kesehatan/berobat, dan menghambat untuk beribadah. Grafik 10 menyajikan prevalensi pembatasan aktivitas oleh pasangan.

Grafik 14.10
Prevalensi Pembatasan Aktivitas oleh Pasangan



XV. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2017

A. Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2017

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 sebesar 5,33 persen turun 0,17 persen poin dibanding TPT Februari 2016.

**Jumlah penganggur
Februari 2017 sebanyak
7,01 juta orang orang**

Tabel 15.1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2015–2017
(juta orang)

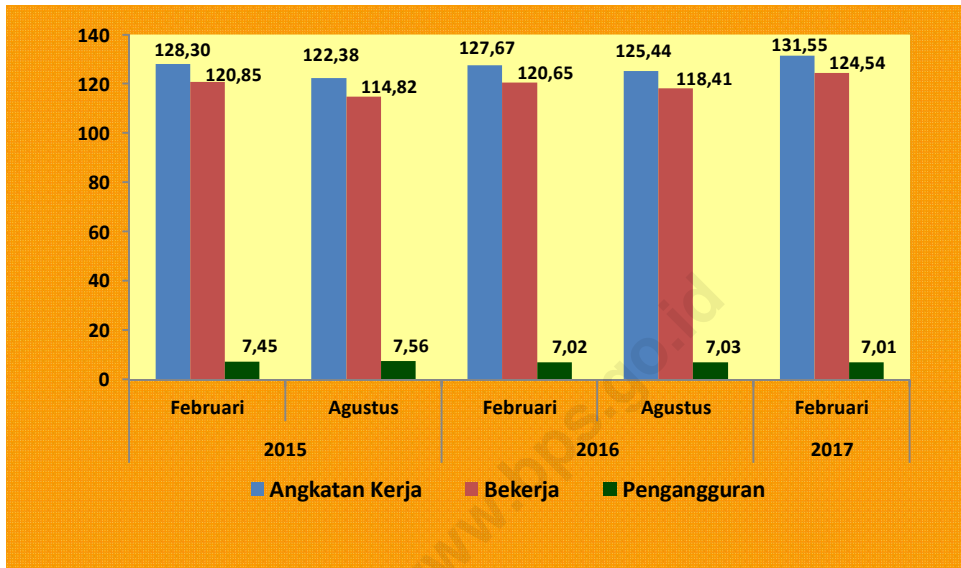
Jenis Kegiatan Utama	2015		2016		2017
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	128,30	122,38	127,67	125,44	131,55
Bekerja	120,85	114,82	120,65	118,41	124,54
Penganggur	7,45	7,56	7,02	7,03	7,01
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,50	65,76	68,06	66,34	69,02
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,81	6,18	5,50	5,61	5,33
4. Pekerja tidak penuh	35,68	34,31	36,33	32,23	37,54
Setengah penganggur	10,04	9,74	10,46	8,97	9,49
Pekerja paruh waktu	25,64	24,57	25,87	23,26	28,05
5. Bekerja di bawah 15 jam perminggu	7,54	6,46	8,54	6,74	9,99

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Februari 2017 sebesar 69,02 persen mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen poin jika dibandingkan dengan TPAC Februari 2016 sebesar 68,06 persen.
3. Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Februari 2017 sebanyak 37,54 juta orang (30,14 persen), naik sebanyak 1,21 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2016.
4. Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Februari 2017 sebanyak 9,99 juta orang (8,02 persen), naik sebanyak 1,45 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2016.
5. Pada Februari 2017 terdapat 9,49 juta orang (7,62 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

B. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

1. Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2017 sebanyak 131,55 juta orang, bertambah sebanyak 3,88 juta orang dibandingkan dengan Februari 2016.

Grafik 15.1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur
2015–2017 (juta orang)



2. Jumlah Penduduk bekerja pada Februari 2017 sebanyak 124,54 juta orang, bertambah 3,89 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016.
3. Pada Februari 2017, jumlah pengangguran mencapai 7,01 juta orang, mengalami penurunan 10 ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2016.

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

1. Struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2017 tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Masyarakat/Perorangan, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Dibandingkan dengan Februari 2016, pekerja di semua sektor mengalami kenaikan kecuali Sektor Konstruksi yang mengalami penurunan sebesar 550 ribu orang (7,13 persen).

Tabel 15.2
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
2015–2017 (juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2015		2016		2017
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	40,12	37,75	38,29	37,77	39,68
2. Pertambangan dan Penggalian	1,42	1,32	1,32	1,48	1,37
3. Industri	16,38	15,25	15,97	15,54	16,57
4. Listrik, Gas dan Air	0,31	0,29	0,40	0,35	0,42
5. Konstruksi	7,72	8,21	7,71	7,98	7,16
6. Perdagangan	26,65	25,68	28,50	26,69	29,11
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,19	5,11	5,19	5,61	5,69
8. Keuangan	3,65	3,27	3,48	3,53	3,59
9. Jasa Kemasyarakatan	19,41	17,94	19,79	19,46	20,95
Jumlah	120,85	114,82	120,65	118,41	124,54

D. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

1. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2017 sebanyak 51,87 juta orang (41,65 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 72,67 juta orang (58,35 persen) bekerja pada kegiatan informal.
2. Dalam setahun terakhir (Februari 2016–Februari 2017), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar bertambah 420 ribu orang dan penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai bertambah sebanyak 1,12 juta orang, keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sebanyak 1,54 juta orang.
3. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Februari 2016–Februari 2017), jumlah pekerja informal bertambah sebanyak 2,35 juta orang.

Tabel 15.3
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
2015–2017 (juta orang)

Status Pekerjaan Utama	2015		2016		2017
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Berusaha sendiri	21,65	19,53	20,39	20,01	21,85
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	18,80	18,19	21,00	19,45	21,28
3. Berusaha dibantu buruh tetap	4,21	4,07	4,03	4,38	4,45
4. Buruh/karyawan/pegawai	46,62	44,43	46,30	45,83	47,42
5. Pekerja bebas di pertanian	5,08	5,09	5,24	5,50	5,36
6. Pekerja bebas di nonpertanian	6,80	7,45	7,00	6,97	6,02
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	17,69	16,06	16,69	16,27	18,16
Jumlah	120,85	114,82	120,65	118,41	124,54

E. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 52,59 juta orang (42,23 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 22,62 juta (18,16 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 15,27 juta orang mencakup 3,68 juta orang (2,95 persen) berpendidikan Diploma dan 1,59 juta orang (9,31 persen) berpendidikan Universitas.

Tabel 15.4
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015–2017
(juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2015		2016		2017
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	54,61	50,83	52,43	49,97	52,59
2. Sekolah Menengah Pertama	21,47	20,70	21,48	21,36	22,62
3. Sekolah Menengah Atas	19,81	19,81	20,71	20,41	20,52
4. Sekolah Menengah Kejuruan	11,80	10,84	12,34	12,17	13,54
5. Diploma I/II/III	3,14	3,08	3,20	3,41	3,68
6. Universitas	10,02	9,56	10,49	11,09	11,59
Jumlah	120,85	114,82	120,65	118,41	124,54

2. Perbaikan kualitas penduduk bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 13,69 juta orang (11,34 persen) pada Februari 2016 menjadi 15,27 juta orang (12,26 persen) pada Februari 2017.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

1. Jumlah pengangguran pada Februari 2017 mencapai 7,01 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,50 persen pada Februari 2016 menjadi 5,33 persen pada Februari 2017.
2. Pada Februari 2017, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,27 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 7,03 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,54 perse.
3. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, TPT yang mengalami kenaikan terbesar terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah.

Tabel 15.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015–2017
(persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2015		2016		2017
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	3,61	2,74	3,44	2,88	3,54
2. Sekolah Menengah Pertama	7,14	6,22	5,76	5,71	5,36
3. Sekolah Menengah Atas	8,17	10,32	6,95	8,72	7,03
4. Sekolah Menengah Kejuruan	9,05	12,65	9,84	11,11	9,27
5. Diploma I/II/III	7,49	7,54	7,22	6,04	6,35
6. Universitas	5,34	6,40	6,22	4,87	4,98
Jumlah	5,81	6,18	5,50	5,61	5,33

G. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

1. Pada Februari 2017, TPT tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 8,55 persen dan 8,49 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Bengkulu masing-masing sebesar 1,28 persen dan 2,81 persen.
2. Dibandingkan dengan Februari 2016, TPT menurut provinsi yang penurunannya terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dengan penurunan sebesar 2,59 persen poin, sedangkan yang mengalami peningkatan terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat dengan peningkatan sebesar 1,79 persen poin.

Tabel 15.6
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi 2016–2017

Provinsi	2016				2017	
	Februari		Agustus		Februari	
	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	181,8	8,13	170,9	7,57	172,1	7,39
Sumatera Utara	428,0	6,49	371,7	5,84	430,2	6,41
Sumatera Barat	149,7	5,81	125,9	5,09	151,9	5,80
Riau	176,9	5,94	222,0	7,43	180,2	5,76
Jambi	79,1	4,66	67,7	4,00	65,7	3,67
Sumatera Selatan	159,5	3,94	180,2	4,31	161,2	3,80
Bengkulu	38,3	3,84	32,9	3,30	29,0	2,81
Lampung	183,5	4,54	190,3	4,62	189,1	4,43
Kep. Bangka Belitung	42,4	6,17	18,3	2,60	32,5	4,46
Kepulauan Riau	82,5	9,03	71,6	7,69	67,8	6,44
DKI Jakarta	306,2	5,77	317,0	6,12	292,7	5,36
Jawa Barat	1 899,7	8,57	1 873,9	8,89	1 922,0	8,49
Jawa Tengah	752,5	4,20	801,3	4,63	755,5	4,15
DI Yogyakarta	59,0	2,81	57,0	2,72	60,1	2,84
Jawa Timur	849,3	4,14	839,3	4,21	855,7	4,10
Banten	452,1	7,95	498,6	8,92	462,3	7,75
Bali	50,4	2,12	46,5	1,89	31,6	1,28
Nusa Tenggara Barat	87,2	3,66	97,0	3,94	97,2	3,86
Nusa Tenggara Timur	87,7	3,59	76,6	3,25	80,2	3,21
Kalimantan Barat	110,8	4,58	100,9	4,23	105,7	4,22
Kalimantan Tengah	47,2	3,67	63,2	4,82	42,9	3,13
Kalimantan Selatan	74,4	3,63	113,3	5,45	75,9	3,53
Kalimantan Timur	146,2	8,86	136,7	7,95	143,6	8,55
Kalimantan Utara	11,2	3,92	15,1	5,23	16,8	5,17
Sulawesi Utara	92,6	7,82	73,2	6,18	77,1	6,12
Sulawesi Tengah	51,7	3,46	49,7	3,29	46,3	2,97
Sulawesi Selatan	193,0	5,11	186,3	4,80	190,4	4,77
Sulawesi Tenggara	45,8	3,78	34,1	2,72	39,6	3,14
Gorontalo	21,9	3,88	15,5	2,76	21,5	3,65
Sulawesi Barat	17,4	2,72	21,5	3,33	19,1	2,98
Maluku	51,2	6,98	52,4	7,05	59,7	7,77
Maluku Utara	18,2	3,43	21,0	4,01	26,8	4,82
Papua Barat	25,0	5,73	32,5	7,46	33,2	7,52
Papua	51,7	2,97	57,7	3,35	69,5	3,96
Indonesia	7 024,2	5,50	7 031,8	5,61	7 005,3	5,33

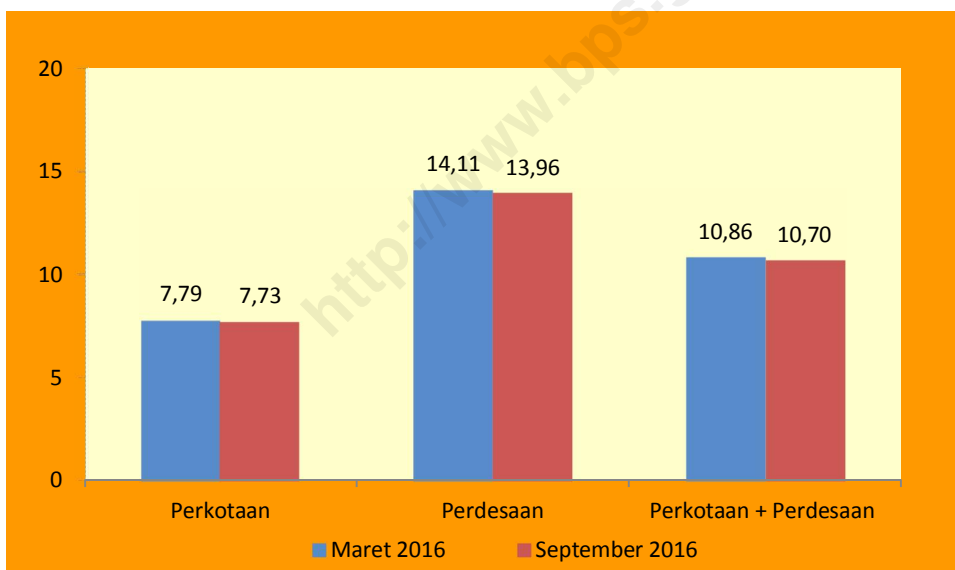
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN SEPTEMBER 2016

A. Perkembangan Kemiskinan Maret 2016–September 2016

- Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), menurun 0,25 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebanyak 28,01 juta orang (10,86 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 14.1. dan Tabel 14.1.

Jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang

Grafik 16.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2016–September 2016



- Pada periode Maret 2016–September 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,15 juta sebaliknya daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,39 juta orang.
- Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2016, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,24 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2016 sebesar 63,08 persen.

Tabel 16.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2016 –September 2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2016	255 181	109 346	364 527	10,34	7,79
September 2016	259 886	112 228	372 114	10,49	7,73
Perdesaan					
Maret 2016	266 132	77 514	343 646	17,67	14,11
September 2016	270 038	80 382	350 420	17,28	13,96
Perkotaan+Perdesaan					
Maret 2016	260 469	93 917	354 386	28,01	10,86
September 2016	264 941	97 050	361 990	27,76	10,70

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 dan September 2016

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2016–September 2016 adalah:

- Selama periode Maret 2016–September 2016 terjadi inflasi umum relatif rendah yaitu tercatat sebesar 1,34 persen.
- Pada periode Maret 2016–September 2016, secara nasional harga eceran beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras mengalami penurunan. Rata-rata harga beras turun 1,21 persen yaitu dari Rp13.301,00 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp13.140,00 per kg pada September 2016. Rata-rata harga cabai merah mengalami penurunan sebesar 14,06 persen yaitu dari Rp45.554,00 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp39.151,00 per kg pada September 2016. Adapun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 13,77 persen dan telur ayam ras yang mengalami penurunan sebesar 0,56 persen.
- Nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2016 naik sebesar 1,42 persen dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp47.559,00 menjadi Rp48.235,00. Selain itu rata-rata upah buruh bangunan per hari pada September 2016 naik sebesar 1,23 persen dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp81.481,00 menjadi Rp82.480,00.
- NTP nasional September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,69 persen dibanding NTP bulan Maret 2016 yang sebesar 101,32.

B. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2016 –September 2016

- Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2016–September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,15 persen, yaitu dari Rp354.386,00 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp361.990,00 per kapita per bulan pada September 2016. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,19 persen pada bulan September 2016. Dibedakan wilayah, sumbangan GKM terhadap GK di perkotaan adalah 69,84 persen sementara di perdesaan 77,06 persen.

Tabel 16.2
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) Menurut Daerah, September 2016

Jenis komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan:	69,84	Makanan:	77,06
Beras	18,31	Beras	25,35
Rokok	10,70	Rokok	10,70
Daging sapi	4,98	Daging sapi	3,47
Telur ayam ras	3,18	Gula pasir	3,01
Daging ayam ras	3,10	Telur ayam ras	2,76
Mie instan	2,43	Mie instan	2,28
Gula pasir	2,02	Daging ayam ras	2,19
Bawang merah	1,77	Bawang merah	2,10
Tempe	1,62	Kopi bubuk & kopi instan	1,58
Tahu	1,57	Tempe	1,53
Makanan Lainnya	20,16	Makanan Lainnya	22,09
Bukan Makanan:	30,16	Bukan Makanan:	22,94
Perumahan	9,81	Perumahan	7,63
Listrik	2,86	Bensin	2,31
Bensin	2,84	Listrik	1,59
Pendidikan	2,49	Pendidikan	1,49
Angkutan	1,70	Perlengkapan mandi	1,04
Perlengkapan mandi	1,28	Kayu bakar	0,90
Bukan Makanan Lainnya	9,18	Bukan Makanan Lainnya	7,98
Total	100,00	Total	100,00

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016

2. Pada September 2016, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama, yaitu beras yang memberi sumbangan sebesar 18,31 persen di perkotaan dan 25,35 persen di perdesaan. Rokok memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 10,70 persen. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada September 2016 terdapat daging sapi dalam komoditi sepuluh besar penyumbang GK, yang memberikan sumbangan 4,98 persen untuk GK perkotaan dan 3,47 persen untuk GK perdesaan. Munculnya komoditi daging sapi disebabkan pada periode September 2016 bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,18 persen di perkotaan dan 2,76 persen di perdesaan), mie instan (2,43 persen di perkotaan dan 2,28 di perdesaan), dan seterusnya. Selain itu, terlihat pula bahwa terdapat komoditi penyumbang terbesar GK yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Komoditi tahu hanya menjadi penyumbang GK perkotaan dan komoditi kopi bubuk & kopi instan hanya menjadi penyumbang GK perdesaan. Nama komoditi makanan dan bukan makanan beserta nilai kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 14.2.

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2. Pada periode Maret 2016–September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2016 adalah 1,94 dan pada September 2016 mengalami penurunan menjadi 1,74 demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,52 menjadi 0,44 pada periode yang sama.

Tabel 16.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2016–September 2016

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2016	1,19	2,74	1,94
September 2016	1,21	2,32	1,74
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2016	0,27	0,79	0,52
September 2016	0,29	0,59	0,44

3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,21 sedangkan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,32. Pada periode yang sama nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan adalah 0,29 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,59.

Tabel 16.4
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2016

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	445 488	163,02	10,79	415 826	678,29	18,80	424 765	841,31	16,43
Sumatera Utara	413 835	690,34	9,69	388 707	762,21	10,86	401 832	1 452,55	10,27
Sumatera Barat	454 674	119,51	5,52	425 520	257,00	8,27	438 075	376,51	7,14
Riau	439 542	164,12	6,38	433 960	337,47	8,51	437 259	501,59	7,67
Jambi	448 615	116,33	10,73	349 735	174,48	7,30	379 648	290,81	8,37
Sumatera Selatan	400 159	377,88	12,73	339 874	718,62	13,77	361 696	1 096,50	13,39
Bengkulu	458 435	98,07	16,16	427 315	227,53	17,43	437 184	325,60	17,03
Lampung	398 378	227,44	10,15	357 792	912,34	15,24	368 592	1 139,78	13,86
Bangka Belitung	553 681	19,37	2,67	573 582	51,70	7,57	564 391	71,07	5,04
Kepulauan Riau	505 980	86,19	4,99	481 687	32,95	10,47	502 653	119,14	5,84
DKI Jakarta	520 690	385,84	3,75	-	-	-	520 690	385,84	3,75
Jawa Barat	332 145	2 543,30	7,55	331 237	1 624,81	11,72	332 119	4 168,11	8,77
Jawa Tengah	322 799	1 879,55	11,38	322 489	2 614,20	14,88	322 748	4 493,75	13,19
DI Yogyakarta	370 510	301,25	11,68	337 230	187,58	16,27	360 169	488,83	13,10
Jawa Timur	329 241	1 552,77	7,91	328 846	3 085,76	15,83	329 172	4 638,53	11,85
Banten	382 903	380,16	4,49	351 708	277,58	7,32	373 365	657,74	5,36
Bali	357 427	93,74	3,53	328 033	81,20	5,21	346 398	174,94	4,15
Nusa Tenggara Barat	346 581	378,83	17,55	328 775	407,75	14,82	336 573	786,58	16,02
Nusa Tenggara Timur	389 661	112,48	10,17	310 296	1 037,60	25,19	327 003	1 150,08	22,01
Kalimantan Barat	366 477	75,98	4,97	360 940	314,34	9,38	363 027	390,32	8,00
Kalimantan Tengah	357 224	40,61	4,49	392 543	96,85	5,83	380 524	137,46	5,36
Kalimantan selatan	399 162	60,90	3,43	380 647	123,26	5,37	389 273	184,16	4,52
Kalimantan Timur	535 137	89,64	3,86	510 041	121,60	10,15	526 686	211,24	6,00
Kalimantan Utara	539 499	17,25	4,50	518 305	29,78	10,29	530 566	47,03	6,99
Sulawesi Utara	314 004	59,73	5,22	322 366	140,62	10,82	318 984	200,35	8,20
Sulawesi Tengah	399 413	75,90	10,07	376 658	337,25	15,48	382 775	413,15	14,09
Sulawesi Selatan	286 669	150,60	4,47	267 428	646,21	12,30	275 361	796,81	9,24
Sulawesi Tenggara	294 286	53,18	6,87	276 978	274,11	15,31	282 161	327,29	12,77
Gorontalo	287 156	24,02	5,78	285 999	179,67	24,30	286 968	203,69	17,63
Sulawesi Barat	280 117	25,07	8,43	295 739	121,83	12,00	292 519	146,90	11,19
Maluku	424 788	54,24	7,86	423 698	277,55	26,88	424 656	331,79	19,26
Maluku Utara	405 368	12,45	3,76	379 454	63,95	7,43	386 489	76,40	6,41
Papua Barat	508 262	20,11	5,69	480 945	203,49	37,33	492 969	223,60	24,88
Papua	479 294	35,77	4,21	425 264	879,10	37,07	440 021	914,87	28,40
INDONESIA	372 114	10 485,64	7,73	350 420	17 278,68	13,96	361 990	27 764,32	10,70

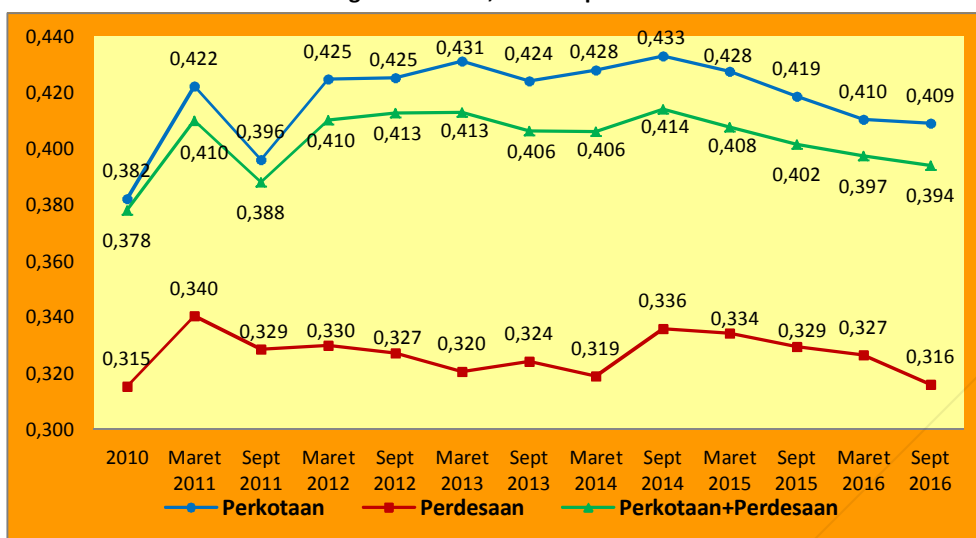
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016

D. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran September 2015–September 2016

1. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.
2. Tingkat ketimpangan pengeluaran merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pengeluaran merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran adalah *Gini Ratio* serta persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal juga dengan ukuran Bank Dunia.
3. Pada September 2016 *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,394 menurun dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada Maret 2016 yang sebesar 0,397 dan menurun pula jika dibandingkan *Gini Ratio* pada September 2015 yang sebesar 0,402. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Indonesia mengalami perbaikan selama periode September 2015–September 2016.
4. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 0,409, turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,410 dan turun dibanding *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,419. Sedangkan *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 0,316 turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,327 dan turun dibanding September 2015 yang sebesar 0,329.

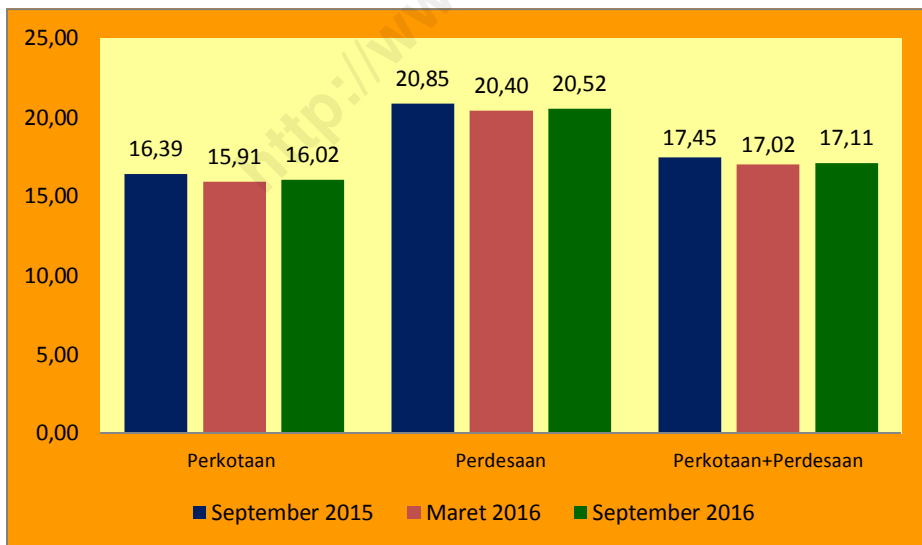
Gini Ratio pada September 2016 sebesar 0,394

Grafik 16.2
Perkembangan *Gini Ratio*, 2010–September 2016



5. Pada September 2016, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,11 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016 ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 17,45 persen, tetapi meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 17,02 persen.
6. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, ukuran ketimpangan Bank Dunia menunjukkan hal yang sama dengan ukuran *Gini Ratio*, yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan perdesaan. Pada September 2016 persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 16,02 persen. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran di perkotaan termasuk pada kategori ketimpangan sedang sementara di perdesaan sebesar 20,52 persen yang berarti pada kategori ketimpangan rendah. Baik di perkotaan maupun perdesaan nilai ketimpangan pada September 2016 mengalami perbaikan dibanding periode Maret 2016, tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2015.

Grafik 16.3
Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah
September 2015–September 2016



7. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia selama periode September 2015–September 2016 diantaranya adalah:
 - a. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa kenaikan pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 20 persen teratas. Kenaikan pengeluaran perkapita September 2015–September 2016 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 4,56 persen, 11,69 persen, dan 3,83 persen.
 - b. Menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah (kelompok 40 persen menengah). Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri/dibantu pekerja tidak dibayar yang merupakan kelompok terbesar pada kelas menengah sebagai dampak dari lebih kondusifnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 - c. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), terjadi peningkatan jumlah pekerja yang berusaha sendiri/dibantu pekerja tidak dibayar dari 37,7 juta (Agustus 2015) menjadi 39,5 juta (Agustus 2016) atau naik sekitar 4,77 persen. Untuk sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan angkutan kenaikannya jauh lebih tinggi lagi yaitu sebesar 9,44 persen dari 18,0 juta (Agustus 2015) menjadi 19,7 juta (Agustus 2016).
 - d. Kenaikan pengeluaran kelompok bawah yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah.

8. Berdasarkan provinsi, nilai *Gini Ratio* September 2016 tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 0,425 sementara yang terendah adalah Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,288. Terdapat delapan provinsi yang nilai *Gini Ratio* di atas angka nasional, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,425), Gorontalo (0,410), Jawa Barat (0,402), Jawa Timur (0,402), Papua Barat (0,401), Sulawesi Selatan (0,400), Papua (0,399), dan DKI Jakarta (0,397).

Tabel 16.5
Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2015–September 2016

Provinsi	September 2015			Maret 2016			September 2016		
	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,368	0,293	0,339	0,343	0,288	0,333	0,362	0,296	0,341
Sumatera Utara	0,332	0,285	0,326	0,334	0,282	0,319	0,333	0,270	0,312
Sumatera Barat	0,325	0,280	0,319	0,353	0,288	0,331	0,323	0,267	0,312
Riau	0,385	0,330	0,366	0,369	0,309	0,347	0,368	0,309	0,347
Jambi	0,354	0,319	0,344	0,377	0,313	0,349	0,403	0,292	0,346
Sumatera Selatan	0,354	0,286	0,334	0,373	0,293	0,348	0,397	0,306	0,362
Bengkulu	0,398	0,338	0,371	0,385	0,302	0,357	0,405	0,296	0,354
Lampung	0,399	0,313	0,352	0,393	0,330	0,364	0,384	0,311	0,358
Bangka Belitung	0,284	0,259	0,275	0,289	0,240	0,275	0,318	0,239	0,288
Kepulauan Riau	0,333	0,283	0,339	0,351	0,284	0,354	0,346	0,264	0,352
DKI Jakarta	0,421	-	0,421	0,411	-	0,411	0,397	-	0,397
Jawa Barat	0,446	0,310	0,426	0,423	0,317	0,413	0,412	0,310	0,402
Jawa Tengah	0,402	0,344	0,382	0,381	0,323	0,366	0,382	0,313	0,357
DI Yogyakarta	0,428	0,332	0,420	0,423	0,334	0,420	0,423	0,343	0,425
Jawa Timur	0,428	0,327	0,403	0,423	0,333	0,402	0,433	0,313	0,402
Banten	0,390	0,261	0,386	0,402	0,264	0,394	0,399	0,248	0,392
Bali	0,406	0,350	0,399	0,369	0,329	0,366	0,378	0,335	0,374
Nusa Tenggara Barat	0,376	0,342	0,360	0,391	0,317	0,359	0,410	0,306	0,365
Nusa Tenggara Timur	0,301	0,303	0,348	0,330	0,281	0,336	0,344	0,317	0,362
Kalimantan Barat	0,361	0,286	0,330	0,373	0,296	0,341	0,361	0,275	0,331
Kalimantan Tengah	0,340	0,268	0,300	0,359	0,296	0,330	0,364	0,326	0,347
Kalimantan Selatan	0,374	0,282	0,334	0,346	0,297	0,332	0,363	0,298	0,351
Kalimantan Timur	0,319	0,273	0,315	0,314	0,288	0,315	0,314	0,313	0,328
Kalimantan Utara	0,322	0,282	0,314	0,304	0,268	0,300	0,308	0,280	0,305
Sulawesi Utara	0,356	0,345	0,366	0,386	0,355	0,386	0,388	0,350	0,379
Sulawesi Tengah	0,415	0,303	0,370	0,387	0,320	0,362	0,372	0,308	0,347
Sulawesi Selatan	0,386	0,346	0,404	0,422	0,367	0,426	0,409	0,340	0,400
Sulawesi Tenggara	0,411	0,355	0,381	0,407	0,367	0,402	0,395	0,352	0,388
Gorontalo	0,391	0,366	0,401	0,414	0,392	0,419	0,402	0,397	0,410
Sulawesi Barat	0,383	0,339	0,362	0,393	0,347	0,364	0,441	0,341	0,371
Maluku	0,328	0,307	0,338	0,327	0,313	0,348	0,338	0,303	0,344
Maluku Utara	0,315	0,256	0,286	0,295	0,249	0,286	0,326	0,251	0,309
Papua Barat	0,349	0,461	0,428	0,326	0,376	0,373	0,357	0,394	0,401
Papua	0,347	0,387	0,392	0,312	0,383	0,390	0,318	0,392	0,399
Indonesia	0,419	0,329	0,402	0,410	0,327	0,397	0,409	0,316	0,394

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor September 2015, Maret 2016, dan September 2016

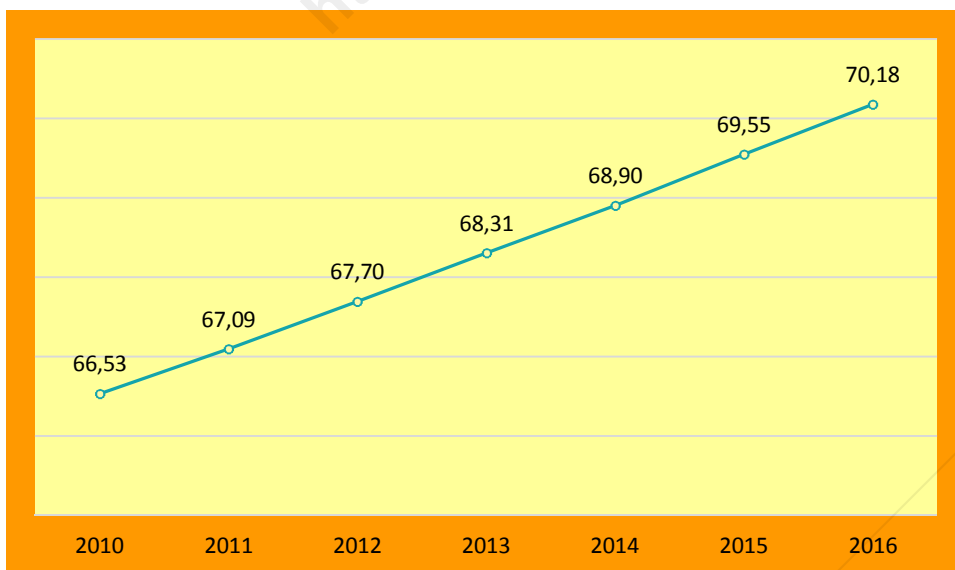
XVII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016

A. PERKEMBANGAN IPM

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan standar hidup layak digambarkan melalui pengeluaran per kapita.
2. Badan Pusat Statistik mengukur IPM di Indonesia menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010).

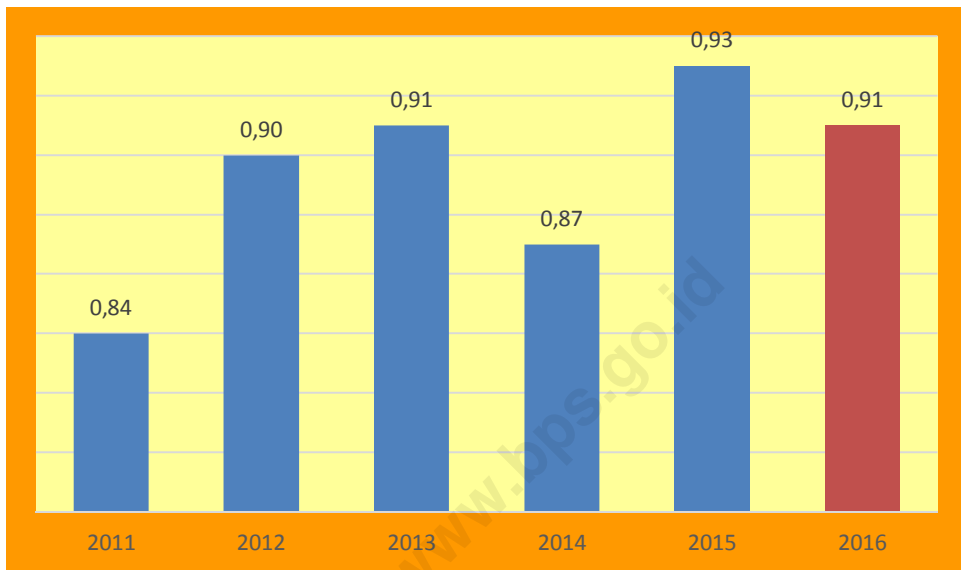
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai kategori Tinggi pada tahun 2016 (70,18)

Grafik 17.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010–2016



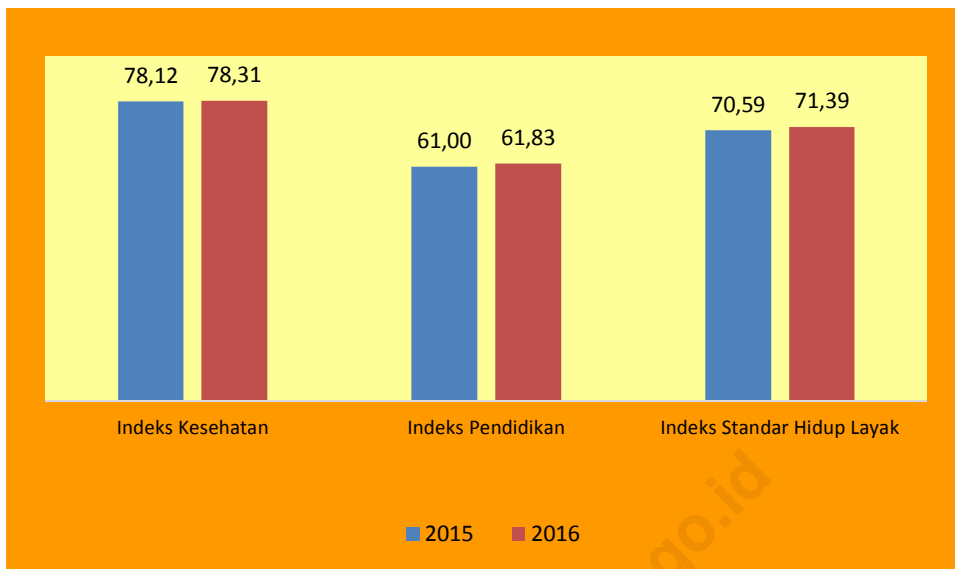
3. Pada tahun 2016, angka IPM Indonesia sebesar 70,18. IPM Indonesia tumbuh 0,91 persen atau bertambah 0,63 poin dibandingkan IPM tahun 2015. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,93 persen.

Grafik 17.2
Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2011–2016



4. Pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2016 dipicu oleh peningkatan semua indeks komponen pembentuknya. Indeks pendidikan merupakan komponen IPM yang mengalami akselerasi paling tinggi. Pada tahun 2016, indeks pendidikan mencapai 61,83 atau meningkat 0,83 poin dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan indeks standar hidup layak yang mengalami peningkatan 0,80 poin. Sementara itu, indeks kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan.
5. Peningkatan indeks pendidikan utamanya disebabkan oleh capaian indeks harapan lama sekolah yang meningkat cukup tinggi sebesar 0,96 poin dari tahun 2015. Hal ini menggambarkan semakin tingginya peluang penduduk 7 tahun ke atas dalam mengakses pendidikan dan progresivitas angka harapan lama sekolah tersebut untuk mencapai target maksimum yang diharapkan.

Grafik 17.3
Indeks Komponen IPM Indonesia, 2015–2016



6. Pada periode 2015–2016, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Papua (1,40 persen), Provinsi Sumatera Selatan (1,16 persen), dan Provinsi Jawa Timur (1,15 persen). Sebaliknya, pada periode yang sama, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling lambat, yaitu Provinsi Riau (0,51 persen), Provinsi Kalimantan Barat (0,44 persen), dan Provinsi Kepulauan Riau (0,33 persen). Berdasarkan status pencapaiannya, 12 provinsi berada pada kategori pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, sejak 2010 hingga 2016, masih terdapat satu provinsi yang berstatus pembangunan manusia “rendah” atau kurang dari 60, yaitu Provinsi Papua.

Tabel 17.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2015–2016

Provinsi	Angka Harapan Hidup saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan(%)
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015–2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69,50	69,51	13,73	13,89	8,77	8,86	8 533	8 768	69,45	70,00	0,79
Sumatera Utara	68,29	68,33	12,82	13,00	9,03	9,12	9 563	9 744	69,51	70,00	0,70
Sumatera Barat	68,66	68,73	13,60	13,79	8,42	8,59	9 804	10 126	69,98	70,73	1,07
Riau	70,93	70,97	12,74	12,86	8,49	8,59	10 364	10 465	70,84	71,20	0,51
Jambi	70,56	70,71	12,57	12,72	7,96	8,07	9 446	9 795	68,89	69,62	1,06
Sumatera Selatan	69,14	69,16	12,02	12,23	7,77	7,83	9 474	9 935	67,46	68,24	1,16
Bengkulu	68,50	68,56	13,18	13,38	8,29	8,37	9 123	9 492	68,59	69,33	1,08
Lampung	69,90	69,94	12,25	12,35	7,56	7,63	8 729	9 156	66,95	67,65	1,05
Kep. Bangka Belitung	69,88	69,92	11,60	11,71	7,46	7,62	11 781	11 960	69,05	69,55	0,72
Kepulauan Riau	69,41	69,45	12,60	12,66	9,65	9,67	13 177	13 359	73,75	73,99	0,33
DKI Jakarta	72,43	72,49	12,59	12,73	10,70	10,88	17 075	17 468	78,99	79,60	0,77
Jawa Barat	72,41	72,44	12,15	12,30	7,86	7,95	9 778	10 035	69,50	70,05	0,79
Jawa Tengah	73,96	74,02	12,38	12,45	7,03	7,15	9 930	10 153	69,49	69,98	0,71
DI Yogyakarta	74,68	74,71	15,03	15,23	9,00	9,12	12 684	13 229	77,59	78,38	1,02
Jawa Timur	70,68	70,74	12,66	12,98	7,14	7,23	10 383	10 715	68,95	69,74	1,15
Banten	69,43	69,46	12,35	12,70	8,27	8,37	11 261	11 469	70,27	70,96	0,98
Bali	71,35	71,41	12,97	13,04	8,26	8,36	13 078	13 279	73,27	73,65	0,52
Nusa Tenggara Barat	65,38	65,48	13,04	13,16	6,71	6,79	9 241	9 575	65,19	65,81	0,95
Nusa Tenggara Timur	65,96	66,04	12,84	12,97	6,93	7,02	7 003	7 122	62,67	63,13	0,73
Kalimantan Barat	69,87	69,90	12,25	12,37	6,93	6,98	8 279	8 348	65,59	65,88	0,44
Kalimantan Tengah	69,54	69,57	12,22	12,33	8,03	8,13	9 809	10 155	68,53	69,13	0,88
Kalimantan Selatan	67,80	67,92	12,21	12,29	7,76	7,89	10 891	11 307	68,38	69,05	0,98
Kalimantan Timur	73,65	73,68	13,18	13,35	9,15	9,24	11 229	11 355	74,17	74,59	0,57
Kalimantan Utara	72,16	72,43	12,54	12,59	8,36	8,49	8 354	8 434	68,76	69,20	0,64
Sulawesi Utara	70,99	71,02	12,43	12,55	8,88	8,96	9 729	10 148	70,39	71,05	0,94
Sulawesi Tengah	67,26	67,31	12,72	12,92	7,97	8,12	8 768	9 034	66,76	67,47	1,06
Sulawesi Selatan	69,80	69,82	12,99	13,16	7,64	7,75	9 992	10 281	69,15	69,76	0,88
Sulawesi Tenggara	70,44	70,46	13,07	13,24	8,18	8,32	8 697	8 871	68,75	69,31	0,81
Gorontalo	67,12	67,13	12,70	12,88	7,05	7,12	9 035	9 175	65,86	66,29	0,65
Sulawesi Barat	64,22	64,31	12,22	12,34	6,94	7,14	8 260	8 450	62,96	63,60	1,02
Maluku	65,31	65,35	13,56	13,73	9,16	9,27	8 026	8 215	67,05	67,60	0,82
Maluku Utara	67,44	67,51	13,10	13,45	8,37	8,52	7 423	7 545	65,91	66,63	1,09
Papua Barat	65,19	65,30	12,06	12,26	7,01	7,06	7 064	7 175	61,73	62,21	0,78
Papua	65,09	65,12	9,95	10,23	5,99	6,15	6 469	6 637	57,25	58,05	1,40
Indonesia	70,78	70,90	12,55	12,72	7,84	7,95	10 150	10 420	69,55	70,18	0,91

XVIII. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2017

A. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2017

1. Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun mulai tahun 2012. Pada tahun 2017, SPAK dilakukan pada bulan Februari di 33 provinsi dengan sampel 10.000 rumah tangga. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
2. SPAK ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).
3. IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2017 sebesar 3,71 dalam skala 0 sampai 5. Angka tersebut lebih tinggi (0,12 poin) dibandingkan dengan capaian 2015 yang besarnya 3,59. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya *zero tolerance* terhadap korupsi semakin melekat dan mewujud dalam perilaku masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2017 sebesar 3,71 pada skala 0 sampai 5

Tabel 18.1
Nilai IPAK Tahun 2012–2017

Tahun	IPAK
(1)	(2)
2012	3,55
2013	3,63
2014	3,61
2015	3,59
2017	3,71

B. IPAK Berdasarkan Dimensi Utama

1. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama yakni pertama unsur persepsi yang berupa pendapat/penilaian terhadap kebiasaan perilaku koruptif di masyarakat, dan kedua adalah pengalaman (pengalaman perilaku koruptif).
2. Tabel 1 menunjukkan peningkatan Indeks Persepsi dari tahun 2015 ke 2017, yaitu dari 3,73 menjadi 3,81. Kemudian, pada periode yang sama Indeks Pengalaman juga mengalami peningkatan dari 3,39 menjadi 3,60. Peningkatan indeks pada dua dimensi ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka IPAK secara keseluruhan dari 3,59 menjadi 3,71.
3. Dari hasil pengukuran IPAK 2017, terlihat fenomena yang menarik untuk dicermati. Indeks Persepsi menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2012 ke 2017. Hal ini menggambarkan pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku korupsi semakin baik. Sebaliknya pada dimensi pengalaman terjadi perubahan dari pola tren yang menurun di tahun 2012–2015 menjadi meningkat untuk tahun 2017.

Tabel 18.2
Indeks Menurut Dimensi, 2012–2017

Dimensi	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Persepsi	3,54	3,66	3,71	3,73	3,81
Indeks Pengalaman	3,58	3,58	3,49	3,39	3,60
IPAK Indonesia	3,55	3,63	3,61	3,59	3,71

C. IPAK Berdasarkan Karakteristik Demografi

1. Sejak periode awal pengukuran (2012) IPAK masyarakat di wilayah perdesaan selalu lebih kecil dibanding IPAK masyarakat di wilayah perkotaan. IPAK 2017 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan relatif meningkat, yaitu sebesar 3,86, sedangkan IPAK 2017 di wilayah perdesaan sebesar 3,53, juga sedikit meningkat dibandingkan IPAK 2015.

IPAK masyarakat di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi

Tabel 18.3
IPAK Menurut Wilayah, 2012–2017

Karakteristik Responden	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Wilayah:					
Perkotaan	3,66	3,71	3,71	3,71	3,86
Perdesaan	3,46	3,55	3,51	3,46	3,53

2. Secara konsisten (tahun 2012–2017) tampak bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK. IPAK 2017 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,58, SLTA sebesar 3,99 dan di atas SLTA sebesar 4,09.

Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK

Tabel 18.4
IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012–2017

Karakteristik Responden	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendidikan Tertinggi:					
SLTP ke bawah	3,47	3,55	3,52	3,49	3,58
SLTA	3,78	3,82	3,85	3,80	3,99
SLTA ke atas	3,94	3,94	4,01	4,00	4,09

3. Gambaran pada tahun 2012–2017 menunjukkan IPAK penduduk dengan usia 40 hingga 60 tahun selalu menjadi yang tertinggi disusul IPAK penduduk kurang usia kurang dari 40 tahun. Pada tahun 2017, IPAK masyarakat usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,74, IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,71, sedangkan IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,62. Dengan kata lain, IPAK penduduk usia lebih dari 60 tahun lebih rendah dibandingkan IPAK usia yang lebih muda.

IPAK masyarakat usia 40-59 tahun lebih tinggi dibandingkan IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun dan lebih dari 60 tahun

Tabel 18.5
IPAK Menurut Umur, 2012–2017

Karakteristik Responden	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur (Tahun):					
Kurang dari 40	3,57	3,63	3,63	3,59	3,71
40 sampai 59	3,58	3,65	3,64	3,62	3,74
60 atau lebih	3,45	3,55	3,54	3,49	3,62

D. Indikator Tunggal IPAK 2017

Berikut ini adalah beberapa indikator yang digunakan dalam penyusunan IPAK 2017.

1. Pendapat Terhadap Kebiasaan/Perilaku di Masyarakat

Persepsi terhadap kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat dikelompokkan dalam tiga lingkup yaitu lingkup keluarga, komunitas, dan publik.

1.1 Lingkup Keluarga

Tabel 18.6
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Keluarga merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Istri yang menerima uang pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut	68,69	76,43	78,65	76,04	77,37
Seorang Pegawai Negeri bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi	72,95	76,16	78,11	79,05	75,58
Orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak	80,15	82,70	86,07	85,64	87,09
Seseorang mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya	95,06	96,56	97,44	97,31	97,66

- Sekitar 77 persen masyarakat menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut.
- Sekitar 76 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.
- Sekitar 87 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak.
- Sekitar 98 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya.

1.2 Lingkup Komunitas

Tabel 18.7
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Komunitas merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh Masyarakat Lainnya ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian)	30,77	36,30	37,76	36,32	50,86
Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh Masyarakat Lainnya ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan	38,25	42,33	45,17	46,42	56,69
Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	52,97	57,49	60,57	60,37	56,30
Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan	65,24	68,40	71,12	72,56	68,41

- Sekitar 51 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).
- Sekitar 57 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika menjelang hari raya keagamaan.
- Sekitar 56 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada Ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).
- Sekitar 69 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada Ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan.

1.3 Lingkup Publik

Tabel 18.8
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Tingkat Publik merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan, seseorang menjamin keluarga/ saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta	53,39	61,10	67,20	68,39	65,91
Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	81,38	84,28	87,21	87,51	88,71
Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP, KK)	55,09	57,20	58,34	62,28	65,72
Memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK	60,67	62,96	65,08	69,44	72,14
Pelanggar lalu lintas yang memberi uang damai kepada Polisi	67,58	70,99	73,80	77,20	78,45
Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah	66,95	71,80	71,57	74,76	73,89
Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar	64,45	69,69	70,95	73,32	70,17
Guru meminta uang/barang dari orangtua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor	83,16	87,93	89,00	89,49	89,15
Memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.	84,05	88,17	88,96	90,63	90,47
Membagikan uang/barang kepada calon pemilih	72,15	72,57	77,38	78,20	79,14
Mengharapkan pembagian uang/barang pada pelaksanaan PEMILU/PILKADA	72,90	72,69	76,90	77,61	78,51

- Sekitar 66 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan.
- Sekitar 89 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.
- Sekitar 66 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK).
- Sekitar 72 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK.
- Sekitar 78 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang damai kepada polisi.
- Sekitar 74 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah.
- Sekitar 70 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang mendapatkan jaminan (jatah) agar anaknya diterima di sekolah tempatnya mengajar.
- Sekitar 89 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor.
- Sekitar 90 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.
- Sekitar 78-79 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU.

2. Pengalaman Masyarakat

Pengalaman masyarakat dalam IPAK mencakup sepuluh layanan publik yakni Pengurus RT/RW, Kelurahan/Kecamatan, Kepolisian, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Layanan Kesehatan (Rumah Sakit Negeri), Sekolah Negeri, Pengadilan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Pertanahan (BPN). Beberapa indikator yang mengalami perubahan relatif besar yaitu:

- Persentase masyarakat yang mengakses layanan publik sendiri dalam 12 bulan terakhir dan lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 76,05 persen pada tahun 2015 menjadi 80,94 persen pada tahun 2017.
- Persentase masyarakat yang mengakses layanan publik melalui perantara selama 12 bulan terakhir dan lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 23,95 persen pada tahun 2015 menjadi 19,06 persen pada tahun 2017.
- Persentase masyarakat yang mengurus sendiri dan memberikan uang/barang melebihi ketentuan menurun dari 13,78 persen pada tahun 2015 menjadi 12,03 persen pada tahun 2017.
- Persentase masyarakat yang keberatan memberikan uang/barang melebihi ketentuan mengalami kenaikan dari 7,67 persen pada tahun 2015 menjadi 9,34 persen pada tahun 2017.

Berdasarkan pengukuran 2012–2017, terlihat sebagian besar masyarakat yang membayar melebihi ketentuan menyatakan melakukan perilaku tersebut karena tidak ada yang meminta (inisiatif sendiri) dan hal yang lumrah. Pada 2017 angkanya masing-masing sebesar 44,57 persen dan 19,56 persen.

Tabel 18.9
Cara Mengetahui harus Membayar Melebihi Ketentuan, 2012–2017

Cara Mengetahui	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Diminta Petugas	43,42	38,85	35,86	32,62	33,58
Diminta Pihak Ketiga	4,43	3,58	3,74	4,91	2,29
Hal yang Lumrah	30,93	27,96	29,57	32,12	19,56
Tidak Ada yang Meminta (Inisiatif Sendiri)	21,22	29,61	30,84	30,34	44,57

Berdasarkan pengukuran 2012–2017, sebagian besar masyarakat yang membayar melebihi ketentuan sebagian besar beralasan bahwa hal itu mereka lakukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan karena ingin mempercepat proses pengurusan.

Pada 2017, masyarakat yang membayar melebihi ketentuan sebagian besar beralasan bahwa hal itu mereka lakukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih (46,30 persen). Alasan lainnya adalah karena ingin mempercepat proses pengurusan (33,64 persen), ingin memperoleh pelayanan yang lebih baik (14,12 persen), hingga demi menjaga hubungan baik (7,91 persen).

Tabel 18.10
Alasan Masyarakat Membayar Melebihi Ketentuan, 2012–2017

Alasan	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mempercepat Proses Pengurusan	46,88	47,21	41,78	43,53	31,64
Mendapatkan Pelayanan Lebih Baik	12,23	12,84	9,86	11,26	14,12
Demi Menjaga Hubungan Baik	4,93	5,36	8,47	9,52	7,93
Sebagai Tanda Terima Kasih	35,96	34,59	39,89	35,69	46,30

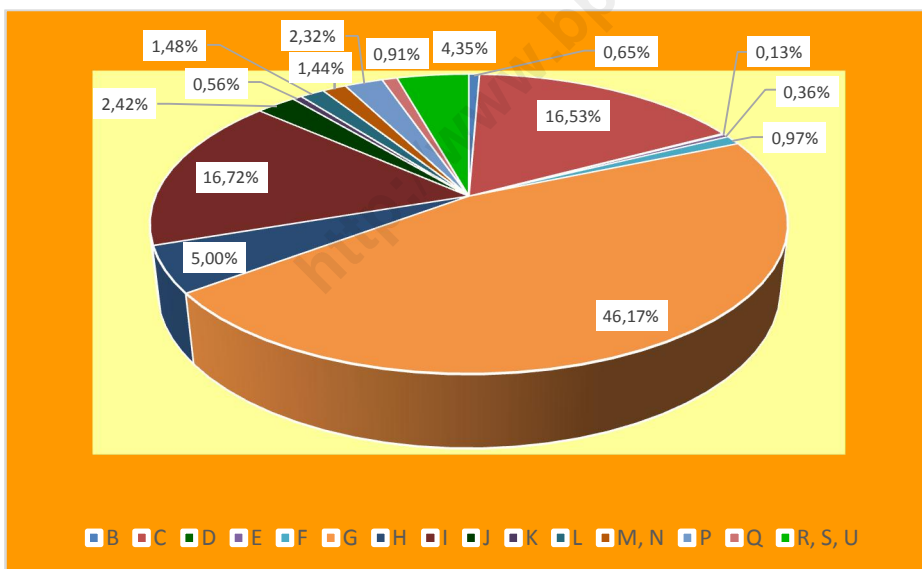
<http://www.bps.go.id>

XIX. SENSUS EKONOMI 2016

- Hasil pendaftaran SE2016 tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Bila dibandingkan menurut skala usaha, 26,26 juta perusahaan (98,33 persen) berskala UMK dan 0,45 juta perusahaan (1,67 persen) berskala UMB. Dibandingkan dengan Sensus Ekonomi 2006 (SE06) jumlah usaha/perusahaan meningkat 17,51 persen dari 22,73 juta menjadi 26,71 juta.

Hasil pendaftaran SE2016 tercatat 26,71 juta usaha/perusahaan, naik 17,51 persen dibanding SE2006 yang sebesar 22,73 juta usaha/perusahaan

Grafik 19.1
Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016



- Dilihat menurut lapangan usaha, usaha perdagangan besar dan eceran mencapai 12,3 juta usaha atau 46,17 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada, diikuti usaha penyedia akomodasi dan makan minum 16,72 pdan industri pengolahan 16,53 persen.
- Sebaran usaha/perusahaan antarpulau secara umum menunjukkan 79,35 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa). Sebanyak

16,2 juta usaha/perusahaan berlokasi di Pulau Jawa atau 60,74 persen terhadap seluruh perusahaan di Indonesia, selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) dengan jumlah usaha/perusahaan terbanyak di Pulau Sulawesi (8,09 persen).

4. Hasil pendaftaran SE2016 menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia, kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,75 persen, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 11,97 persen, dan selebihnya sebesar 33,47 persen merupakan lapangan usaha lainnya.
5. Sebaran tenaga kerja antarkawasan dan antarpulau secara umum menunjukkan bahwa lebih dari 81 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Sebanyak 44,6 juta orang tenaga kerja berlokasi di Pulau Jawa atau 63,38 persen terhadap seluruh perusahaan di Indonesia, selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan jumlah tenaga kerja terbanyak ada di Pulau Sulawesi (6,82 persen).

Tabel 19.1
Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha
dan Skala Usaha Tahun 2016

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	170 150	2 532	172 682	0,65
C. Industri Pengolahan	4 373 821	42 468	4 416 289	16,53
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	30 639	3 294	33 933	0,13
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	92 391	2 439	94 830	0,36
F. Konstruksi	227 564	30 718	258 282	0,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12 151 822	180 839	12 332 661	46,17
H. Pengangkutan dan pergudangan	1 302 162	32 123	1 334 285	5,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4 445 519	20 703	4 466 222	16,72
J. Informasi dan Komunikasi	630 448	15 250	645 698	2,42
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	94 205	56 200	150 405	0,56
L. Real Estat	386 795	7 483	394 278	1,48
M,N. Jasa Perusahaan	358 178	27 291	385 469	1,44
P. Pendidikan	607 283	12 664	619 947	2,32
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	239 236	4 680	243 916	0,91
R,S,U. Jasa Lainnya	1 153 436	8 668	1 162 104	4,35
Jumlah	26 263 649	447 352	26 711 001	100,00
	(98,33)	(1,67)	(100,00)	

Tabel 19.2
Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha dan Pulau 2016

Wilayah/Pulau	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Sumatera	4 897 457	74 276	4 971 733	18,61
Jawa	15 931 889	291 697	16 223 586	60,74
Bali dan Nusa Tenggara	1 495 526	22 088	1 517 614	5,68
Kalimantan	1 352 324	26 645	1 378 969	5,16
Sulawesi	2 134 579	25 110	2 159 689	8,09
Maluku dan Papua	451 874	7 536	459 410	1,72
Jumlah	26 263 649	447 352	26 711 001	100,00
	(98,33)	(1,67)	(100,00)	

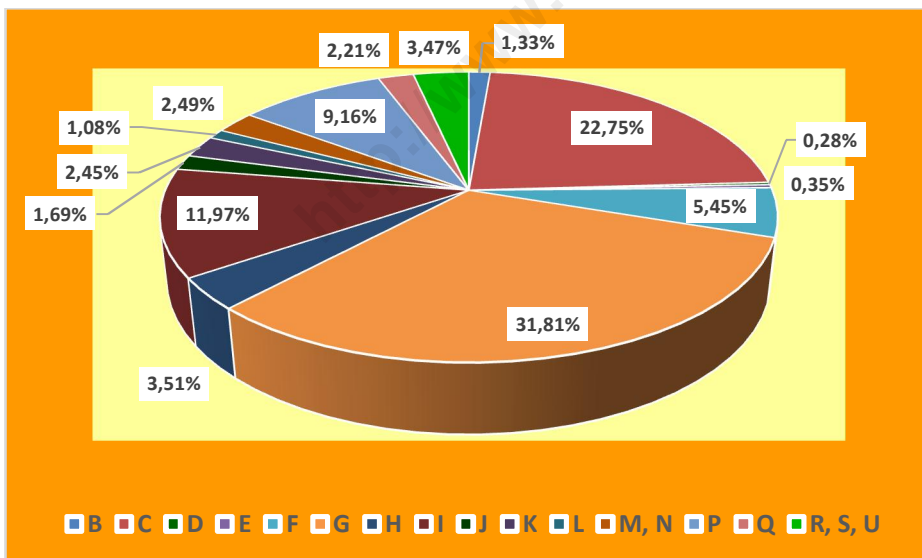
Tabel 19.3
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha 2016

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	532 109	403 644	935 753	1,33
C. Industri Pengolahan	9 351 705	6 648 202	15 999 907	22,75
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	61 466	135 076	196 542	0,28
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	168 332	79 853	248 185	0,35
F. Konstruksi	2 041 813	1 790 619	3 832 432	5,45
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	20 009 990	2 359 409	22 369 399	31,81
H. Pengangkutan dan pergudangan	1 740 528	727 717	2 468 245	3,51
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7 804 667	612 937	8 417 604	11,97
J. Informasi dan Komunikasi	938 714	247 358	1 186 072	1,69
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	550 067	1 170 489	1 720 556	2,45
L. Real Estat	591 879	165 816	757 695	1,08
M,N. Jasa Perusahaan	935 307	815 973	1 751 280	2,49
P. Pendidikan	5 787 702	654 439	6 442 141	9,16
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	905 070	652 415	1 557 485	2,21
R,S,U. Jasa Lainnya	2 222 175	214 995	2 437 170	3,47
Jumlah	53 641 524	16 678 942	70 320 466	100,00
	(76,28)	(23,72)	(100,00)	

Tabel 19.4
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Pulau 2016

Wilayah/Pulau	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Sumatera	10 202 866	2 199 543	12 402 409	17,64
Jawa	32 356 833	12 215 111	44 571 944	63,38
Bali dan Nusa Tenggara	3 126 347	551 231	3 677 578	5,23
Kalimantan	2 771 636	872 216	3 643 852	5,18
Sulawesi	4 194 144	604 686	4 798 830	6,82
Maluku dan Papua	989 698	236 155	1 225 853	1,74
Jumlah	53 641 524	16 678 942	70 320 466	100,00
	(76,28)	(23,72)	(100,00)	

Grafik 19.2
Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha 2016





DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2087-930X



9 772087 930006